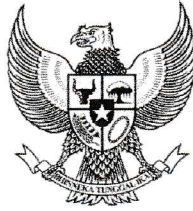


RKPD

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2023



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **18** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah tahun 2024.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Daerah dan sekaligus menjadi tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA NASKAH RKPD

Pasal 3

Naskah RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Rincian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

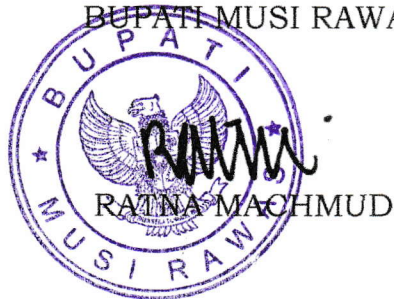
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 07 Juli 2023

BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 07 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 18

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala segala karunia dan kekuatan-Nya sehingga kita dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD) Musi Rawas tahun 2024.

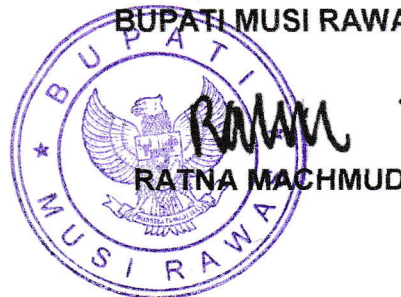
Dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, serta mengacu pada rancangan RKP tahun 2024 dan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Dokumen RKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan, karena dokumen dimaksud memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dan menjadi pedoman dalam proses penganggaran RAPBD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024. Selanjutnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kabupaten Musi Rawas harus mempedomani Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi/memaduserasikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berikut pelaksanaannya pada Tahun 2024.

Pada kesempatan ini juga, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024.

Muara Beliti, 07 Juli 2023

BUPATI MUSI RAWAS



RATNA MACHMUD

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i-iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.9
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.12
1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I.12
1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2024	I.15
1.3.3 Prinsip dan Pendekatan.....	I.16
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I.19
1.4.1 Maksud	I.19
1.4.2 Tujuan	I.19
1.5. Sistematika Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024.....	I.19
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II.1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II.1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II.1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II.21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II.37
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.74
2.2. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan RKPD 2022 Analisis Indikator Makro Dan Realisasi Target Sasaran RPJMD Tahun 2022.....	II.76
2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas	II.76
2.2.2 Analisis Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas.....	II.78
2.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2022 dan Realisasinya.....	II.78
2.2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan.....	II.82
2.3. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan	II.94
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1 Analisis Perekonomian Global	III.2

3.1.2	Analisis Perekonomian Nasional	III.3
3.1.3	Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024	III.5
3.1.4	Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2024 ...	III.8
3.1.5	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III.15
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas	III.18
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan daerah	III.19
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.21
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III.27

BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024	IV.1
4.1	Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV.2
4.2.	Tema dan Tematik Pembangunan Daerah Tahun 2024	IV.4
4.3.	Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.....	IV.6
4.3.1	Telaah Terhadap RKP 2024	IV.6
4.3.2	Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	IV.8
4.3.3	Telaah Terhadap Pemenuhan Janji Kepala Daerah Pada Saat Kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.8
4.3.4	Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas.....	IV.15
4.3.5	Telaah Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya.....	IV.15
4.3.6	Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas	IV.16
4.3.7	Telaah Terhadap Isi Strategis.....	IV.19
4.4	Prioritas, Sasaran, Arah Kebijakan, Program Prioritas Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	IV.20
4.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Prioritas Nasional tahun 2024.....	IV.53
4.6	Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan	IV.57
4.6.1	Strategi Pemulihan dampak Pandemi Covid-19	IV.57
4.6.2	Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs.....	IV.58

4.6.3	Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)	IV.63
4.6.4	Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM	IV.64
4.7	Arah Pengembangan Kecamatan	IV.65
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V.1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...	VI.1
BAB VII	PENUTUP	VII.1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.....	I.17
Tabel 1.2	Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Yang Berorientasi Pada Proses	I.17
Tabel 1.3	Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Yang Berorientasi Pada Substansi.....	I.18
Tabel 2.1	Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas.....	II.2
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022	II.9
Tabel 2.3	PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2022 (Milyar Rupiah).....	II.22
Tabel 2.4	Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 (%)	II.24
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2022 (%)	II.25
Tabel 2.6	Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku.....	II.27
Tabel 2.7	Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) Di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022	II.28
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022	II.42
Tabel 2.9	Daerah Irigasi Pusat	II.46
Tabel 2.10	Daerah Irigasi Provinsi.....	II.46
Tabel 2.11	Daerah Irigasi Kabupaten Musi Rawas	II.46
Tabel 2.12	Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan	II.50
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020- 2022.....	II.54
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2020-2022 ..	II.57
Tabel 2.15	Kinerja Pertanahan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015-2020.....	II.58
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.60
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2022	II.61
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2019- 2021.....	II.65
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2022.....	II.66

Tabel 2.20	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2022.....	II.67
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	II.67
Tabel 2.22	Kunjungan Wisata Tahun 2022.....	II.68
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022.....	II.73
Tabel 2.24	Capin Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2010.....	II.74
Tabel 2.25	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2022.....	II.75
Tabel 2.26	Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi RawasTahun 2020-2022	II.75
Tabel 2.27	Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2020- 2022	II.76
Tabel 2.28	Capaian Indikator Makro Daerah dan target RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2021-2026	II.77
Tabel 2.29	Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2022	II.79
Tabel 2.30	Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja RKPD Tahun 2022.....	II.90
Tabel 2.31	Permasalahan dan Isu Strategis	II.95
Tabel 2.32	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Dalam Merespon Program SDGs.....	II.100
Tabel 2.33	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan.....	II.103
Tabel 2.34	Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	II.104
Tabel 2.35	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	II.104
Tabel 2.36	Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	II.107
Tabel 2.37	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....	II.108
Tabel 2.38	Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	II.109
Tabel 2.39	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II.109
Tabel 2.40	Rincian Anggaran, Program dan Kegiatan Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	II.110
Tabel 2.41	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas	II.111
Tabel 2.42	Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022.....	II.112

Tabel 2.43	Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial.....	II.113
Tabel 2.44	Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Bidang Sosial Tahun 2022.....	II.114
Tabel 3.1	Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB Sisi Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 (%).....	III.7
Tabel 3.2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019 – 2022 serta proyeksi pada Tahun 2023 dan 2024	III.10
Tabel 3.3	PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2012 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (milyar rupiah).....	III.11
Tabel 3.4	Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.....	III.15
Tabel 3.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan sektor-sektor Strategis	III. 16
Tabel 3.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi	III.16
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022	III.20
Tabel 3.8	Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024	III.21
Tabel 3.9	Rencana Struktur Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran tahun 2023 dan Proyeksi Tahun anggaran 2024.....	III.23
Tabel 3.10	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.....	III.30
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.....	IV.3
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2024 dan Tema Pembangunan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Tema Pembangunan Musi rawas Tahun 2024	IV.6
Tabel 4.4	Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026	IV.12
Tabel 4.5	Isu Strategis Pembangunan Daerah	IV.19
Tabel 4.6	Program Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.21

Tabel 4.7	Pemetaan Program Penurunan Stunting Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	IV.24
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Musi Rawas Tahun 2024	IV.50
Tabel 4.9	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)	IV.57
Tabel 4.10	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan Prioritas Provinsi Tahun 2024	IV.82
Tabel 4.11	Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan RPJMD 2021-2026	IV.83
Tabel 4.12	Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Dalam Merespon Program SDGs.....	IV. 90
Tabel 4.13	Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarustamaan Gender.....	IV.92
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022	V.2
Tabel 5.2	Rencana Alokasi Pendanaan untuk penanganan Covid-19 Tahun 2022.....	V.5
Tabel 5.3	Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah Tahun 2022.....	V.27
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas.....	VI.1
Tabel 6.2	Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.....	VI.8
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas	VI.9

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas II.3
Grafik 2.2	Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas II.6
Grafik 2.3	Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 II.8
Grafik 2.4	PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan II.23
Grafik 2.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022..... II.26
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022..... II.26
Grafik 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan II.27
Grafik 2.8	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022 II.29
Grafik 2.9	Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2022..... II.30
Grafik 2.10	Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022 II.30
Grafik 2.11	Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2022 II.31
Grafik 2.12	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022 II.32
Grafik 2.13	Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022..... II.32
Grafik 2.14	Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2022..... II.33
Grafik 2.15	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2022..... II.34
Grafik 2.16	Kemiskinan Ekstrim Kabupaten/Kota Tahun 2022..... II.34
Grafik 2.17	Angka Harapan Lama Sekolah 2020-2022..... II.35
Grafik 2.18	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 II.36
Grafik 2.19	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022..... II.36
Grafik 2.20	Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022 II.38

Grafik 2.21	Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022	II.39
Grafik 2.22	Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2021	II.40
Grafik 2.23	Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2022	II.41
Grafik 2.24	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022	II.43
Grafik 2.25	Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022	II.45
Grafik 2.26	Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2022	II.45
Grafik 2.27	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak	II.51
Grafik 2.28	Air Minum Tahun 2020-2022	II.52
Grafik 2.29	Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.52
Grafik 2.30	Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2022	II.53
Grafik 2.31	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2020-2022	II.54
Grafik 2.32	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022	II.55
Grafik 2.33	Tingkat Setengah Pengangguran Tahun 2021-2022	II.56
Grafik 2.34	Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021	II.57
Grafik 2.35	Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2022	II.58
Grafik 2.36	Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2020-2022	II.59
Grafik 2.37	Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2019-2021	II.60
Grafik 2.38	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) % Tahun 2020-2022	II.61
Grafik 2.39	Angka kelahiran Kasar (CBR) Tahun 2020-2022	II.62
Grafik 2.40	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tahun 2020-2022	II.63
Grafik 2.41	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020-2022	II.63
Grafik 2.42	Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2020-2022	II.64
Grafik 2.43	Persentase Peningkatan Investasi	II.64
Grafik 2.44	Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2020-2022	II.68
Grafik 2.45	Produksi Padi Tahun 2020 – 2022	II.69
Grafik 2.46	Produksi Jagung Tahun 2020 – 2022	II.69
Grafik 2.47	Produksi Kedelai Tahun 2020 – 2022	II.70
Grafik 2.48	Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi Tahun 2020-2022	II.71

Grafik 2.49	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (Milyar) Tahun 2020-2022	II.71
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Global.....	III.3
Grafik 3.2	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut.....	III.5
Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024.....	III.13
Grafik 3.4	Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024	III.14

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024	I.4
Gambar 1.2 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa.....	I.4
Gambar 1.3 Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	I.5
Gambar 1.4 Forum Organisasi Perangkat Daerah.....	I.6
Gambar 1.5 Musrenbang RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.....	I.7
Gambar 1.6 Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD	I.9
Gambar 1.7 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD.....	I.13
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Musi Rawas	II.2
Gambar 2.2 Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat.....	II.7
Gambar 2.3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas.....	II.21
Gambar 2.4 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas ..	II.48
Gambar 4.1 Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas.....	IV.17

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas merupakan rencana kerja pemerintah tahunan yang diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Selatan, rancangan Awal RKP (Rencana Kerja Pemerintah), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Setelah diterbitkannya Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Nomenklatur yang semula hanya pada level Program dan Kegiatan, kini menjadi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Pengelolaan data perencanaan pembangunan yang semula menggunakan SIMDA, kini harus berganti menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang disediakan oleh Kemendagri.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dokumen RKPD secara umum mempunyai nilai strategis, antara lain:

1. Merupakan instrumen pelaksanaan RPJMD;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja OPD, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD;
4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD;
5. Menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan bahwa APBD telah disusun dengan berlandaskan RKPD.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas memberikan perhatian dan daya upaya optimal secara sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya;
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang;
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur;
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD.

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD.

Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

- a. Perumusan rancangan awal RKPD.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut:

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 4) Evaluasi kinerja tahun lalu;
- 5) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah nasional;
- 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas;
- 7) Perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas;
- 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah;
- 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
- 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik;

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023 dengan peserta dari stakeholder pelaku pembangunan yaitu, perwakilan dari organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia akademisi serta dari organisasi perangkat daerah.

Gambar 1.1
Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi
Publik RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024



3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan

Musrenbang di masing-masing Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk membahas usulan kegiatan di tingkat desa untuk menghasilkan kesepakatan akan yang diusulkan di musrenbang kecamatan.

Gambar 1.2
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa



4. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Musrenbang di masing-masing Kecamatan diawali dengan pelaksanaan pramusrenbang, dimana pada pelaksanaan pramusrenbang dilakukan pembahasan trilateral desk antara perwakilan desa, pihak kecamatan serta OPD. Dalam trilateral desk dilakukan penentuan usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas dan verifikasi dari OPD. Hasil kesepakatan trilateral desk tersebut yang dibawa pada waktu pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan untuk disepakati oleh para pihak.

Gambar 1.3

Musrenbang Tingkat Kecamatan



5. Penyusunan rancangan RKPD.

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif pada setiap rancangan Renja OPD sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

6. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPR

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2024 terdapat 411 Usulan Kegiatan, yang rata-rata berasal dari bidang Infrastruktur di tingkat Desa yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah desa, meskipun ada beberapa usulan yang menjadi kewenangan Kabupaten, usulan tersebut sudah di verifikasi oleh OPD teknis, untuk menentukan kelayakannya dalam pembangunan Tahun 2024.

7. Pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah

Forum Organisasi Perangkat Daerah Proses yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan.
- b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas pada musrenbang.
- c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas
- d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan.
- e. Sinergi dengan RKPD Provinsi Sumatera Selatan dan RKP

Gambar 1.4
Forum Organisasi Perangkat Daerah



8. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara OPD, Bappeda Kabupaten Musi Rawas dengan stakeholder pembangunan.

Gambar 1.4
Musrenbang RKPD



9. Perumusan rancangan akhir RKPD.

Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

10. Fasilitasi rancangan akhir RKPD

Memenuhi amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 102 yang mengatur dan menerangkan proses dan tata cara pengendalian dan evaluasi Dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota, maka rancangan akhir RKPD Kabupaten Musi Rawas diserahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Selatan untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dijadikan bahan perbaikan rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11 Penetapan RKPD.

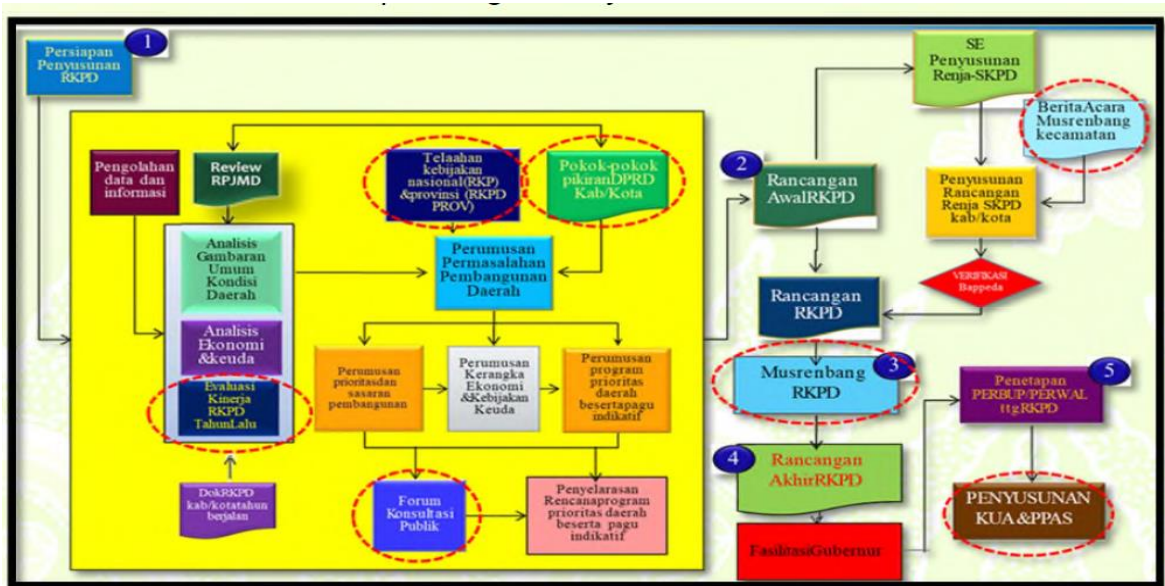
RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas setelah dilaksanakan fasilitasi RKPD Kabupaten Musi Rawas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan Kabupaten Musi Rawas dengan Provinsi Sumatera Selatan serta Pemerintah Pusat.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah diselaraskan dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan prioritas pembangunan di tingkat nasional, RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-4 (empat) RPJMD Kabupaten Musi Rawas 2021-2026. Selanjutnya, akan digunakan sebagai landasan penyusunan rancangan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.5

Alur Proses Penyusunan RKPD Sampai dengan Penyusunan APBD



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 ini antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 7).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sinkron dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

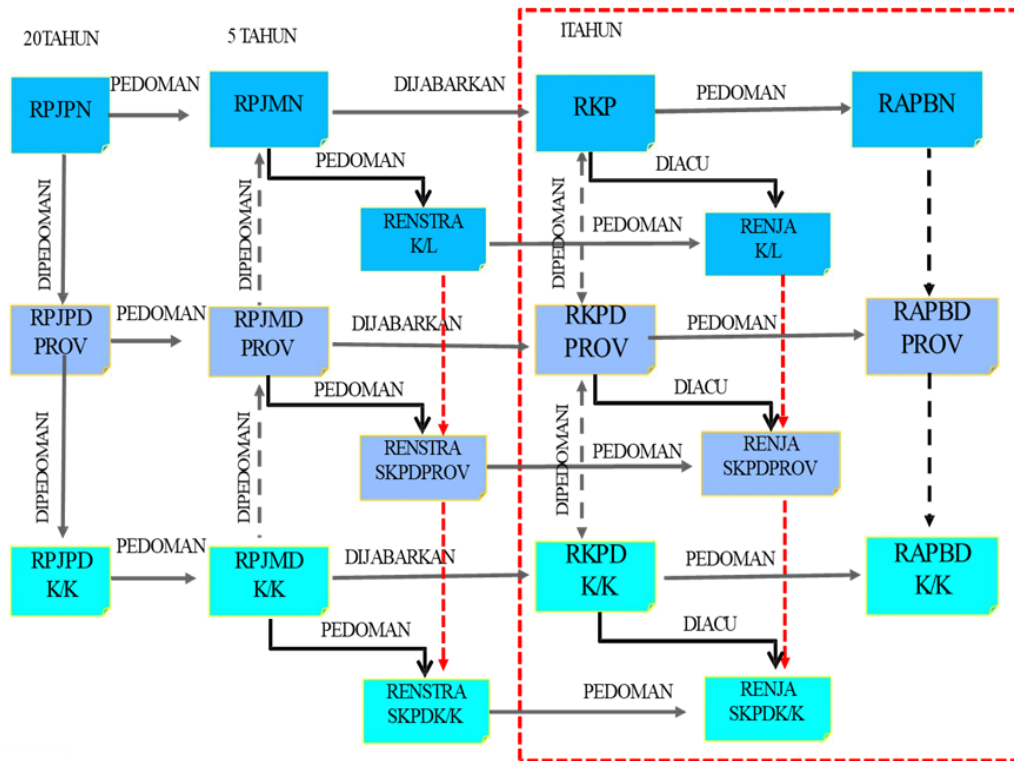
1.3.1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan dokumen perencanaan Kabupaten Musi Rawas. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini :

Gambar 1.2

Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan OPD



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing - masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Secara lengkap penjelasan masing-masing dokumen yang terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024. RKP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan memastikan bahwa prioritas nasional sudah terintegrasi dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

2. Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 memperhatikan dokumen Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas akan mendukung kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mengacu dokumen RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 masuk dalam tahap ke empat RPJP Kabupaten Musi Rawas 2005-2025, pada tahap ke empat ini ditujukan untuk mencapai kemandirian masyarakat Musi Rawas dalam segala bidang sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi, selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Kabupaten Musi Rawas terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi dapat diwujudkan.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 merupakan penjabaran Tahun ke empat RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program

Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas periode 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Bupati Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021.

6. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Renstra OPD tersebut sebagai pedoman penyusunan Renja OPD Tahun 2024.

7. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

RKPD Tahun 2024 akan menjadi acuan bagi OPD dalam menyusun dokumen Renja OPD Tahun 2024 sebagai rencana pembangunan tahunan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata perangkat daerah.

1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2024

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Musi Rawas disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu :

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi rancangan awal, melalui Arahan Bupati Musi Rawas kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Musi Rawas dan Arahan Bupati Musi Rawas kepada OPD. Arahan Bupati Musi Rawas tersebut selanjutnya menjadi bahan rancangan awal (rancangan teknokratis) RKPD yang dikonsultasikan kepada publik melalui Forum Konsultasi Publik.

2. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas, serta

rancangan program/kegiatan OPD. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun 2024 untuk penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024. Produk rancangan akhir RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian proses Musrenbang Kabupaten Musi Rawas dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas;

4. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD 2024 mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Sumatera Selatan, RPJMD Kabupaten Musi Rawas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

1.3.3 Prinsip dan Pendekatan

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 disusun oleh Pemerintah Daerah secara swakelola dengan melibatkan stakeholder terkait sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan regulasi yang mengatur mengenai perencanaan daerah dan didasarkan pada pertimbangan bahwa RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan publik, sehingga menjadi kewajiban aparat pemerintah daerah untuk menyusun mengimplementasikan dan mempertanggungjawabkannya.

Dalam rentang kendali untuk memastikan bahwa output hasil penyusunan yang berkualitas, taat regulasi dan operasional, maka pendekatan dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 menggunakan prinsip sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Prinsip Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

PRINSIP	INDIKATOR
Keterkaitan	Tersedianya penjelasan mengenai keterkaitan antara Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten RKPD dengan RPJMD, RPJP, RKP, RKPD provinsi serta program prioritas daerah dengan propinsi dan Nasional.
Kolaboratif	Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan.
Kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. • Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika

Dalam aspek yang lain penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi. Detil konfigurasi orientasi pendekatan penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024
Yang Berorientasi Pada Proses

PENDEKATAN	PARAMETER
Teknokratik	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024.

PENDEKATAN	PARAMETER
Partisipatif	Dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Politik	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD) yang dibahas bersama dengan DPRD.
	Saran dan pendapat DPRD yang disampaikan melalui Pokok – Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024.
Atas-bawah (<i>topdown</i>)	Sinkronisasi dan sinergitas Prioritas Daerah Dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas dengan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
Bawah-atas (<i>bottom-up</i>)	Sinkronisasi usulan dari Musrenbangdes/Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024.
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 melalui forum konsultasi publik.

Selain itu dalam penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Tabel1.3.

**Pendekatan Penyusunan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024
Yang Berorientasi Pada Substansi**

PENDEKATAN	PARAMETER
Holistik-Tematik	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan 3 unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Integratif	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Spasial	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk :

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024;

1.4.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rawas (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 bertujuan mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RKPD tahun 2022, secara ringkas yaitu :

1. Kondisi Umum Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2022.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) tahap IV (masa transisi), serta prioritas pembangunan dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, arah kebijakan nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

Bab IV juga memberi landasan bagi penyiapan formulasi kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahap IV sebagai bagian dari masa transisi sebelum ditetapkan RPJMD yang baru.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program prioritas dan kegiatan prioritas daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, yang mempedomani RPJMD

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan RPJMN Tahun 2019-2024.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun rencana.

Bab VII Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Musi Rawas adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kabupaten Musi Rawas terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Ibukota Kabupaten Musi Rawas terletak di Kecamatan Muara Beliti berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Nomor 08/KPTS/DPRD/2004 tentang persetujuan usulan nama ibukota dan lokasi pusat pemerintahan.

Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 berjumlah 414.009 jiwa dan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² dengan kepadatan penduduknya mencapai 65,12 jiwa/km². Kabupaten Musi Rawas dapat ditempuh melalui transportasi darat dan udara. Melalui darat menggunakan angkutan umum (Kereta Api, Bus, Travel) dan Udara dengan Pesawat langsung dari bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ke Bandara Silampari.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

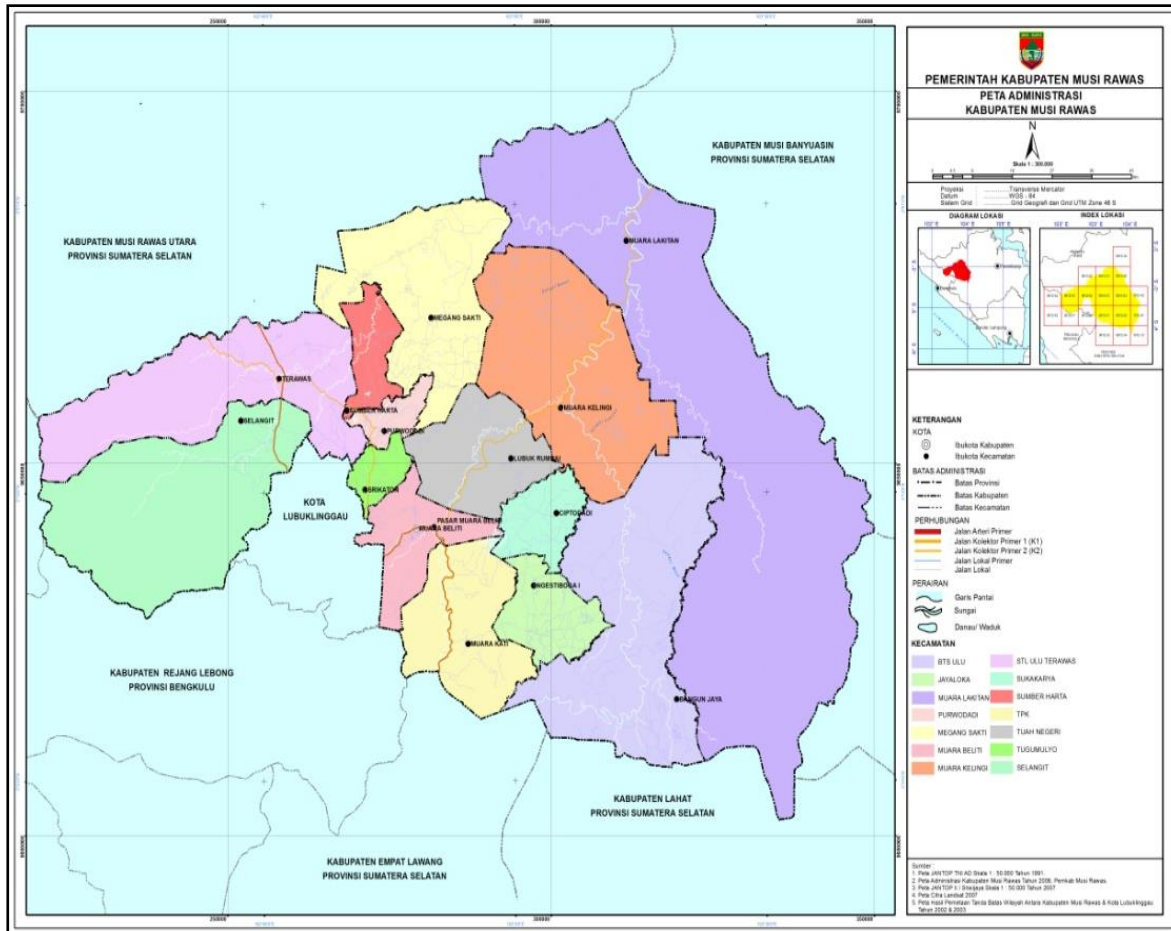
A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Musi Rawas secara geografis terletak pada posisi $102^{\circ} 00' 00''$ – $103^{\circ} 45'$ Bujur Timur dan $02^{\circ} 00''$ – $03^{\circ} 40' 00''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 635.717,15 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Lubuklinggau dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Musi Banyuasin.

Gambar 2.1 Peta Admistrasi Kabupaten Musi Rawas



Kabupaten Musi Rawas memiliki 14 Kecamatan, terdiri dari 13 Kelurahan dan 186 Desa dengan rincian sebagai berikut :

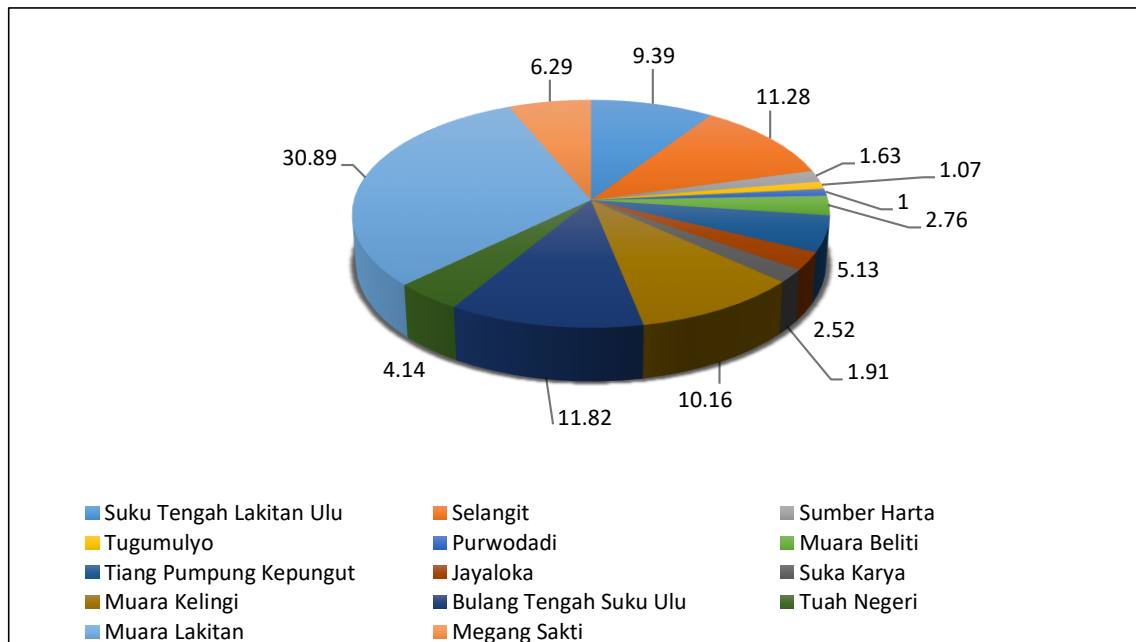
Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan, Desa dan Luas Wilayah di Kab. Musi Rawas

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas	1	12	596,92
2	Selangit	1	11	717,34
3	Sumber Harta	1	9	103,78
4	Tugumulyo	1	17	67,71

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (Ha)
5	Purwodadi	2	9	63,26
6	Muara Beliti	1	11	175,63
7	Tiang Pumpung Kepungut	0	10	326,42
8	Jayaloka	1	12	160,46
9	Sukakarya	0	8	121,53
10	Muara Kelingi	1	20	645,82
11	Bulang Tengah Suku Ulu	1	18	751,54
12	Tuah Negeri	0	11	263,45
13	Muara Lakitan	1	19	1.963,54
14	Megang Sakti	2	19	399,78
J U M L A H		13	186	6.357,17

Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Grafik 2.1
Persentase Terhadap Luas Wilayah (Ha) Menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas



Sumber : BPS Kab. Musi Rawas Tahun 2020

Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas mempunyai topografi yang bergelombang, dengan ketinggian berkisar 25-1000 m dari permukaan laut, dengan kemiringan bervariasi dari 0-2%, sampai lebih dari 40%. Luas wilayah yang dominan adalah wilayah dengan kemiringan 0-15% yang merupakan daerah potensial untuk pertanian, selebihnya berupa tanah perbukitan yang mempunyai kemiringan sangat curam yang sebagian besarnya berupa Bukit Barisan yang memanjang dari utara sampai selatan, khususnya di bagian barat daerah ini yang termasuk kedalam

kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) yang membentang luas dalam 4 (empat) provinsi. Keadaan alam Kabupaten Musi Rawas terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet dan kebun lainnya. Di Kabupaten Musi Rawas tidak terdapat gunung berapi, sedangkan di sebelah barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan.

Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas secara umum cocok untuk perkebunan, khususnya perkebunan karet dan sawit. Hal ini sangat mendukung perekonomian masyarakatnya yang banyak menggantungkan penghidupan pada perkebunan. Keadaan tanah di Kabupaten Musi Rawas terbagi atas beberapa jenis, antara lain jenis aluvial, litosol, asosiasi latisol, regosol, podsolik, dan asosiasi podsolik. Penyebaran jenis tanah di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :

1. *Aluvial* dengan ciri warna coklat kekuning-kuningan terbentuk oleh endapan liat dan pasir dijumpai di Kecamatan Tugumulyo dan Muara Kelingi. Tanah jenis ini seluas $\pm 8,05\%$ dari luas kabupaten dan sangat cocok untuk tanaman padi dan palawija.
2. *Litosol* seluas $\pm 7,17\%$ dari luas kabupaten baik dimanfaatkan untuk tanaman keras, rumput-rumputan dan usaha ternak.
3. *Asosiasi Latisol* hanya terdapat di kecamatan STL Ulu Terawas.
4. *Regosol* luasnya sama seperti asosiasi latisol, di mana $\pm 55,89\%$ berada di Kecamatan Muara Beliti, yang diidentifikasi sangat cocok untuk budidaya tanaman padi sawah, palawija dan tanaman keras lainnya.
5. *Podsolik* merupakan jenis tanah terluas di Kabupaten Musi Rawas. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Muara Lakitan dan Kecamatan Jayaloka, baik untuk tanaman padi sawah, padi ladang dan tanaman karet.
6. *Asosiasi Podsolik* hanya terdapat di Kecamatan Muara Lakitan.

Kabupaten Musi Rawas dialiri oleh empat sungai utama yang utamanya dapat dilayari, yaitu Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi dan Sungai Semangus. Selain itu, masih terdapat sungai-sungai lainnya yang merupakan anak sungai-sungai utama tersebut seperti Sungai Keruh, Sungai Lintang dan Sungai Kungku yang merupakan anak dari Sungai Musi. Selain memiliki sungai-sungai

besar, di Kabupaten Musi Rawas terdapat danau yaitu Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta dan Danau Gegas di Kecamatan Suka Karya. Selain fungsinya sebagai penampung air, danau ini juga merupakan potensi wisata bagi Kabupaten Musi Rawas.

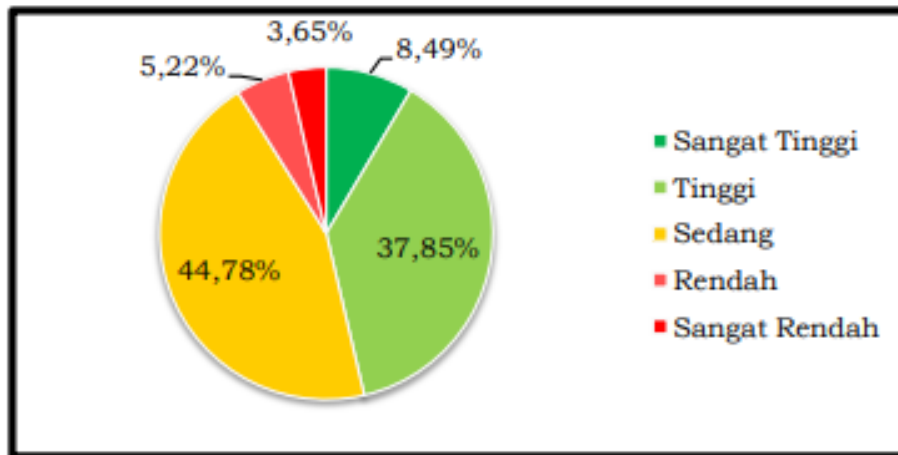
Kabupaten Musi Rawas yang sebagian besar merupakan kawasan hutan dengan beberapa jenis tumbuhan seperti jenis tanaman kayu merawan, sungkai, merbau, kolim, rotan dan jenis tumbuhan kayu lainnya.

Wilayah Kabupaten Musi Rawas berada di ketinggian 129 meter dpl, terdiri dari 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat. Keadaan alam wilayah Kabupaten Musi Rawas terdiri atas hutan potensial, sawah, ladang, kebun karet, cadas dan kebun lainnya. Di sebelah Barat terdapat dataran rendah yang sempit dan berbatasan dengan bukit barisan, dataran ini semakin ke Timur semakin luas.

Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (4) serat mineral seperti logam dan carbon. Sebagian besar wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai klasifikasi sedang untuk penyediaan serat. Luasnya mencapai 282.209,62 hektar atau 44,78% dari luas total wilayah. Klasifikasi tinggi mempunyai luas 238.531,31 hektar atau 37,85% yang berada di Kecamatan Muara Lakitan. Klasifikasi sangat tinggi di Musi Rawas mencapai 53.499,33 hektar atau 8,49% yang juga berada di Kecamatan Muara Lakitan seluas 29.545,56 hektar. Luasan untuk klasifikasi penyediaan serat rendah seluas 32.908,4 hektar atau 5,22% sedangkan yang sangat rendah seluas 23.020,31 hektar atau 3,65% dan berada di Kecamatan Tugumulyo dengan luas 4.526,24 hektar.

Grafik 2.2

Persentase Luas Lahan Berdasarkan Klasifikasi Jasa Ekosistem Penyediaan Serat Kabupaten Musi Rawas

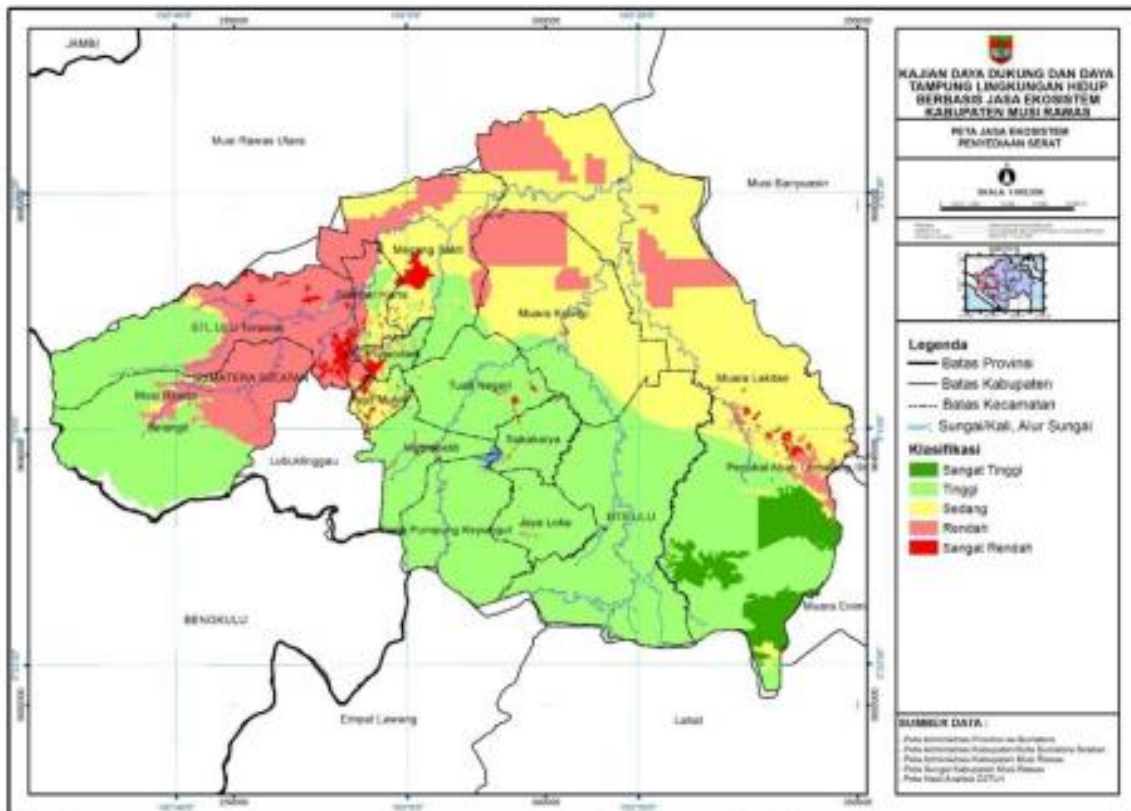


Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Penyediaan serat mempunyai potensi tinggi di penggunaan lahan dengan komoditas yang menghasilkan serat. Penggunaan lahan sawah, semak belukar dan hutan termasuk dalam klasifikasi tinggi. Padi di sawah merupakan bagian dari tanaman yang menghasilkan serat pangan, baik dari tumbuhannya maupun biji padi. Beberapa jenis pohon di hutan yang dimanfaatkan seratnya untuk bahan baku industri. Contoh kayu jarum (softwood) dan kayu daun (hardwood) untuk dimanfaatkan seratnya untuk pulp dan kertas. Fauna yang ada di hutan juga menjadi sumber serat hewan. Kawasan hutan perlu dijaga kelestariannya selain untuk menjaga fungsi lindung juga melindungi sumber serat. Pemanfaatan hutan untuk bahan baku industri harus dikendalikan agar tidak mengurangi fungsi lindung. Penggunaan lahan lainnya memiliki potensi rendah untuk penyediaan serat seperti permukiman atau tegalan /ladang.

Gambar 2.2

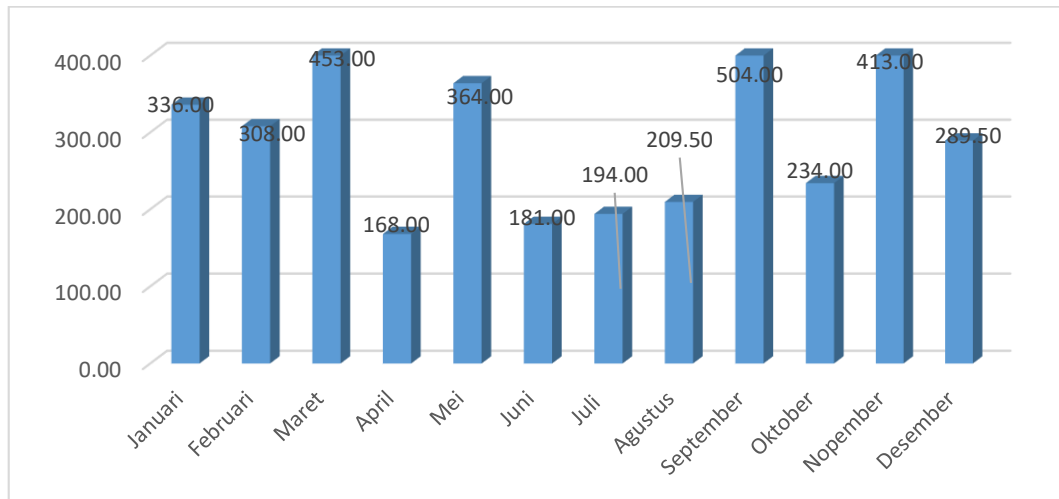
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Serat



Sumber : Kajian DDDTLH Kabupaten Musi Rawas, 2020

Kabupaten Musi Rawas memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata per bulan pada tahun 2021 sebesar 285,50 mm dengan rata-rata hari hujan 18 hari per bulannya. Curah hujan rata-rata tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Maret dan September.

Grafik 2.3
Curah Hujan Dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021



Sumber : Musi Rawas Dalam Angka 2022

Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh Badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun nonpemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain-lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Musi Rawas secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Penduduk Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 berjumlah 414.009 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 211.423 jiwa dan perempuan sebanyak 202.586 jiwa. (Sumber : Kemendagri, 2022).

Dengan luas wilayah sebesar 6.357,17 Km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Musi Rawas adalah 65,12 jiwa/km².

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

	KECAMATAN	Data Agregat Kependudukan		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Tugumulyo	24,604	24,138	48,742
2.	Muara Lakitan	21,935	20,544	42,479
3.	Muara Kelingi	23,935	21,976	45,011
4.	Jayaloka	8,527	8,218	16,745
5.	Muara Beliti	14,136	13,814	27,950
6.	STL. Ulu Terawas	17,063	16,366	33,429
7.	Selangit	10,015	9,523	19,538
8.	Megang Sakti	29,592	28,009	57,601
9.	Purwodadi	8,233	8,103	16,336
10.	BTS. Ulu	15,805	15,094	30,899
11.	Tiang Pumpung Kepungut	6,532	6,280	12,812
12.	Sumber Harta	9,777	9,424	19,201
13.	Tuah Negeri	14,279	13,567	27,846
14.	Suka Karya	7,890	7,530	15,420
TOTAL		211,423	202,586	414,009

(Sumber : Data Kemendagri 2022)

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas tertinggi terdapat di Kecamatan Megang Sakti dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Karakteristik wilayah Kabupaten Musi Rawas maka dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, kawasan budidaya di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:

1. Kawasan Hutan Produksi

Di Kabupaten Musi Rawas kawasan hutan produksi yang ada berupa: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas 2011-2031 pengelolaan kawasan hutan produksi diarahkan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP), sedang kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) akan dialihgunakan untuk pengembangan perkebunan (kelapa sawit dan karet) melalui program agropolitan.

a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Luas Kawasan HPT sebesar 7.385,84 Ha, sebagian besar berada di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dan menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah seperti *podsolik haplik* dan *kambisol eutrik*. Batuan permukaan sedang dan bahaya erosi sedang-tinggi. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan.

Pengelolaan kawasan hutan produksi terbatas ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi terbatas yang telah dirambah oleh masyarakat sekitar hutan perlu dikembangkan kebijakan pola pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan partisipasi masyarakat, melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), yakni model pengelolaan hutan partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek pembangunan perhutanan. Dengan demikian diharapkan kawasan hutan ini akan menjadi basis ekonomi rakyat sekitar hutan. Untuk itu penanaman tanaman sela yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, seperti karet dan tanaman buah-buahan (rambutan, durian, nangka, cempedak, dll) dapat

dikembangkan. Selain itu di kawasan ini juga cocok untuk pengembangan APIARI (Perlebahan) untuk menghasilkan madu.

Untuk meningkatkan pengayaan vegetasi dan tutupan lahan, maka pada areal-areal yang masih gundul atau bervegetasi jarang dapat dilakukan program reboisasi sebagai pemulihan dan pengkayaan keaneka-ragaman jenis dengan melakukan penanaman jenis-jenis kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti: Merbau (*Intsia bijuga*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), Mersawa (*Anoisoptera polyandra*), Nyatoh (*Palaquium gutta*), Terentang (*Camptosperma auriculata*), Medang (*Litsea firma*), Terap (*Artocarpus spp*), dan lain-lain. Diharapkan dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat ini, maka kegiatan perambahan hutan dapat dikendalikan.

b. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap di mana eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Luas kawasan ini sebesar 177.976,26 Ha, sebagian besar menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Musi Rawas, antara lain: Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Megang Sakti. Sebagian besar kawasan ini menempati lereng 16-40%, dengan jenis tanah berupa jenis tanah *podsolik haplik*, *kambisol eutrik*, dan *gleisol histik*. Batuan permukaan rendah-sedang dan bahaya erosi rendah-sedang. Sebagian kawasan ini telah dirambah masyarakat dan digunakan untuk budidaya karet rakyat secara tradisional dan kegiatan perladangan. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap ini diarahkan agar selain dapat memberikan fungsi ekologis serta menghasilkan kayu hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan. Untuk itu pada kawasan hutan produksi tetap dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan pihak swasta melalui program pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI). Selain itu kawasan hutan produksi tetap juga dapat dikelola bersama masyarakat (baik perorangan maupun kelompok/koperasi) melalui

program Hutan Tanaman Rakyat (HTR), sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Petani hutan dapat mengelola hutan produksi dengan luasan tertentu, dalam jangka waktu tertentu dengan cara melakukan penanaman sampai pemasaran, melalui HTR secara legal. Diharapkan pengelolaan hutan melalui partisipasi masyarakat ini dapat meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dan secara khusus kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan dengan menerapkan sistem silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan, yang dilakukan melalui peran aktif masyarakat di sekitar hutan.

c. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Hutan konversi ialah hutan produksi yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan pengembangan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industri, pemukiman dan lain-lain. Luas kawasan ini sebesar 7.385,84 Ha berada di Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan Peruntukan Pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura dan kawasan budidaya perkebunan.

a. Kawasan Budidaya Tanaman Pangan

Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan dan direncanakan pada lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Dalam hal ini yang dimaksud adalah sawah baik yang beririgasi maupun tidak. Kawasan budidaya tanaman pangan sebagian besar menyebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti dan Muara Lakitan.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Beririgasi*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya dapat diperoleh secara irigasi, baik yang secara teknis bisa

ditanami padi satu kali atau pun dua kali per tahun. Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah dengan pengairan secara irigasi teknis. Kawasan ini berupa dataran datar dengan jenis tanah aluvial yang memiliki status kesuburan tinggi dan dilengkapi infrastruktur irigasi teknis yang dibangun sejak pemerintahan Hindia Belanda.

Arahan pengelolaan kawasan ini ditujukan untuk mempertahankan fungsi kawasan sebagai lumbung padi dan tidak terjadi alih fungsi lahan, serta meningkatkan produktivitasnya melalui rehabilitasi sarana/jaringan irigasi dan jalan usaha tani, sehingga dapat mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dari IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam: Padi-Padi-Palawija/Hortikultura atau Padi-Padi-Padi.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai lahan sawah abadi untuk mempertahankan fungsi sawah irigasi, maka pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan melakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah irigasi melalui instrumen insentif dan disinsentif. Petani yang tetap mempertahankan sawahnya untuk budidaya padi mendapat insentif berupa keringan pajak dan subsidi sarana produksi pertanian. Sedangkan bagi yang melanggar/melakukan alih fungsi sawah menjadi non sawah wajib dikenakan pajak 10 kali lipat dan dikenakan denda penggantian biaya pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

- *Kawasan Pertanian Lahan Basah Tadah Hujan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan basah di mana pengairannya sepenuhnya tergantung pada hujan. Kawasan ini menempati areal dengan topografi datar, jenis tanah aluvial dan gleisol, dan status kesuburan tinggi. Kawasan ini menyebar secara spot-spot diberbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas direncanakan pada Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas dengan luas total 723 ha.

Arahan pengembangan kawasan ditujukan untuk mempertahankan agar tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian. Untuk itu perlu pengendalian ketat terhadap perijinan untuk peruntukan lain. Selain pengendalian terhadap alih fungsi lahan, pengembangan kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan input teknologi

irigasi pompanisasi baik air permukaan maupun tanah dangkal, guna meningkatkan indeks pertanaman IP-200 menjadi IP-300, dengan pola tanam padi-palawija-beras menjadi padi-padi-palawija/ hortikultura.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kawasan budidaya hortikultur diarahkan dan direncanakan pada lahan kering. Kawasan diperuntukan bagi tanaman semusim di dataran rendah. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah aluvial dan podsolik, dengan pola penggunaan lahan eksisting: ladang (singkong, jagung, dan padi ladang).

c. Kawasan Perkebunan

Kawasan Perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan terdapat hampir di setiap kecamatan menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.

Berikut perkebunan yang akan dikembangkan di Kabupaten Musi Rawas :

- *Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan*

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Di Kabupaten Musi Rawas kawasan pertanian tanaman tahunan diperuntukkan bagi kawasan pertanian tanaman tahunan kebun karet dan kelapa sawit. Kawasan ini menempati areal dengan lereng datar hingga agak berbukit (0-25%), jenis tanah organosol, gleisol, kambisol, dan podsolik, bahaya banjir sedang, erosi sedang, dan pola penggunaan lahan eksisting: tegalan dan semak belukar. Kawasan ini menyebar di berbagai wilayah kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Arah pemanfaatan kawasan ini ditujukan untuk menjaga agar kelestarian lahan dapat

dipertahankan dan produktivitas lahan dapat ditingkatkan melalui pola pemanfaatan Kebun Karet dan Kelapa Sawit.

- *Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN)*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet. Status penguasaan lahan berupa Hak Guna Usaha selama 30 tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali, kawasan ini menyebar di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Muara Kelingi dan Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan diarahkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sekitar kawasan melalui konsep pola PIR (pola Inti-Plasma) dimana perusahaan besar swasta nasional sebagai inti dan masyarakat petani sekitar sebagai plasma, dengan distribusi penguasaan lahan sampai 40:60.

- *Perkebunan Rakyat*

Pola pertanian ini merupakan sistem pertanian perkebunan monokultur dengan jenis komoditi kelapa sawit dan karet, dengan status penguasaan lahan berupa hak milik petani. Kawasan pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi karet diarahkan di Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu, Kecamatan Jayaloka, dan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut. Sedangkan untuk pengembangan perkebunan rakyat dengan komoditi kelapa sawit diarahkan untuk dibagian tengah dan utara wilayah kabupaten ini, yakni di Kecamatan Muara Lakitan. Pola pengelolaan perkebunan rakyat diarahkan melalui konsep pengembangan agropolitan, secara pola ruang kawasan agropolitan mencakup kawasan produksi dan kawasan pelayanan. Sedangkan secara struktur kawasan akan dikembangkan pusat pelayanan (kota tani), pusat pengumpul, dan desa-desa sebagai basis produksi. Untuk memudahkan pengumpulan komoditi petani dari kawasan produksi ke pusat kota tani, maka perlu dilengkapi infrastruktur jalan desa, jalan usaha tani, terminal agribisnis, dan lain-lain. Di Kota Tani akan dibangun fasilitas

pemasaran, jasa keuangan, dan pusat promosi. Kota Tani sebagai agrocenter akan dibangun di Muara Beliti. Guna mempertahankan status kesuburan tanah baik di kawasan perkebunan besar swasta nasional maupun di kawasan perkebunan rakyat (agropolitan), maka secara teknis pengolahan lahan perlu dilakukan penanaman tanaman penutup (*cover crop*) dari jenis kacang-kacangan, antara lain *Calopogonium centrocema* (Cc), *Calopogonium pubesciens* (Cp), dan *Calopogonium muconoides* (Cm).

- *Kawasan Kebun Campuran*

Di kawasan non hutan, dengan bentuk wilayah agak berbukit hingga agak bergunung (16-40%), diarahkan untuk pengembangan kebun campuran (talun kebun), yaitu suatu sistem pertanian hutan tradisional dimana dalam sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman yang diatur secara spasial dan temporal. Tanaman buah-buahan seperti: durian, rambutan, langsung, dan alpukat dibudidayakan bersama berbagai tanaman kayu-kayuan dan tanaman pangan lainnya. Kawasan ini terutama berada di Kecamatan Selangit.

Jenis tanaman kayu-kayuan yang dikembangkan merupakan kelompok kayu tidak keras dan cepat besar seperti sengon, kaliandra, turi, dan lain-lain. Jenis kayu ini memiliki nilai ekonomis sebagai sumber kayu bakar, papan cor, dan bahan peti kemas. Di bawah tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan dapat dikembangkan jenis tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan sayur-sayuran. Setelah umur 8-10 tahun jenis tanaman kayu-kayuan ditebang, sehingga tingkat naungan berkurang. Dengan demikian tanaman buah-buahan dan tanaman semusim (tanaman pangan) memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan penyinaran matahari secara cukup. Selama 5 (lima) tahun lahan dibersihkan dari jenis tanaman bawah dan tidak ditanami jenis kayu-kayuan, sehingga lapisan tanah atas (*top soil*) memperoleh penyinaran matahari dan diharapkan terjadi proses pematangan tanah. Namun selama lima tahun itu pula dapat dikembangkan tanaman semusim, seperti kacang tanah, jagung, kedelai,

dan lain-lain. Setelah lima tahun lahan dapat kembali jenis kayu-kayuan yang tidak keras sebagai sumber kayu bakar, papan cor, peti kemas, dan lain-lain. Demikian rotasi pertanaman ini terus dilakukan, sehingga sifat fisik dan kimia tanah tetap dapat dilestarikan.

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Rencana pengembangan peruntukan perikanan di Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar serta konservasi perikanan air tawar. Budidaya ikan air tawar terdiri dari budidaya perikanan sungai, kolam, dan sawah serta pembibitan ikan. Jenis ikan budidaya yang dikembangkan antara lain ikan Nila, Mas, Patin, dan Lele.

Alokasi ruang untuk pengembangan kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Musi Rawas disesuaikan sesuai potensi dari masing-masing kecamatan yang ada, diantaranya:

- a. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan di Sungai Musi, Sungai Lakitan dan Sungai Kelingi.
- b. Pengembangan kegiatan budidaya air deras di Kecamatan Tugumulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- c. Pengembangan kegiatan budidaya ikan air tenang di Kecamatan Tugu Mulyo, Kecamatan Muara Beliti, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Sumber Harta, Kecamatan Megang Sakti, Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Kecamatan Tuah Negeri, Kecamatan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Lakitan, dan Kecamatan Sukakarya.
- d. Kegiatan pengembangan budidaya perairan umum di Sungai Musi, Sungai Lakitan, Sungai Kelingi, Sungai Merung dan Danau Aur.
- e. Kawasan peruntukan konservasi perikanan air tawar terdapat di daerah reservat Bendungan Air Gegas.

4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup tambang mineral,

Migas dan pertambangan batu bara. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan mineral tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Sumber Harta, Tugumulyo, Purwodadi, Megang Sakti, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Pertambangan Minyak dan Gas tersebar di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas, Selangit, Tugumulyo, Purwodadi, Muara Beliti, Tiang Pumpung Kepungut, Jayaloka, Sukakarya, Bulang Tengah Suku Ulu, Tuah Negeri, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Sedangkan Pertambangan Batubara tersebar di Kecamatan Jayaloka, Bulang Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi dan Muara Lakitan.

Kawasan pertambangan di Kabupaten Musi Rawas meliputi kawasan pertambangan bijih besi, timah hitam, seng, emas, batuan, batubara, minyak bumi dan gas. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar-berombak (0-8%), jenis tanah podsolik, dan pola penggunaan lahan eksisting perkebunan rakyat dan hutan. Arahkan pemanfaatan ruang untuk pertambangan dibatasi pada areal yang telah memperoleh ijin eksploitasi dan kontrak karya. Sedangkan untuk pengembangan pada areal lainnya sangat dibatasi guna menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan penambangan yang sudah ada wajib memperhatikan asas kelestarian lingkungan.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Musi Rawas, diarahkan untuk industri pengelolaan potensi sumber daya alam untuk peningkatan nilai tambah dan produktifitas wilayah secara berkelanjutan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas, diharapkan mampu menjadi stimulus percepatan perkembangan ekonomi daerah kabupaten dan kesejahteraan masyarakat sekitar dan wilayah lebih luas, dengan tetap memperhatikan upaya mencegah pencemaran fungsi lingkungan. Sebaran pengembangan kawasan industri pengelolaan sumber daya alam diarahkan pada kawasan sekitar pusat-pusat kegiatan utama Kabupaten.

Berdasarkan uraian di atas rencana kawasan industri di Kabupaten Musi Rawas direncanakan di Desa Durian Remuk Kecamatan Muara Beliti dengan luas 50 hektar. Kawasan Industri ini akan dilengkapi dengan sarana transportasi yaitu pembangunan jalur rel kereta api dengan ruas Durian Remuk-Kota Padang, yang nantinya akan terhubung dengan jalur kereta api Lubuklinggau-Palembang.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya di mana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata. Peruntukan kawasan pariwisata di wilayah Kabupaten Musi Rawas berupa Kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Pengembangan pariwisata alam ini meliputi pemanfaatan didalam kawasan hutan dan perairan, pengembangan pariwisata buatan diarahkan pada kawasan Agropolitan Center dan pusat pemerintahan. Kawasan wisata alam, wisata budaya dan buatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas diarahkan di :

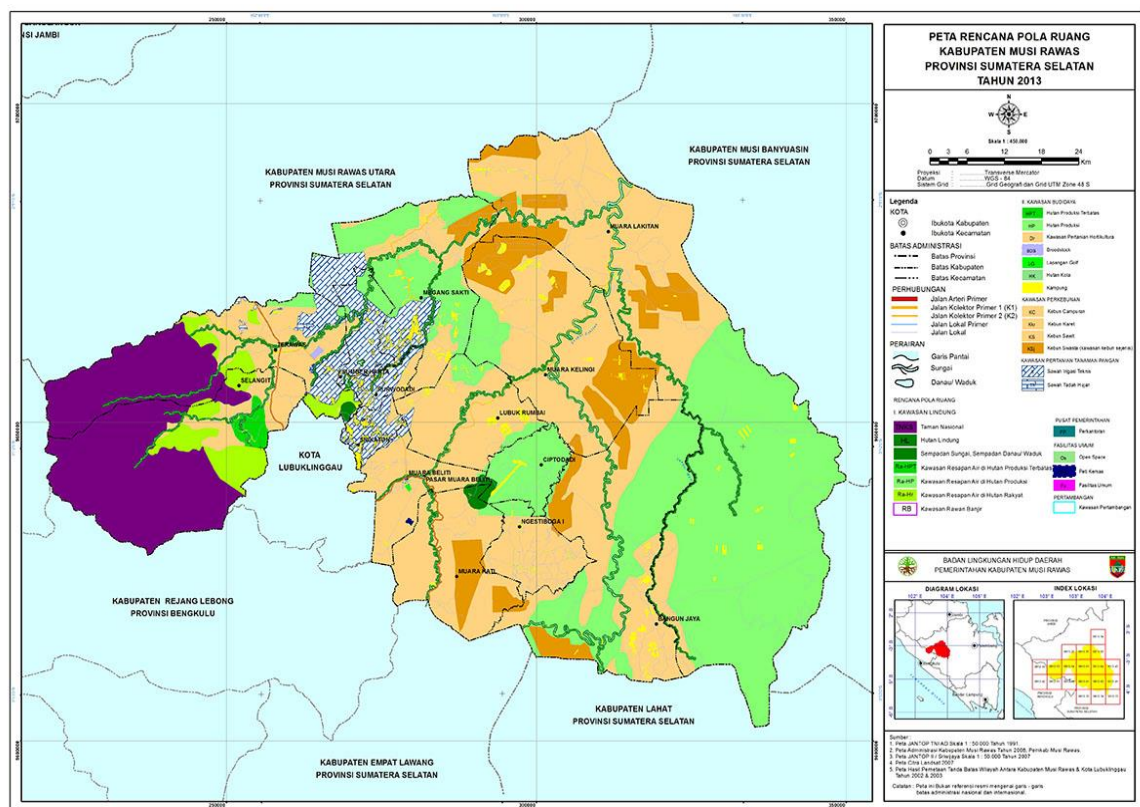
a. Kawasan Wisata Alam

- pariwisata Danau Aur di Kecamatan Sumber Harta.
- pariwisata Bukit Cogong di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Gua Napal licin di Kawasan konservasi TNKS.
- pariwisata Danau Gegas di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- pariwisata Danau Sukahati di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Bukit Botak Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Air Terjun Telun Sukaraya di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas.
- pariwisata Air Terjun Satan di Kecamatan Muara Beliti.
- pariwisata Air Terjun Sungai Dingin.

- pariwisata Air Mancur SP II.
 - pariwisata Kawasan Konservasi TNKS.
 - pariwisata Danau Tingkip di Kecamatan Purwodadi.
 - pariwisata Hutan Bulian di Kecamatan Muara Kelingi.
 - pariwisata Arung Jeram Sungai Rawas di kawasan konservasi TNKS.
- b. Kawasan Wisata Buatan
- Pariwisata Air di kawasan Agropolitan Center; dan
 - pariwisata Hutan Kota kawasan Pusat Pemerintahan.
 - Sri Mulyo Edupark (SEP)
 - Taman Beliti Anggon
7. Kawasan Peruntukan Permukiman
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan
- Menunjukkan areal kawasan permukiman perkotaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–berombak (0-8%), jenis tanah aluvial, dan pola penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar secara spot-spot, terutama di pusat-pusat ibukota kecamatan dan desa/kelurahan di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Rawas.
- Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan dan mengendalikan peruntukan lahan dengan tetap mempertahankan keberadaan fungsi resapan melalui ruang terbuka hijau (RTH). Untuk itu perlu pengaturan aktivitas pembangunan melalui penerapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangun (KLB). Guna mengoptimalkan fungsi layanan bagi penduduk kota serta pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya, maka perlu penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, serta dukungan prasarana jalan dan terminal antar kota baik berupa terminal penumpang maupun terminal barang yang menunjang pembangunan agropolitan.
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan
- Menunjukkan areal kawasan permukiman perdesaan, kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar–bergelombang (0-15%), jenis tanah podsolik, kambisol, aluvial, dan koluvial, dengan pola

penggunaan lahan eksisting permukiman dan pekarangan. Kawasan ini menyebar di tiap kecamatan di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Arahan pemanfaatan ruang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi layanan bagi masyarakat perdesaan dengan pengaturan tata ruang permukiman dan pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum perdesaan yang mendukung kegiatan pertanian/agropolitan.

Gambar 2.3
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Rawas



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendapatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat

dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

1. PDRB

PDRB salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kondisi rill ekonomi suatu daerah, indikator pertumbuhan PDRB ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam lingkup daerah dan mengenai geliat keberhasilan program pembangunan ekonomi makro daerah yang telah dicapai dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Salah satu tujuan pembangunan diantaranya adalah peningkatan Pendapatan Domestik Bruto penduduk Kabupaten Musi Rawas yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan memperhatikan realisasi PDRB dan distribusi PDRB atas dasar harga berlaku selama Tahun 2021-2022, seperti dalam tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2021-2022 (Milyar Rupiah)

Sektor PDRB	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,094.96	6,573.76
Pertambangan dan Penggalian	6,377.85	7,162.01
Industri Pengolahan	2,885.81	3,071.55
Pengadaan Listrik dan Gas	6.24	6.78
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.61	1.66
Konstruksi	1,153.04	1,211.411
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,901.68	2,188.09
Transportasi dan Pergudangan	89.99	100.84
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68.44	75.94
Informasi dan Komunikasi	79.58	86.63
Jasa Keuangan dan Asuransi	127.61	133.58
Real Estate	283.13	301.06
Jasa Perusahaan	4.28	4.54

Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	414.43	436.12
Jasa Pendidikan	555.73	597.83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160.33	169.94
Jasa lainnya	210.78	220.32
Produk Domestik Regional Bruto	20,415.49	22,342.11

(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2022)

Berdasarkan data pada tabel 2.3, nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas Kabupaten Musi Rawas meningkat dari Rp. 20,41 Trilyun pada tahun 2021 meningkat pada tahun 2022 menjadi Rp.22,34 Trilyun atau mengalami kenaikan sebesar 1,93 %.

Grafik 2.4
PDRB Dasar Harga Berlaku Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2023

Data struktur ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini:

Tabel 2.4
Struktur Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2020-2022 (%)

Lapangan Usaha	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.16	29.85	29.42
Pertambangan dan Penggalian	30.80	31.24	32.06
Industri Pengolahan	14.01	14.13	13,75
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.01	0.01
Konstruksi	5.75	5.65	5.42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.29	9.31	9.79
Transportasi dan Pergudangan	0.46	0.44	0.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.35	0.34	0.34
Informasi dan Komunikasi	0.38	0.39	0.39
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.64	0.63	0.60
Real Estate	1.43	1.39	1.35
Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.11	2.03	1.95
Jasa Pendidikan	2.73	2.72	2.68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.76	0.79	0.76
Jasa lainnya	1.06	1.03	0.99
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2023

PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

Tabel 2.5

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022 (%)

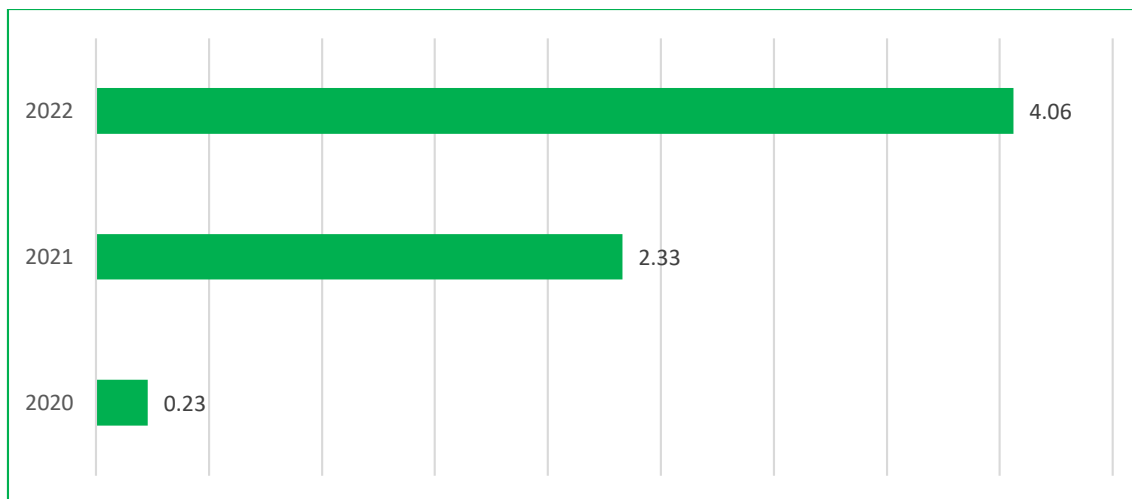
SEKTOR PDRB	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.96	3.76	4.36
Pertambangan dan Penggalian	-0.92	-0.65	1.67
Industri Pengolahan	0.75	4.39	6.13
Pengadaan Listrik dan Gas	13.1	6.56	6.96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.46	0.23	3.14
Konstruksi	-1.44	1.3	2.94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0.02	5.21	10.34
Transportasi dan Pergudangan	-4.57	1.92	7.57
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.56	2.13	9.11
Informasi dan Komunikasi	15.1	8.38	8.74
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.46	1.57	1.93
Real Estate	1.05	3.04	4.96
Jasa Perusahaan	7.91	7.98	3.84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.99	1.47	3.56
Jasa Pendidikan	0.35	4.69	4.71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.48	8.12	4.33
Jasa lainnya	1.37	1.65	2.04
Produk Domestik Regional Bruto	0.23	2.33	4.06

Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas, 2023

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2022 sebesar 4.06 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1.37% persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 2.33%.

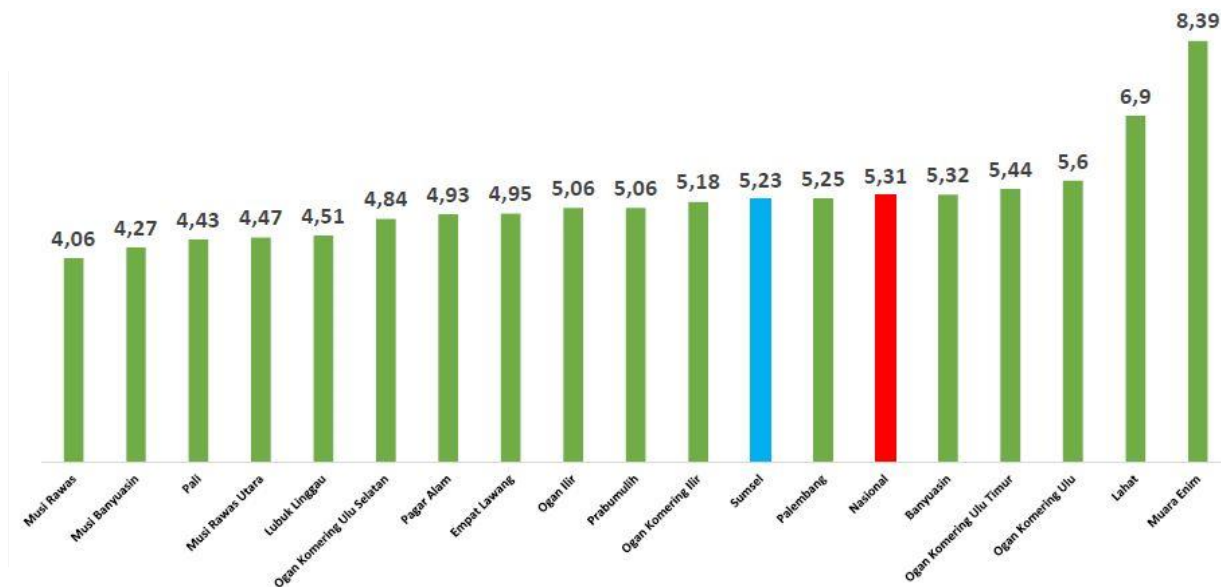
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022



Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 sebesar 4.06. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

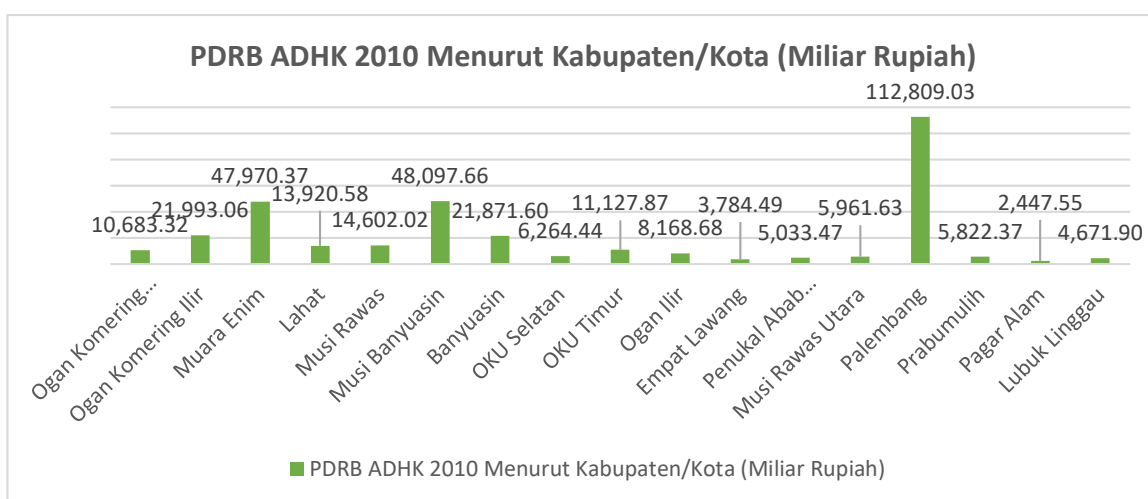
Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022



Sumber : BPS, 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mencapai sebesar 14.602.02. Apabila dibandingkan dengan wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, pertumbuhan PDRB ADHK cukup baik dengan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera selatan. Dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: BPS Provinsi Sumsel Tahun 2022

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk dilihat dari nilai PDRB. Besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada Pengeluaran Makanan dan Non Makanan. Nilai PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 sebesar Rp. 51.201,04 mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp. 55.484,38

Tabel 2.6
Capaian PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Indikator	Realisasi	
	2021	2022
PDRB perkapita ADHB	51.201,04	55.484,38

Sumber: BPS Kab. Musi Rawas 2023

2. Inflasi

Indikator yang digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi adalah inflasi. Inflasi sektoral yang dilihat dalam publikasi ini digunakan untuk melihat besaran kenaikan harga barang dan jasa di tingkat produsen.

Tabel 2.7

Laju Inflasi Implisit (Tingkat Produsen) %
Kabupaten Musi Rawas 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Kab. Musi Rawas	2,42	2,10	1,97	1,63	5,83
Provinsi Sumsel	2,74	2,96	1,55	1,82	5,95
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,53	5,51

Sumber: BPS Nasional dan BPS Provinsi Sumsel

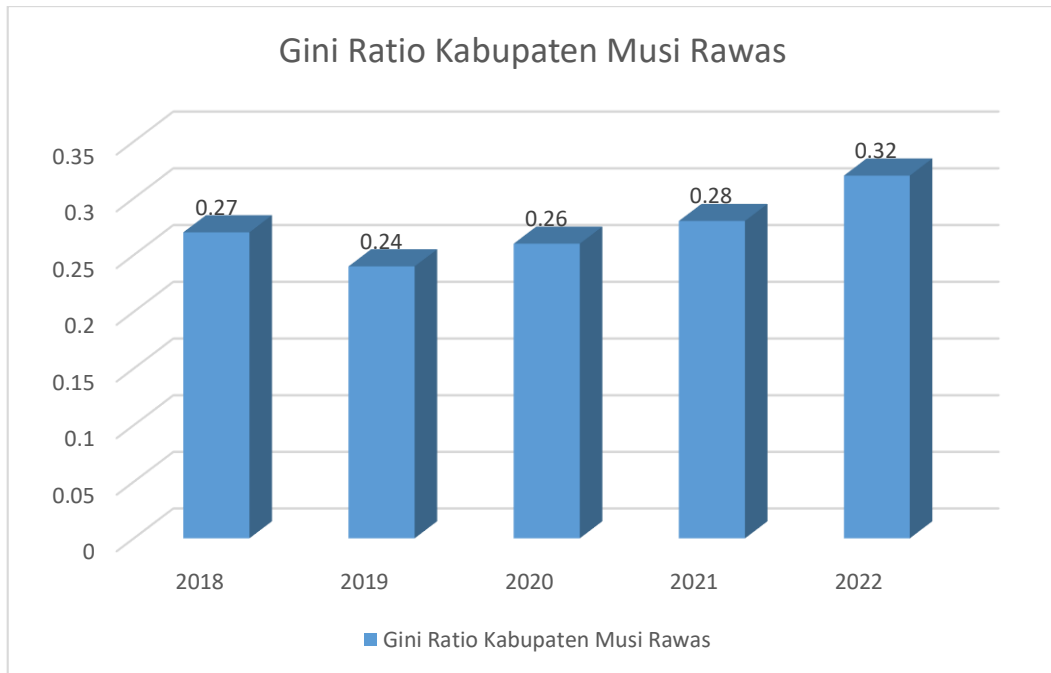
Angka Inflasi masih dianggap wajar apabila masih dibawah satu digit pada kisaran 0 dan dibawah 10%, apabila dibawah 0% atau deflasi dan diatas 10% sangat membahayakan bagi perekonomian terutama dalam mengurangi angka kemiskinan.

3. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Trend selama 5 (lima) tahun rata-rata Gini Rasio Musi Rawas menunjukkan kesenjangan semakin berkurang. Salah satu penyebab angka ketimpangan relatif lebih rendah tidak lepas dari perekonomian Kabupaten Musi Rawas masih bertumpu pada sektor Primer Pertanian yang mempunyai metode produksi yang padat karya, dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai buruh tani/perkebunan, buruh bangunan sehingga pembagian pendapatan relatif lebih merata atau disparitas pendapatan antar penduduk relatif kecil, bila dibandingkan sektor modern yang padat modal dalam produksi. Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik 2.8.

Grafik 2.8

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022

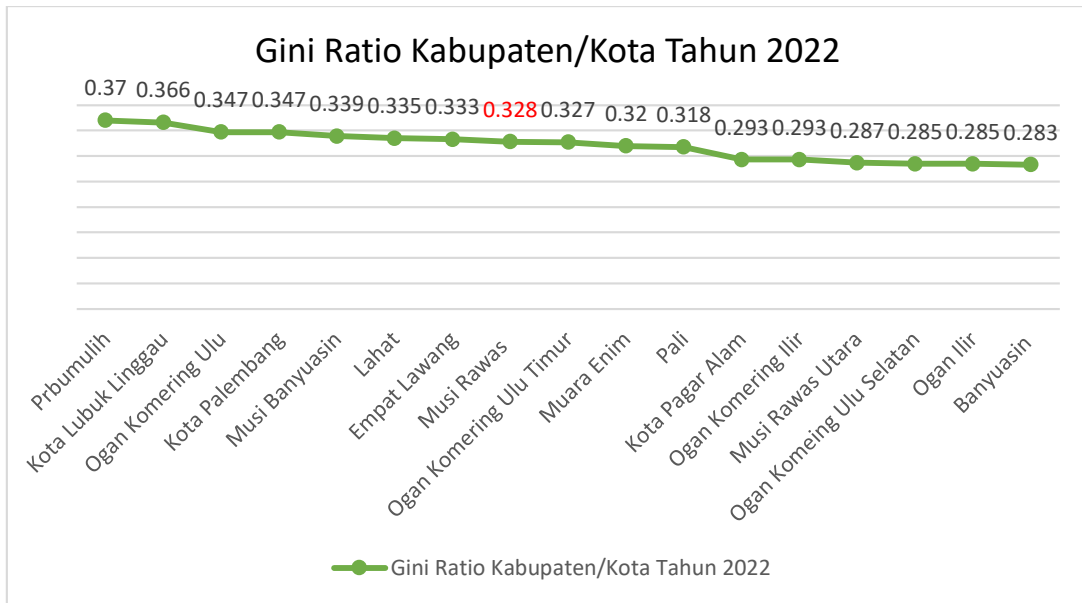


Sumber : BPS Sumsel Tahun 2023

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan termasuk Kabupaten yang memiliki Gini Ratio rendah. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemakmuran Kabupaten Musi Rawas lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan. Gini Ratio Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Grafik. 2.9

Grafik 2.9

Gini Ratio Kabupaten/Kota Sumatera Selatan Tahun 2022

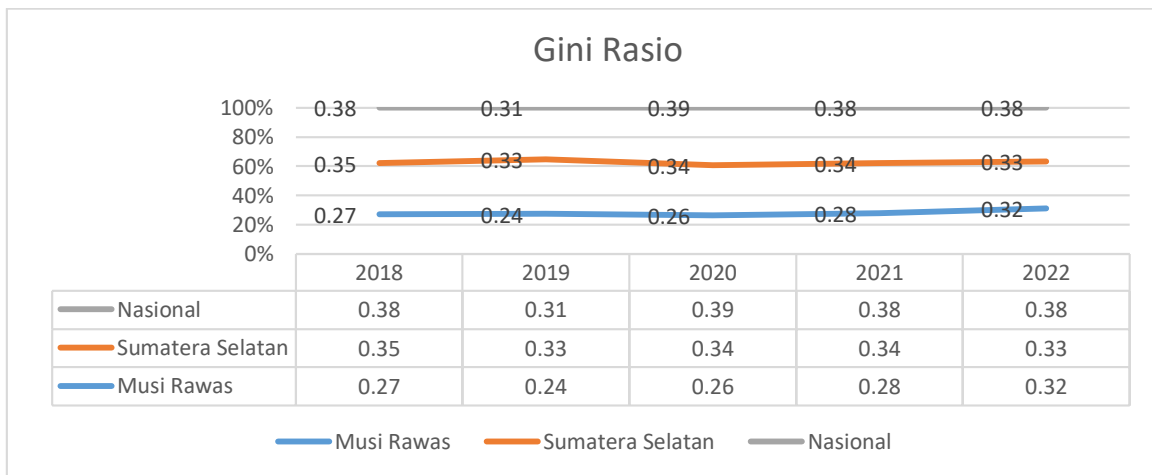


Sumber : BPS Sumsel Tahun 2023

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas apabila dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas berada di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Dapat dilihat pada grafik 2.10

Grafik 2.10

Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dan Nasional Tahun 2018-2022



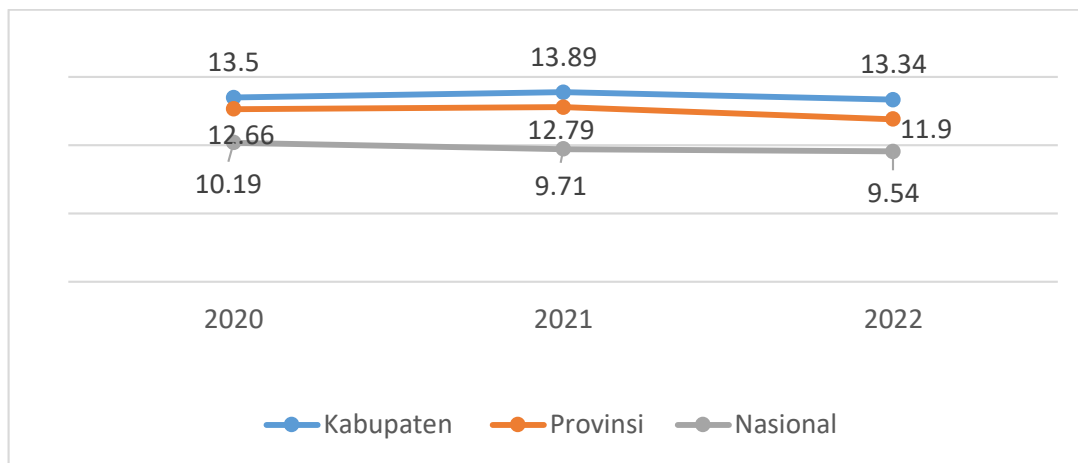
Sumber : BPS Sumsel Tahun 2022

Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Pada Tahun 2022 gini rasio Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,328 yang berarti naik 0,04 jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional gini rasio kabupaten musu rawas pada tahun 2022 masih berada dibawah capaian Provinsi sebesar 0,33 dan Nasional sebesar 0,38.

4. Kemiskinan

Grafik 2.11

Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 – 2022

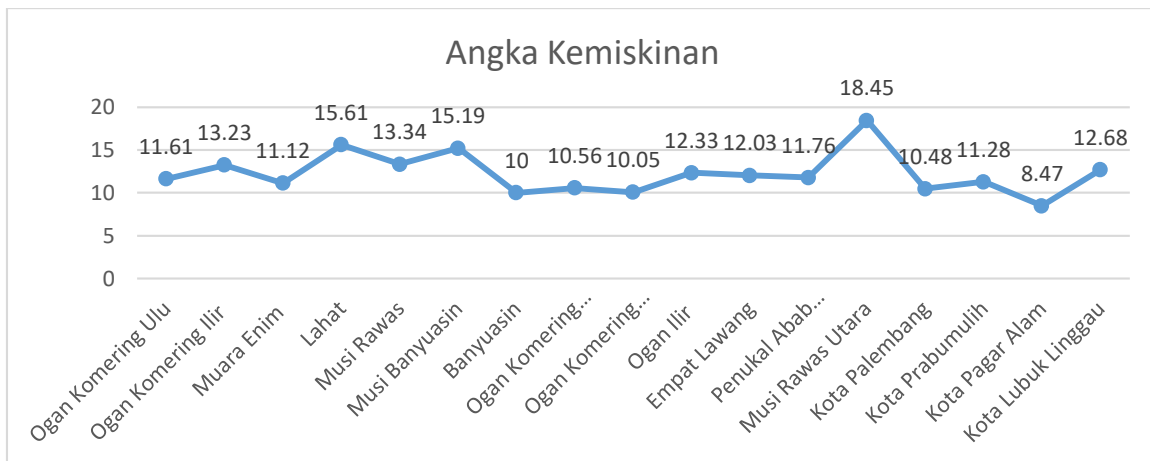


Sumber : BPS Tahun 2022.

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 2.12 diatas, pada tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 13,50% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 13,89%. Pada tahun 2022, kemiskinan kabupaten Musi Rawas mencapai 13,34 % yang berarti mengalami penurunan sebesar 0,55%.

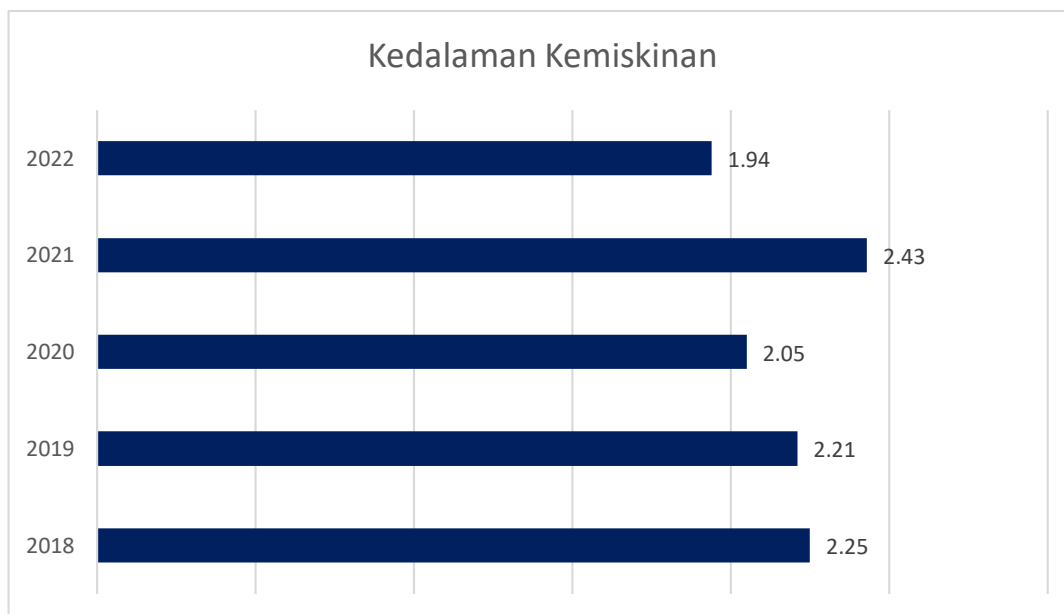
Grafik 2.12
Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS Nasional Tahun 2022.

Pada grafik, Untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan ke empat tertinggi di Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Grafik 2.13
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2018-2022

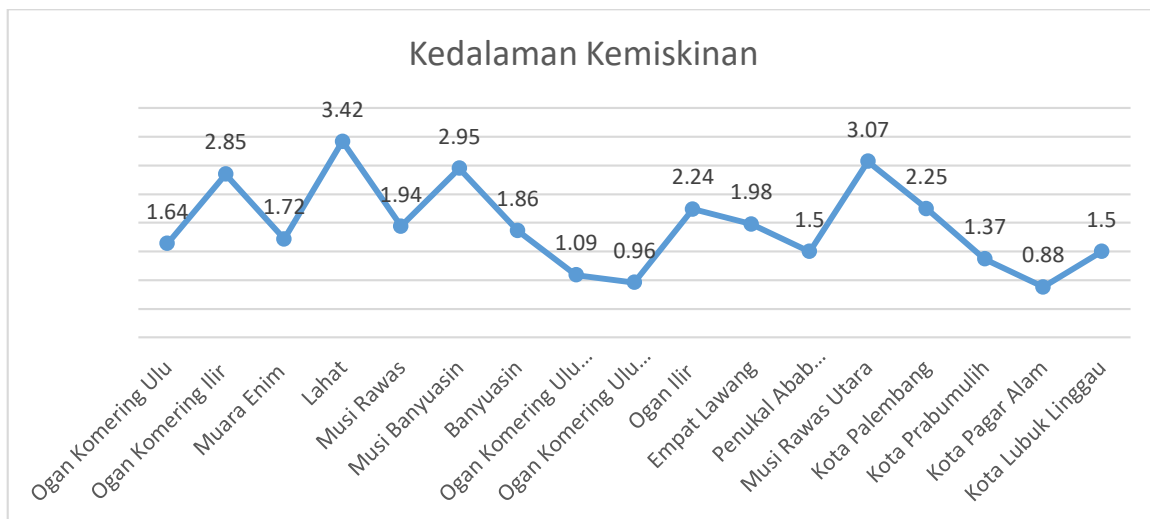


Sumber: BPS Nasional, BPS Provinsi 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berfluktuatif pada tahun Pada tahun 2018 kedalaman kemiskinan sebesar 2,25% mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 2,05% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2,43% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 1,94%.

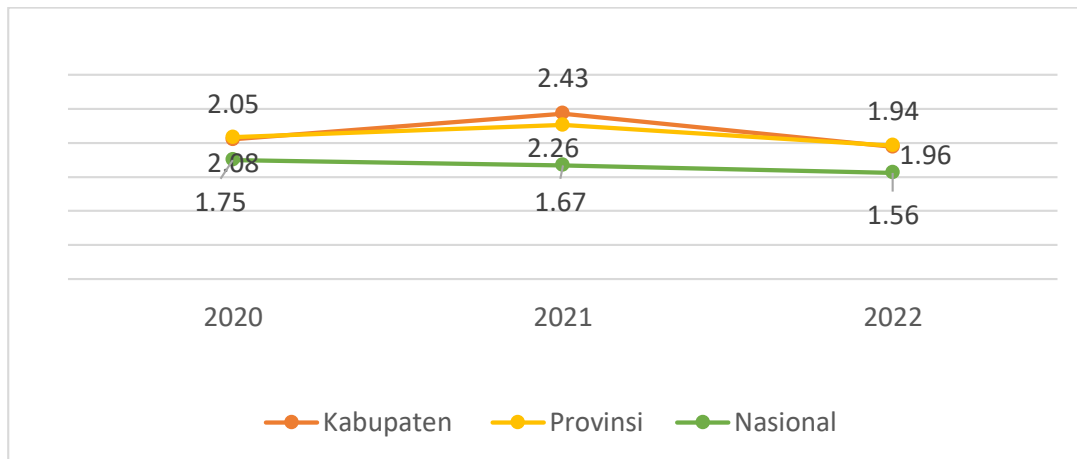
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022, jika dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitar Sumatera Selatan berada di posisi tengah atau kedalaman kemiskinan tidak terlalu tinggi dan rendah. Untuk melihat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.14
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten/Kota Sumatera Selatan
Tahun 2022

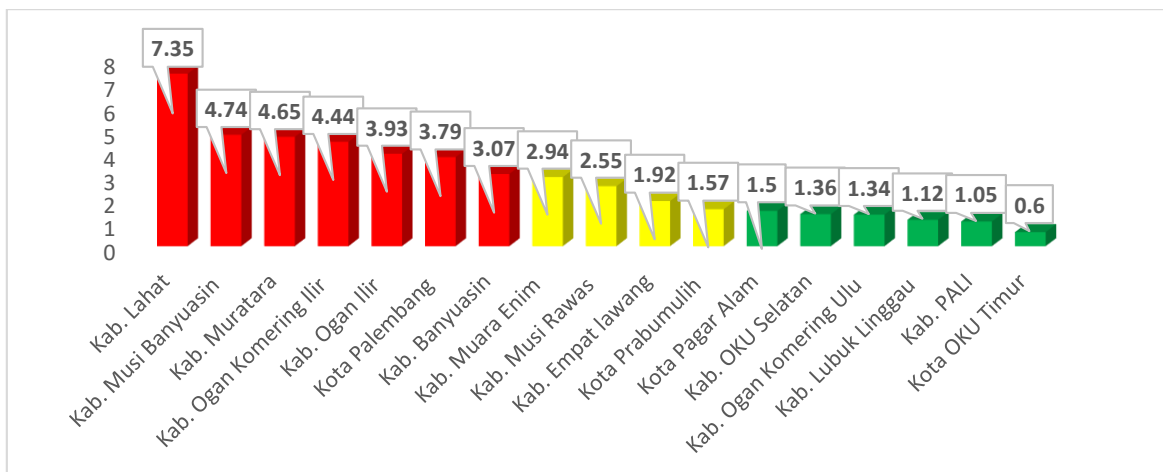


Bila disandingkan dengan capaian provinsi dan nasional, kedalaman kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih lebih tinggi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun
2020-2022



Grafik 2.16
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten/Kota Tahun 2022



Keterangan	Musi Rawas	Sumatera Selatan	Indonesia
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (persen)	2,55	3,19	2,04
Tingkat Kemiskinan (persen)	13,34	11,95	9,54
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	55,80	1054,99	26 363, 27

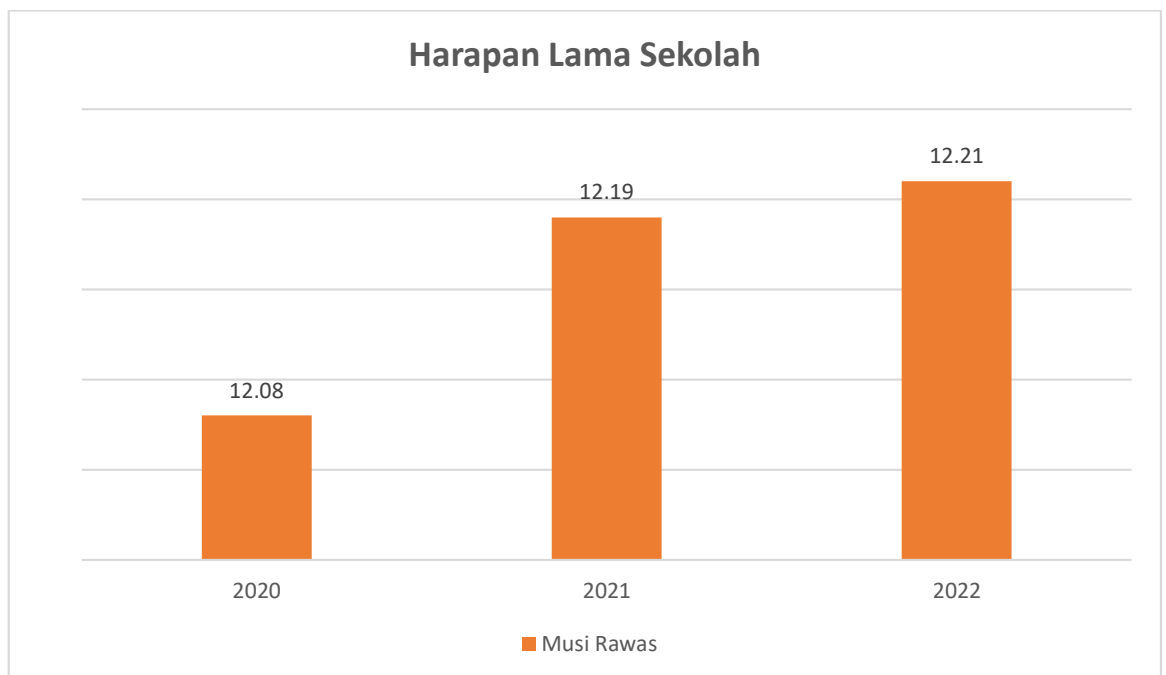
Sumber: BPS 2023

Musi Rawas memiliki memiliki tingkat miskin ekstrem sebesar 2,55 persen dengan besaran jumlah. Tingkat kemiskinan ekstrem di Musi Rawas tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 13,34 persen atau 55,80 ribu jiwa. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di provinsi Sumatera Selatan sebesar 3,19 persen. Tingkat kemiskinan ekstrem di Sumatera Selatan tersebut merupakan bagian dari penduduk miskin sebesar 11,95 persen atau 1054,99 ribu jiwa.

B. Fokus Kesejahteraan Sosial.

1. Harapan Lama Sekolah

Grafik 2.17
Angka Harapan Lama Sekolah 2020-2022



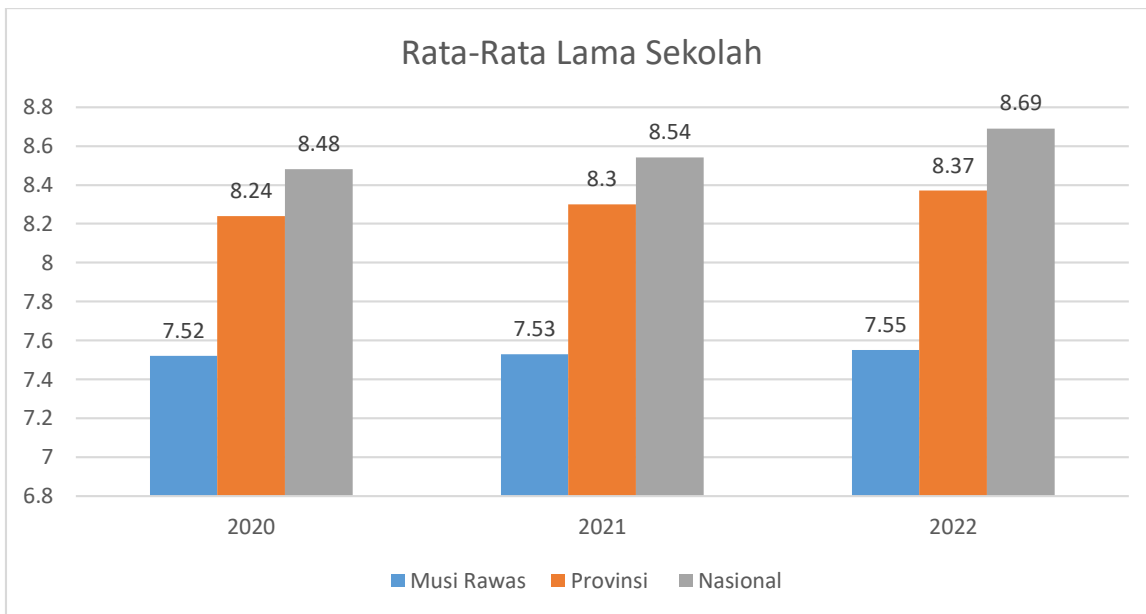
Sumber :BPS Musi Rawas 2023

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan tahun belajar penduduk usia 15 Tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun mengulang).

Grafik 2.18

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022

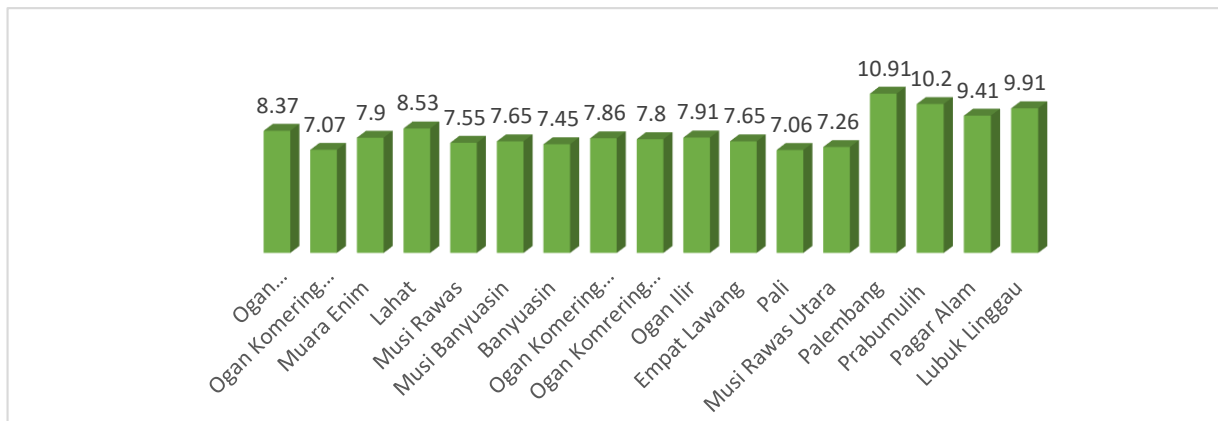


Sumber : BPS 2022 , BPS Provinsi dan BPS Kab. Mura

Dari data grafik diatas maka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2022 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Musi Rawas 7,55 dan masih berada dibawah dari Rata-rata Lama Sekolah Provinsi sebesar 8,37 dan Nasional sebesar 8,69.

Grafik 2.19

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022.



C. Fokus Seni Budaya

1. Budaya

Ragam budaya di Musi Rawas, secara umum terbagi menjadi dua yaitu benda cagar budaya dan benda cagar budaya tak benda. Selain itu terdapat juga cerita rakyat, kuliner dan bahasa lokal. Sebagaimana daerah lain di provinsi Sumatera Selatan, kebudayaan Kabupaten Musi Rawas dipengaruhi juga oleh budaya melayu, agama islam, agama hindu dan yang tak bisa lepas adalah keberadaan eksistensi Kerajaan Sriwijaya.

2. Seni

Kabupaten Musi Rawas dikenal memiliki moto darah yang disebut “*Lan Serasan Sekantenan*” secara harfiah diartikan Lan berasal dari bahasa sindang dan musi yang berarti kerja atau usaha sedangkan Serasan berarti mufakat. Sekantenan berasal dari bahasa rawas yang berarti berteman akrab atau kelompok. Kesimpulan dari “*Lan Serasan Sekantenan*’ adalah karya mufakat yang kompak yang menunjukkan adanya kerja sama dalam mensukseskan setiap kegiatan pembangunan di daerah. Kabupaten Musi Rawas memiliki berbagai jenis tarian dan lagu daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Fokus Layanan Urusan Wajib

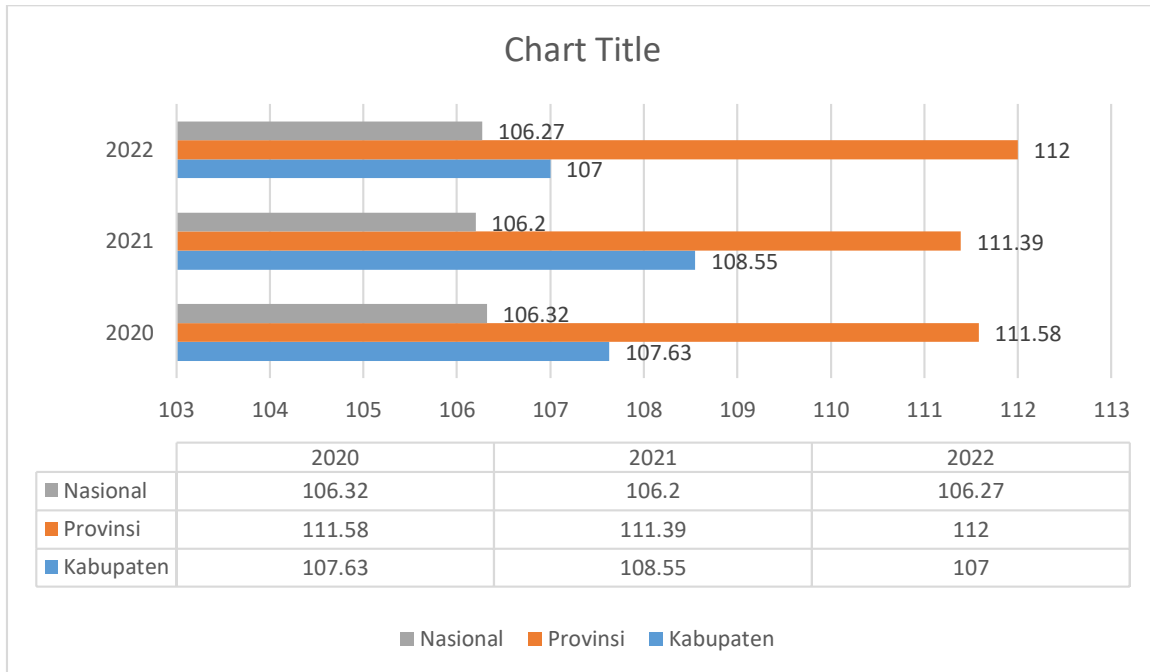
1. Pendidikan

Dengan adanya penerapan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 maka pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan regulasi tersebut, kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator antara lain: Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Grafik 2.20
Grafik APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas, Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2022

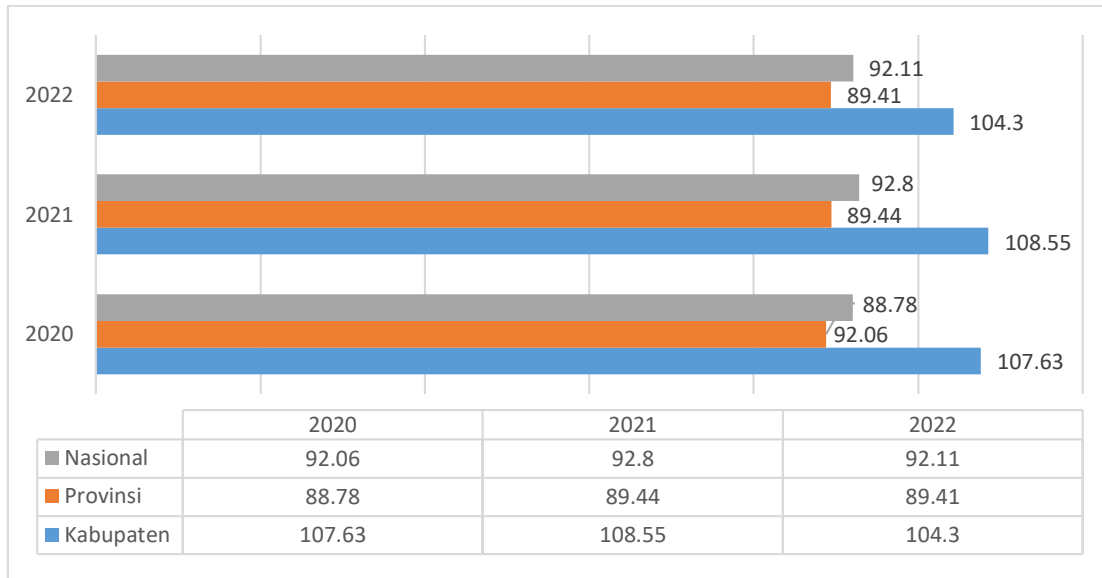


Sumber : BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SD/MI Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 lebih kecil dibandingkan dengan APK Provinsi dan lebih besar dibanding dengan APK Nasional.

Grafik 2.21

Grafik APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Musi Rawas 2023, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

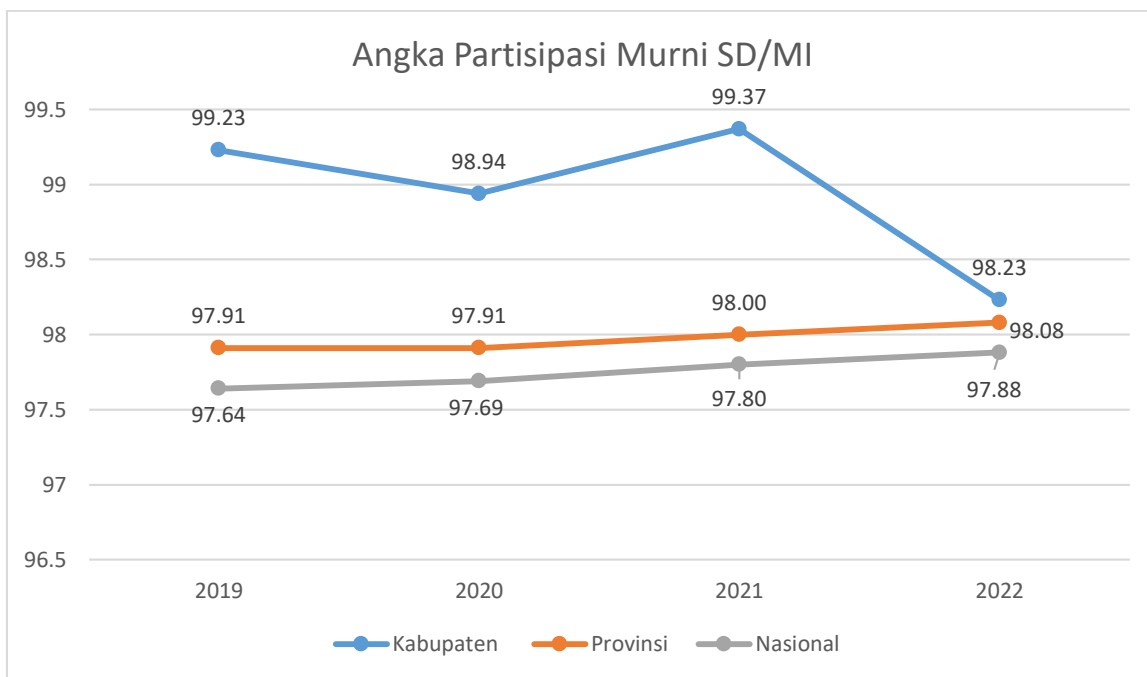
Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APK SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berfluktuatif.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase pada jumlah anak pada usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Grafik 2.22

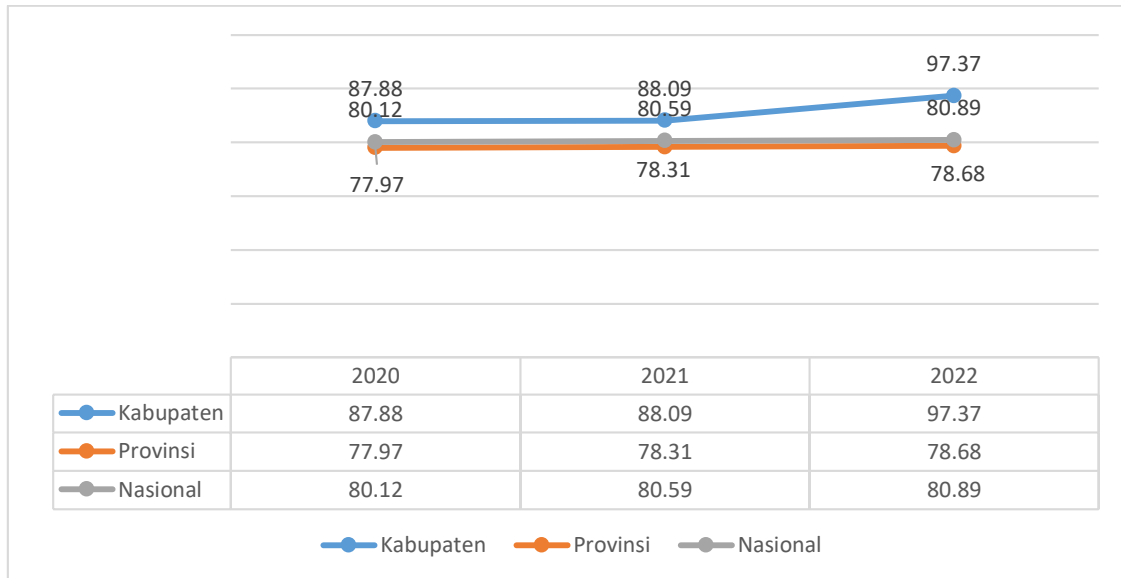
Grafik APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2021 APM SD/MI Kabupaten Musi Rawas mencapai 98,23 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SD/MI Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.23
Grafik APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional
Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Musi Rawas 2021, BPS Musi Rawas, BPS Provinsi dan BPS Nasional

Dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa nilai APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mengalami kenaikan dari tahun 2020-2022. Pada tahun 2022 APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mencapai 897,37 persen atau lebih besar jika dibandingkan APM SMP/MTS Provinsi dan Nasional.

APM SMP/MTS Kabupaten Musi Rawas mendekati nilai 100 dan termasuk dalam katagori baik.

2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Capaian Kinerja kesehatan diukur dengan IK: Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu /100.000 KH dan penurunan stunting. Capaian kinerja kesehatan dapat dilihat dalam berikut.

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022

No	Indikator	2020	2021	2022
1.	Angka kematian bayi/1000 KH	3,1	6,17	3,1
2.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,14	68,26	68,62
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000/pddk)	94,01	59,95	70,39
4.	Penurunan Stunting	1.857	503	1.062

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Pada tabel dapat dilihat bahwa adanya fluktuasi pada Angka Kematian Bayi dimana pada tahun 2020 sebesar 3,1 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,17 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 3,1. Sedangkan Angka Kematian Ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) juga mengalami Fluktuasi pada tahun 2020 sebesar 94,01 mengalami penurunan menjadi 59,95 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 70,39.

Untuk Angka Harapan Hidup (AHH) mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 68,14 sampai dengan tahun 2022 sebesar 68,62. Peningkatan tersebut didukung dengan peningkatan akses Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Primer (UKP) serta peningkatan preventif dan promotif.

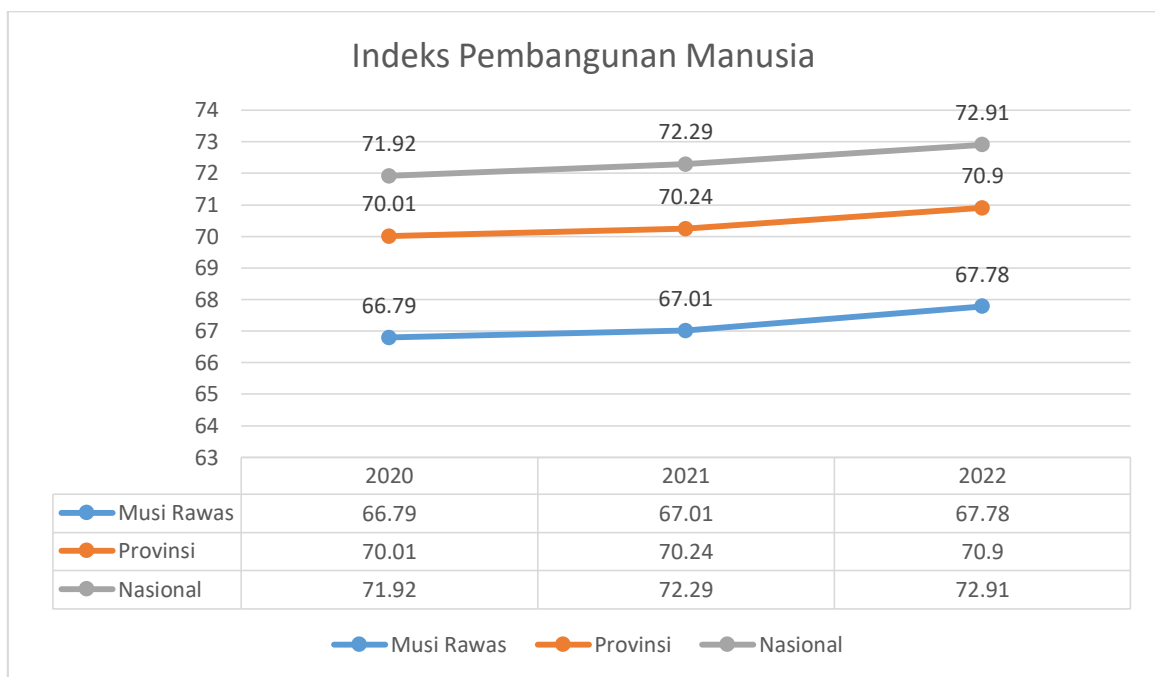
Pertumbuhan anak-anak dengan tinggi badan kurang (pendek) dan sangat kurang (sangat pendek) yang dapat dikategorikan stunting. Pada tahun 2020 sampai tahun 2022 berfluktuatif. Pada tahun 2020, jumlah anak stunting sebesar 1.857 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 503 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anak yang stunting meningkat kembali menjadi 1.062 jiwa. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan melalui dinas Kesehatan dan crosscutting dengan beberapa Perangkat Daerah dan stakeholders terkait, upaya

penuntasan stunting dapat dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu dengan program perbaikan gizi masyarakat.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 66,79 dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya dengan capaian 67,01 pada tahun 2021 dan 67,78 pada tahun 2022.

Grafik 2. 24
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumsel 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur adalah pembangunan jalan yang sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Jalan di wilayah

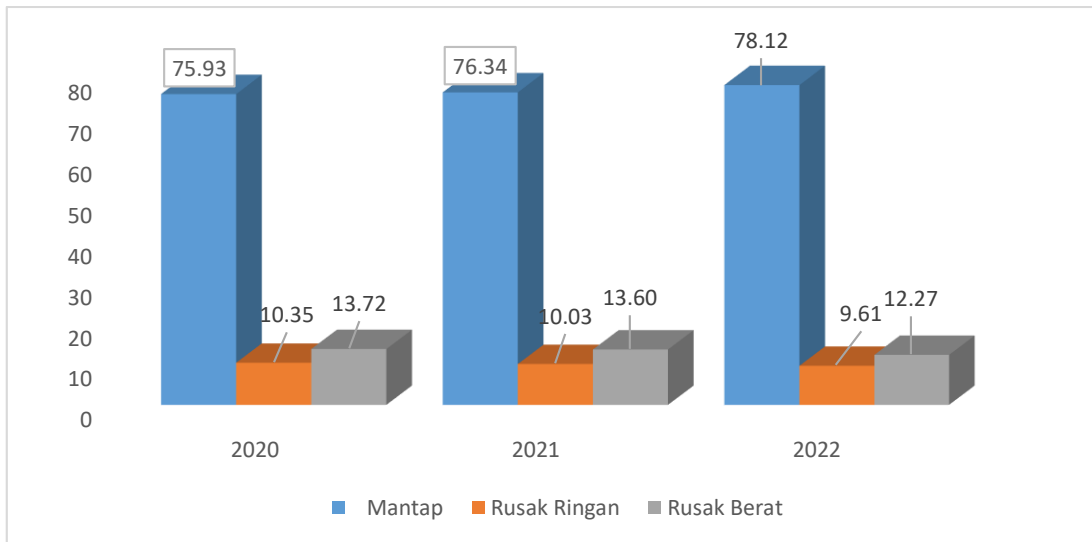
Kabupaten Musi Rawas berdasarkan statusnya dikategorikan dalam Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Desa.

Berdasarkan Keputusan Meteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruang Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsi Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) bahwa ruas Jalan Nasional di wilayah Kabupaten Musi Rawas yaitu N12 (ruas Maur-Terawas 36,20 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kab. Muratara-Terawas 9,3 Km), N13 (ruas Terawas-Batas Kota Lubuklinggau 24 Km), N15 (ruas Simpang Periuk-Muara Beliti 13,5 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : batas Kota Lubuklinggau-Muara Beliti 9,88 Km), N16 (ruas Muara Beliti-Batas Kab. Musi Rawas 27,2 Km), dan N35 (ruas Batas Kab. Muba-Muara Beliti 78,26 Km). Jadi panjang Jalan Nasional yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 151,96 Km. Sedangkan ruas Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten Musi Rawas ada 2 ruas yaitu P82 (ruas Simpang Periuk-Tugumulyo-Terawas 38 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas 33,28 Km) dan P83 (ruas Terawas-Taba Tinggi-Maur 56,25 Km, yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas : Terawas-Batas Kab. Muratara 17 Km). Maka panjang Jalan Provinsi yang masuk di wilayah Kabupaten Musi Rawas sepanjang 50,28 Km. Kemudian Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km.

Jalan di Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 151,96 Km, Jalan Provinsi 94,25 Km, Jalan Kabupaten sepanjang 1.420,49 Km. Dengan rincian Jalan Aspal sepanjang 262,733 Km, Koral sepanjang 208,358 Km, Jalan Rigid Beton sepanjang 54,664 Km, Pembukaan Jalan 29,29 Km, Jalan desa 1.753,49 Km dan Jalan Non Status sepanjang 63 Km. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah Kabupaten Musi Rawas 0,0022 Km/Ha. Sedangkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.25

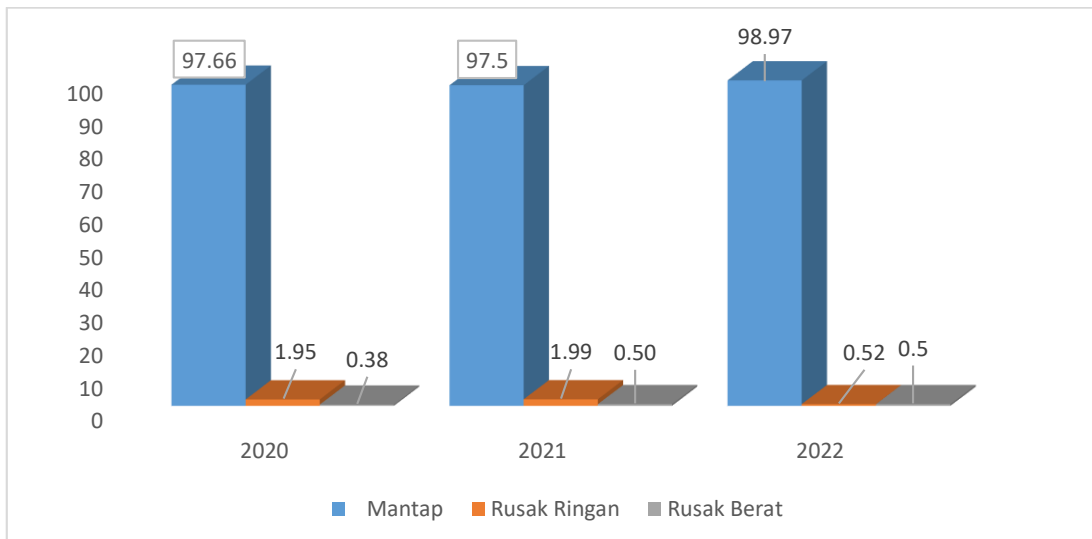
Kondisi Jalan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Grafik 2.26

Kondisi Jembatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022



Sumber : Kompilasi Data BPS Kabupaten Musi Rawas dan Dinas PU Bina Marga (Data diolah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, ada 2 (dua) DI Pusat (DI Kelingi-Tugumulyo 8.841 Ha dan DI Air Lakitan 9.500 Ha), 4 (empat) DI Provinsi (DI Air Deras I 1.461 Ha, DI Gegas 2.300

Ha, DI Air Satan 1.175 Ha dan DI Megang Tikip 1.077 Ha) dan 43 (empat puluh tiga) DI Kabupaten Musi Rawas (31 DI di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan 12 DI di wilayah Kab. Muratara).

Tabel 2.9
Daerah Irigasi Pusat

NO	DAERAH IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Kelingi-Tugumulyo	8.841
2.	DI Air Lakitan	9.500

Tabel 2.10
Daerah Irigasi Provinsi

NO	DAERAH IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras I	1.461
2.	DI Gegas	2.300
3.	DI Air Satan	1.175
4.	DI Megang Tikip	1.077

Tabel 2.11
Daerah irigasi kabupten Musi Rawas

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKSI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
1.	DI Air Deras II	Sumber Harta		928
	DI Air Deras II (Aur)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	542
	DI Air Deras II (Moyan)	Sumber Harta	Irigasi Teknis	386
2.	DI Megang Tikip	Purwodadi (Sumber Sari dan Wonosari)	Irigasi Teknis	912
3.	DI Air Tupak	Tugumulyo dan Purwodadi	irigasi Semi Teknis	778
4.	DI Ketuan Kecil/Bumi Agung	Muara Beliti (Bumi Agung)	irigasi Semi Teknis	593
5.	DI Pelita Jaya	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	400
6.	DI Air Kelingi SP II	Muara Kelingi	irigasi Semi Teknis	400
7.	DI Jajaran Baru	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	360

NO	DAERAH IRIGASI	LOKASI	KLASIFIKSI JARINGAN IRIGASI	TOTAL LUAS AREAL (HA)
8.	DI Sri Kemuning	STL Ulu Terawas (Srimulyo)	irigasi Semi Teknis	360
9.	DI Air Nangka	Muara Lakitan (Semeteh)	irigasi Semi Teknis	360
10.	DI Sukamana	STL Ulu Terawas (Sukamana dan Kosgoro)	irigasi Semi Teknis	314
11.	DI Air Cekar SP III	BTS Ulu (Cekar SP III)	irigasi Semi Teknis	300
12.	DI Sukakarya	STL Ulu Terawas (Sukakarya)	irigasi Semi Teknis	250
13.	DI Sawah Pangeran	Mura Lakitan (sawah Pangeran)	irigasi Semi Teknis	250
14.	DI Sukaraya	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	246
15.	DI Sukarame	Sumber Harta (Sukarame)	irigasi Semi Teknis	200
16.	DI Dangku	Megang Sakti (dangku dan Sendang Sari)	irigasi Semi Teknis	200
17.	DI Air Kambil	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
18.	DI Pelita Jaya I	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
19.	DI Setia Marga	Mura Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
20.	DI Kosgoro	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	160
21.	DI Paduraksa	STL Ulu Terawas (Paduraksa)	irigasi Semi Teknis	150
22.	DI Sidomulyo	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	100
23.	DI Marga Baru	Muara Lakitan (Marga Baru)	irigasi Semi Teknis	100
24.	DI BPD Pendo	Purwodadi	Irigasi Teknis	361
25.	DI Kasang Tinggi	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	300
26.	DI Pelita Jaya II	Muara Lakitan (Pelita Jaya)	irigasi Semi Teknis	200
27.	DI Sungai Pinang	Muara Lakitan	irigasi Semi Teknis	200
28.	DI Paduraksa II	STL Ulu Terawas	irigasi Semi Teknis	110
29.	DI Megang Sakti V	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	200
30.	DI Wonosari	Megang Sakti	irigasi Semi Teknis	50
31.	DI Q2 Wonorejo	Tugumulyo	irigasi Semi Teknis	30
TOTAL				9412

Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan

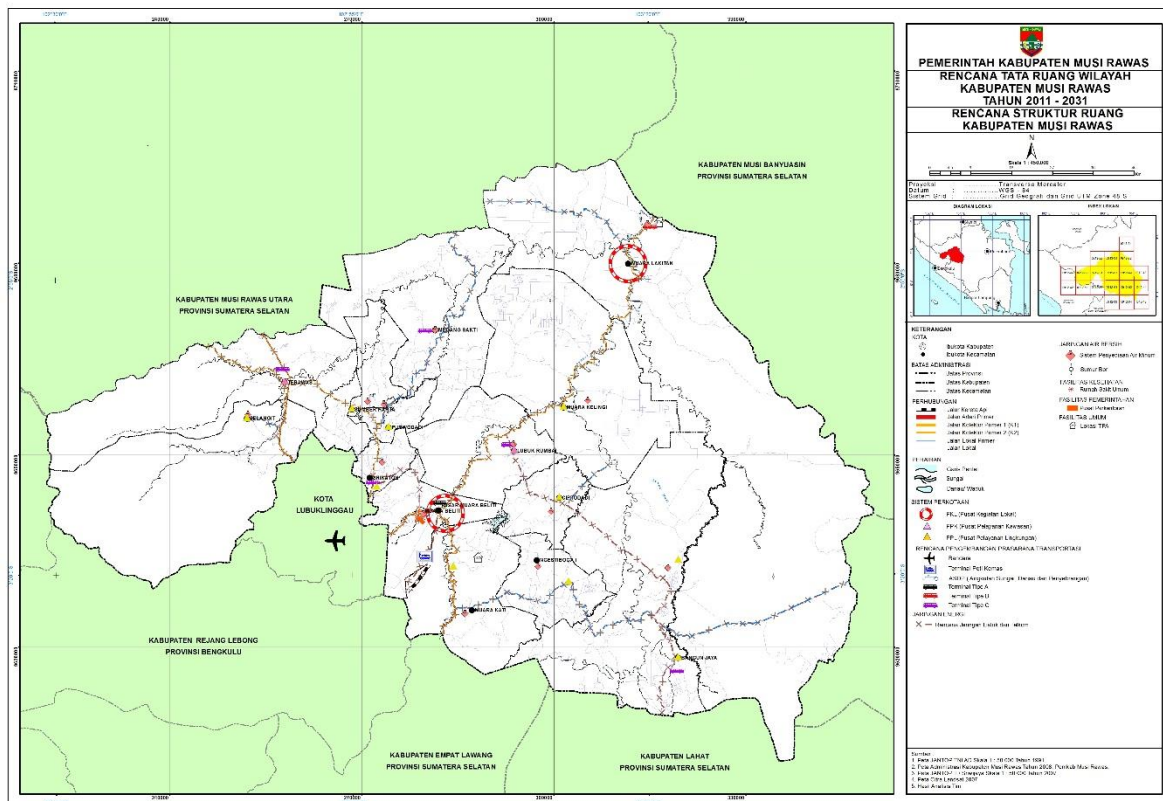
b. Penataan Ruang

Dalam konstelasi regional (provinsi) dan sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan, Kota Lubuklinggau berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah dan Kecamatan Muara Beliti sebagai Pusat Kegiatan Lokal.

Maka struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kecamatan Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembangan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional. Struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Peta struktur ruang Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada peta berikut :

Gambar 2.4

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Musi Rawas



Pada gambar di atas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2031, maka arahan struktur ruang adalah sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PKL adalah:

- a. Kota Muara Beliti;
- b. Muara Lakitan.

2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPK adalah :

- a. Simpang Terawas (Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas); adalah pusat permukiman yang berada antara Simpang Nibung dengan Lubuklinggau dan juga berada pada lintas trans Sumatera. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani:
 - 1) Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
 - 2) Kecamatan Selangit, dan
 - 3) Kecamatan Sumber Harta
- b. Mengang Sakti; diarahkan sebagai pusat pelayanan kawasan yang meliputi beberapa kecamatan disekitarnya, yaitu :
 - 1) Kecamatan Purwodadi dan
 - 2) Kecamatan Tugumulyo
- c. Simpang Semambang (Tuah Negeri); adalah pusat permukiman yang berada pada jalan lintas Lubuklinggau - Palembang terletak antara Muara Beliti dengan Muara Lakitan. Pusat pelayanan kawasan ini diarahkan untuk melayani;
 - 1) Kecamatan Buah Negeri
 - 2) Kecamatan Muara Kelingi
 - 3) Kecamatan Jayaloka
 - 4) Kecamatan Sukakarya
 - 5) Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
 - 6) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut

3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Adapun yang akan diarahkan menjadi PPL adalah ibukota dari kecamatan berikut :

- a. Tugu Mulyo (Kecamatan Tugumulyo)
- b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
- c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
- d. Selangit (Kecamatan Selangit)
- e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
- f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
- g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
- h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
- i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Fungsi-fungsi pelayanan untuk masing-masing pusat pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Struktur Ruang dan Fungsi yang Diemban Kecamatan

NO	KECAMATAN	HIRARKI	FUNGSI YANG DIEMBAN PUSAT KEGIATAN/PELAYANAN															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Beliti	PKL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Muara Lakitan	PKL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Simpang Terawas/ STL. Ulu Terawas	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
4	Megang Sakti	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
5	Simpang Semambang/ Tuah Negeri	PPK		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
6	Selangit	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
7	Sumber Harta	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
8	Tugumulyo	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
9	Purwodadi	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	X
10	T.P. Kepungut	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
11	Jayaloka	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X
12	BTS. Ulu	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
13	Sukakarya	PPL		X			X		X			X	X	X	X	X	X	
14	Muara Kelingi	PPL		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber : RTRW Kabupaten Musi Rawas 2011-2031

Keterangan :

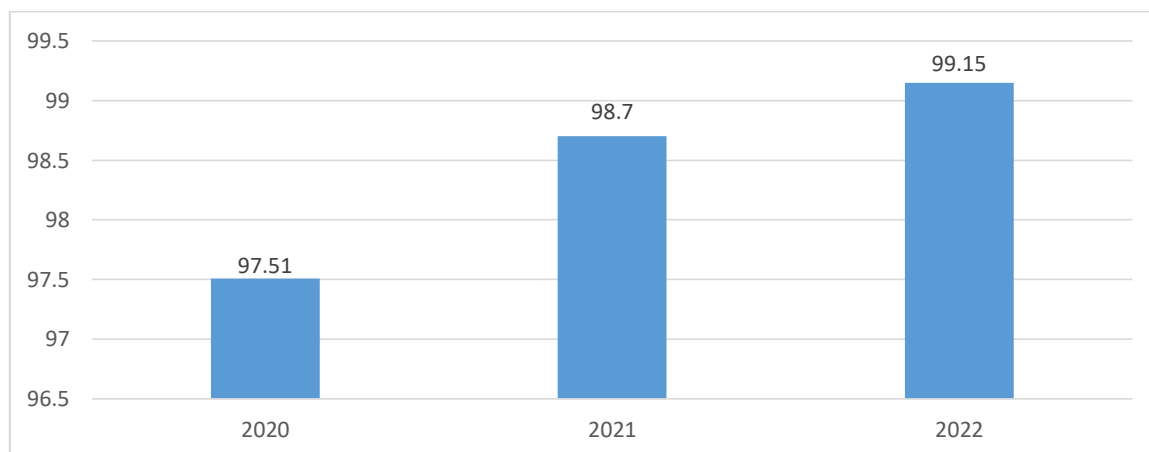
- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. Pemerintah Kabupaten | 6. Jasa Persewaan dan Perbankan, | 11. Kesehatan | 16. Air Limbah |
| 2. Pemerintah Lokal | 7. Jasa Koperasi Unit Desa | 12. Listrik | |
| 3. Ditribusi dan Koleksi | 8. Jasa Hukum dan Konsultasi | 13. Telekomunikasi | |
| 4. Industri | 9. Pariwisata dan Jasa penginapan | 14. Irigasi | |
| 5. Perdagangan, Kios dan Los Pasar | 10. Pendidikan | 15. Air Minum Bersih | |
- PKL : Pusat Kegiatan Lokal; PPK: Pusat Pelayanan Kawasan; PPL: Pusat Pelayanan Lingkungan

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Sanitasi

Akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2020 sebesar 97,51% meningkat 98,7% pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 99,15 % atau meningkat sebesar 0,45%. Data akses sanitasi yang layak Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.27
Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Layak

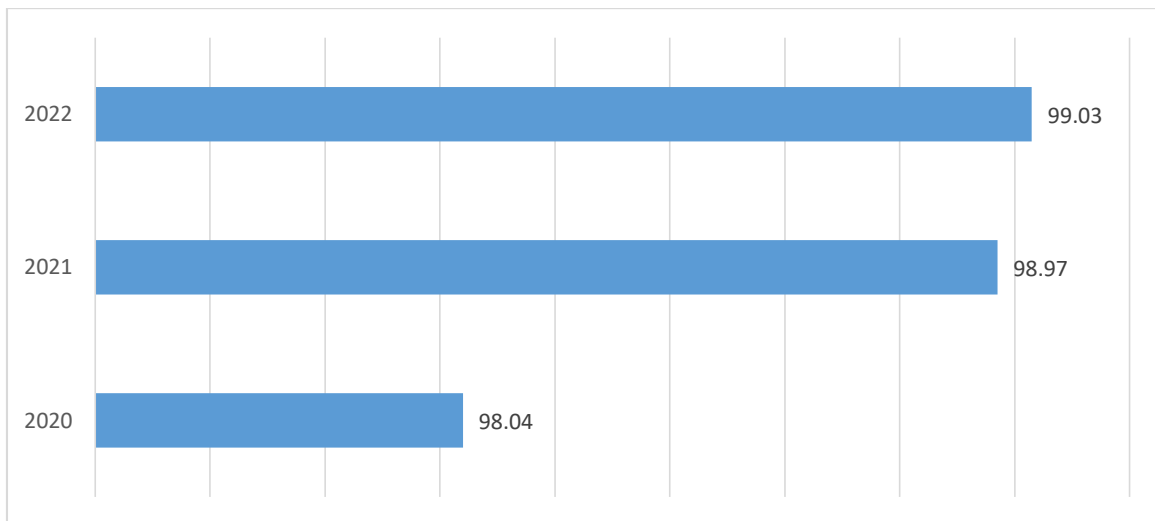


Sumber : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan 2022

b. Air Minum

Akses air minum yang layak Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 99,03%. Nilai akses air bersih yang layak Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020-2022 dapat lihat pada grafik berikut.

Grafik 2.28
Air Minum tahun 2020-2022



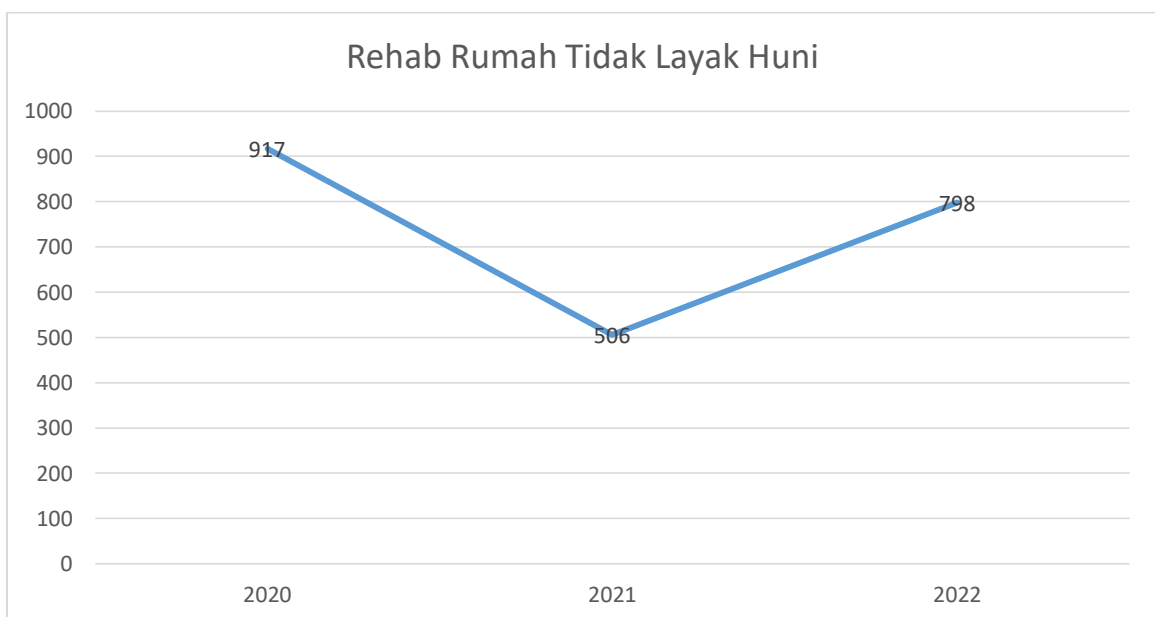
Sumber : : Dinas Pu Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan, 2022

c. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan rumah dengan kondisi bangunan tidak layak dan tidak memiliki akses prasarana yang layak, rehab rumah tidak layak huni pada tahun 2022 sebesar 798 Unit sebagaimana tercantum dalam grafik berikut:

Grafik 2.29

Rehab Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019-2021



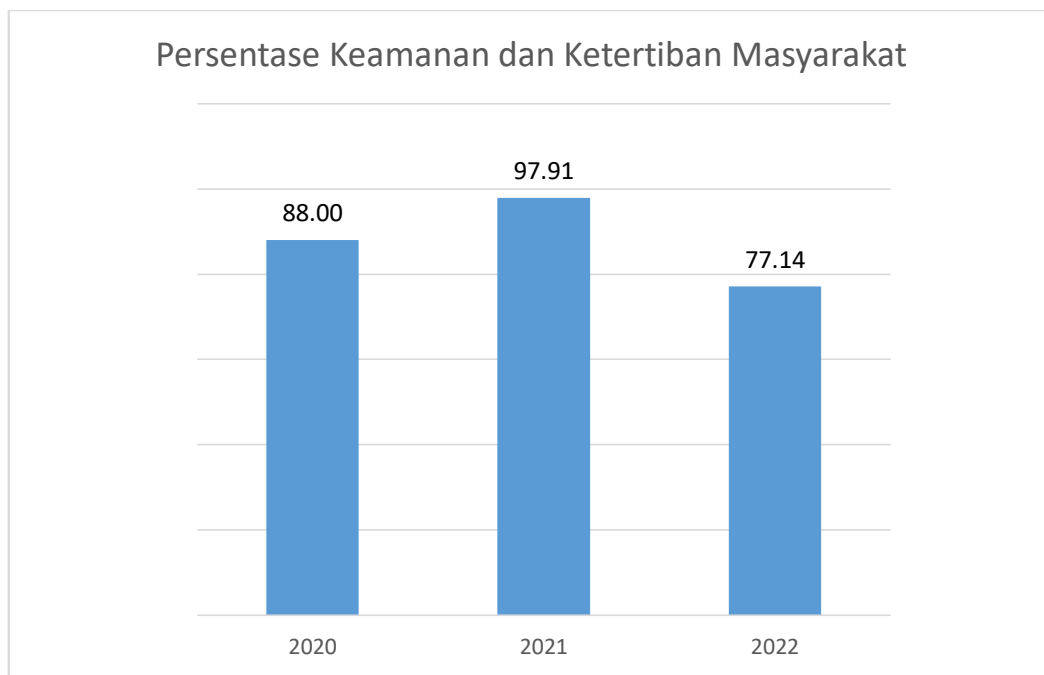
Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2022

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten adalah penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Pada tahun 2022 persentase keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Musi Rawas terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 77,14 dibanding tahun 2021 sebesar 97,91

Grafik 2.30

Persentase Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Tahun 2020-2022



Sumber : Data SatPolIPP Kabupaten Musi Rawas 2022

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warganegara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani mencapai 93,20 % pada tahun 2021.

Data urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Musi Rawas
 Tahun 2020-2022

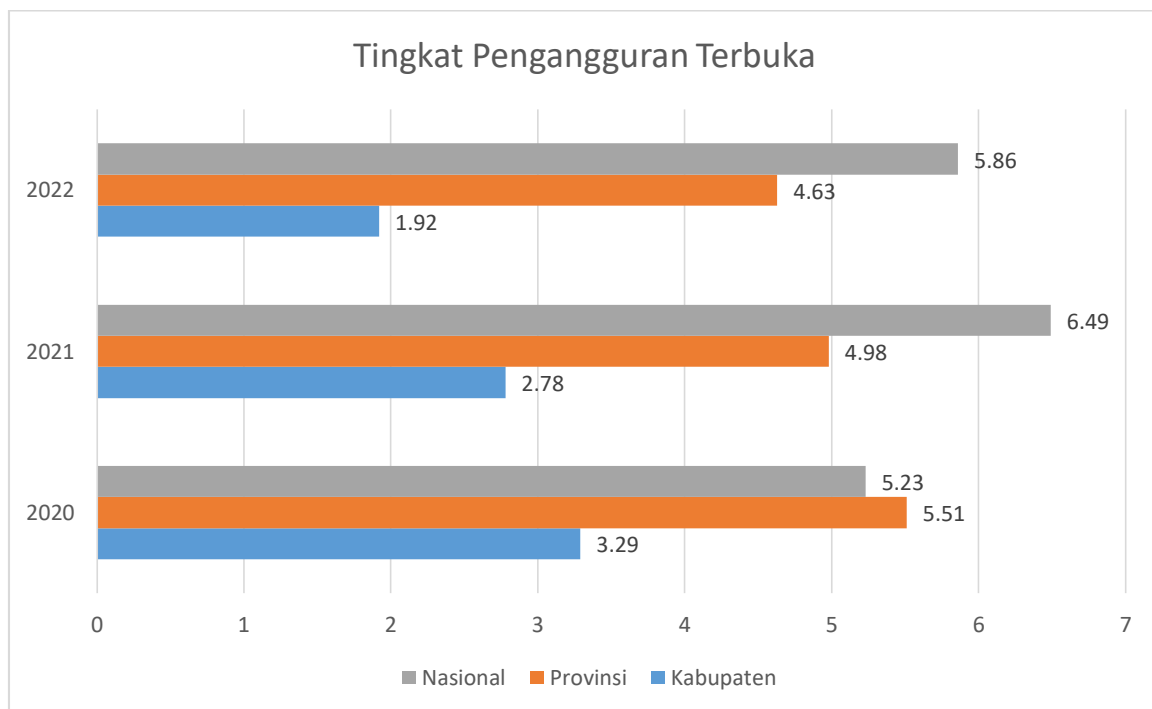
No	Indikator	2020	2021	2022
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani (%)	50,47	93,20	100
2	Angka kemiskinan (%)	13,50	13,89	13,34

Sumber: Dinas Sosial Kab. Musi Rawas Tahun 2022

7. Tenaga Kerja

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Grafik 2.31
 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas tahun 2020-2022



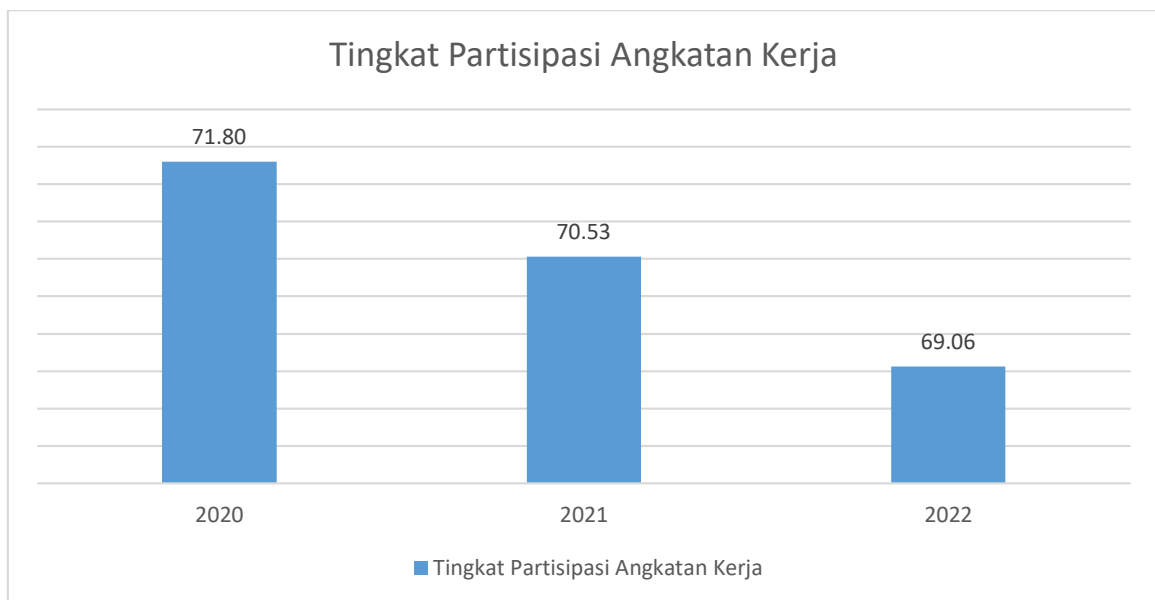
Sumber : BPS Nasional, BPS Provinsi dan BPS Musi Rawas 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup positif dibanding tahun sebelumnya mencapai 1,92. TPT Kabupaten Musi Rawas lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Provinsi sebesar 4,63 dan TPT Nasional sebesar 5,86.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). TPAK Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 71,80 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dimana pada tahun 2021 TPAK Kabupaten Musi Rawas sebesar 70,53 dan Terdapat 69,06% penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 yang masuk ke angkatan kerja.

Grafik 2.32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022

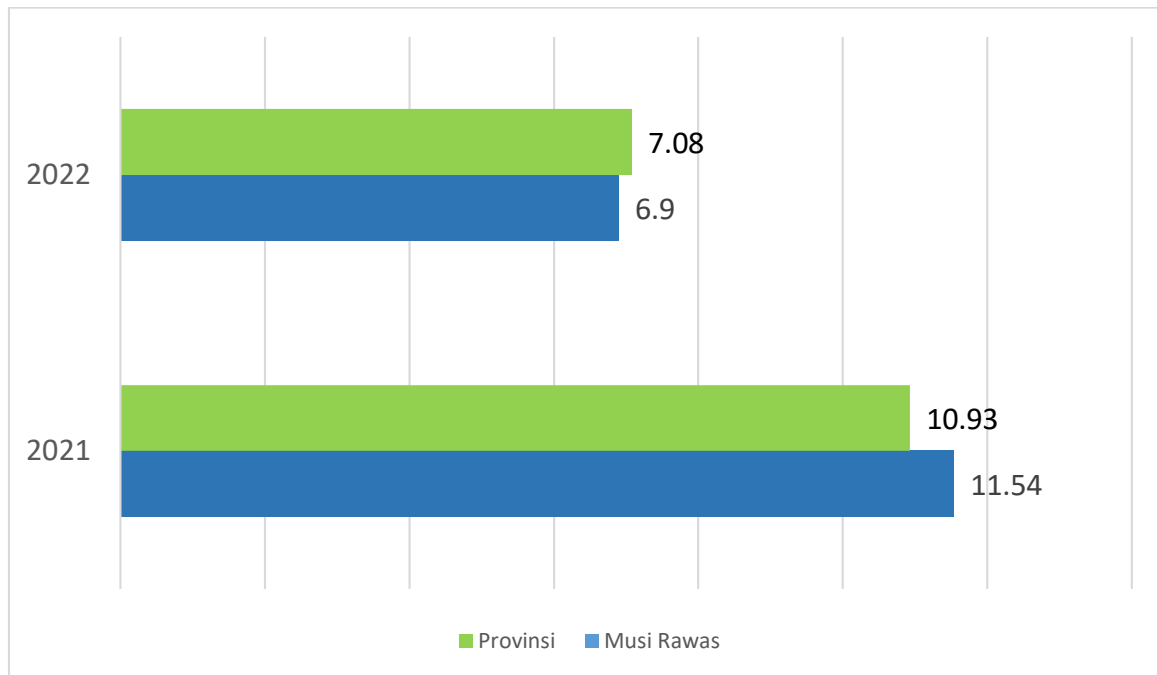


Sumber : BPS Musi Rawas 2022

c. Tingkat Setengah Pengangguran

Grafik 2.33

Tingkat setengah pengangguran Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Musi Rawas 2022

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak diukur dengan indikator rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) setiap tahun mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 85,45 pada tahun 2020 dan 85,85 pada tahun 2021 Pada tahun 2022 capaian IPG sebesar 86,15 yang berarti mengalami peningkatan 4 point dari tahun 2021. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2019 sebesar 56,94, tahun 2020 sebesar 58,46 dan pada tahun 2021 sebesar 62,90. Secara umum indikator mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 indikator mengalami penurunan akibat dampak dari Covid 19 yaitu pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan yang mendukung capaian indikator. Data capaian kinerja urusan

Pemberdayaan Perlindungan Anak lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1)	Rasio KDRT (%)	0,00055	0,00055	0,000466
2)	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak (%)	0,012	0,00024	0,000204
3)	Skor Kabupaten/Kota Layak Anak (Nilai)	Pratama	Pratama	Nindya
4)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,45	85,85	86,15
5)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,46	62,90	

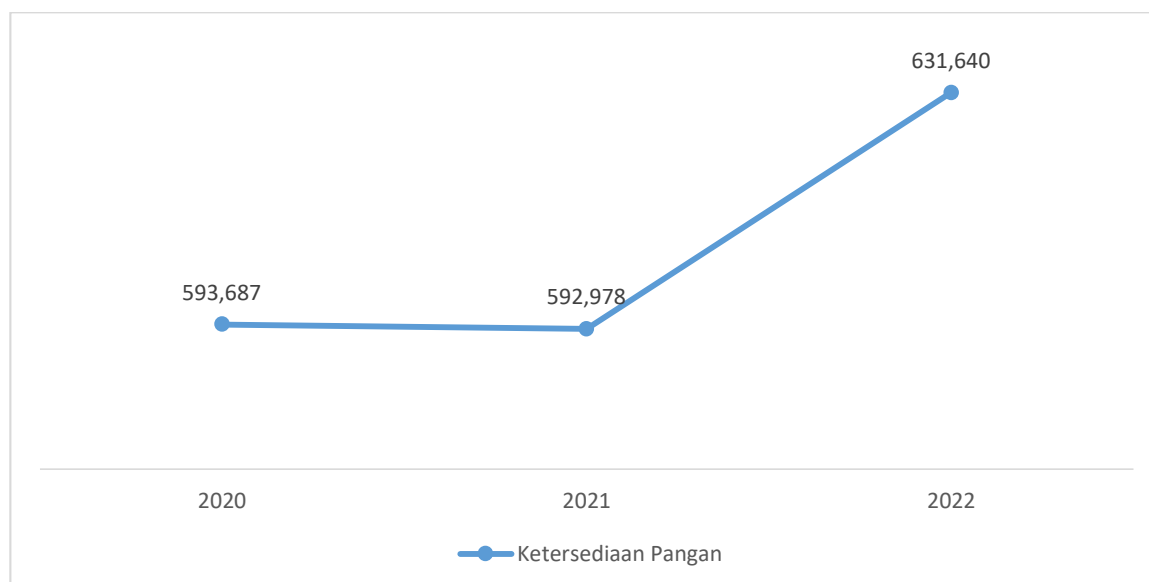
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Musi Rawas 2022

9. Pangan

a. Ketersediaan Pangan

Grafik 2.34

Ketersediaan Pangan (Ton) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Dari grafik di atas diketahui bahwa Kabupaten Musi Rawas di tahun 2022 ketersediaan pangan mengalami peningkatan sebesar 631.640 ton disbanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebesar 592.978 ton.

10. Pertanian

Secara umum Kinerja Pertanian yang diukur dengan Luas Lahan yang Bersertifikat di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami kenaikan sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Kinerja Pertanian Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015- 2020

No	Indikator	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Lahan Yang Bersertifikat	221.765,90	227.473,43	234.297,19	290.475,61	497.838,83	53.539.923

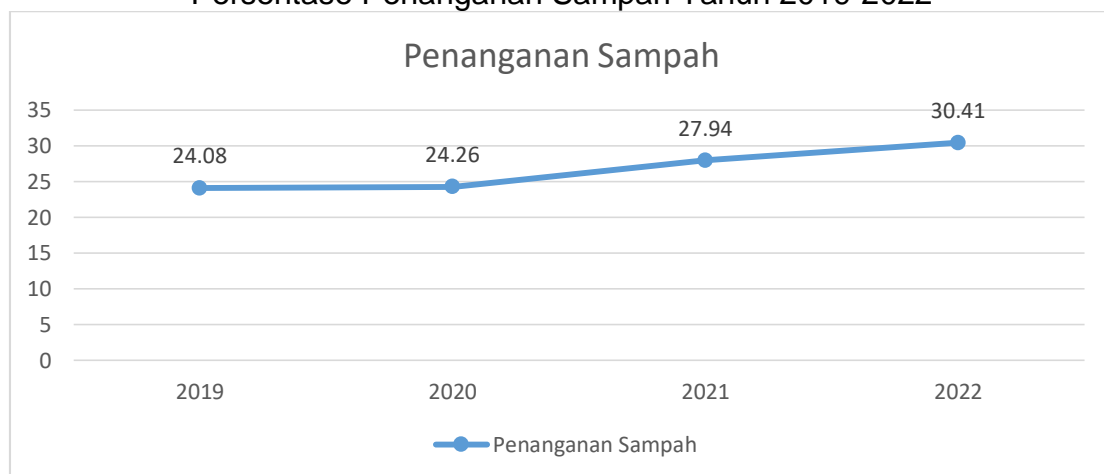
Sumber: BPN dan Bagian Tapem Setda Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Data Diolah)

11. Lingkungan Hidup

a. Persentase Penanganan Sampah

Penangan sampah di Kabupaten Musi Rawas terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 mencapai 24,08 pada tahun 2021 mencapai 27.94 persen, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 30,41 persen.

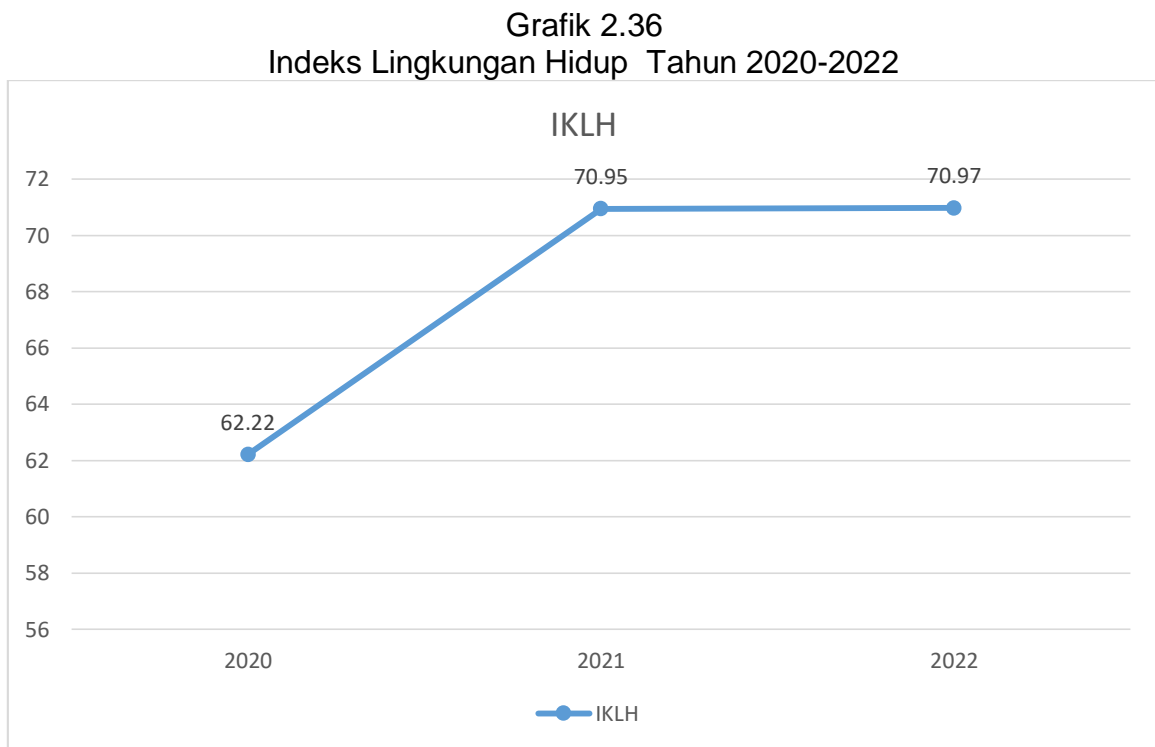
Grafik 2.35
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

b. Indeks Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Musi Rawas setiap tahun terus mengalami kemajuan dari tahun 2019-2022, untuk tahun 2022 yang ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 69,90% dengan realisasi sebesar 70,97% untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

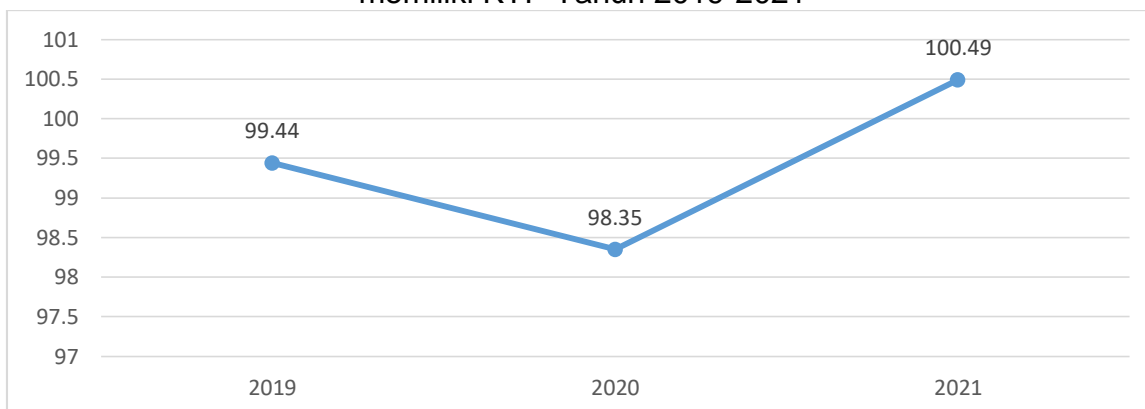


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan wajib pelayanan dasar yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan bersama antara pusat dan daerah. Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP sebesar 100,49 %, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.37
Persentase Penduduk yang berusia 17 Tahun ke atas/telah menikah yang memiliki KTP Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan indikator: Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif, Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG dan Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai aturan dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Jumlah Lembaga Ekonomi Desa yang aktif (%)	98,92	98,92	100
2	Persentase Masyarakat Desa memanfaatkan TTG (%)	71,42	21,43	100
3	Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Yang Sesuai Aturan	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021

14. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Musi Rawas termasuk daerah yang mempunyai potensi rawan bencana banjir, longsor, angin puting beliung dan kebakaran hutan. Sebagai daerah yang mempunyai potensi bencana alam Kabupaten Musi Rawas melakukan langkah-langkah monitoring untuk menekan terjadinya bencana alam.

Tabel 2.17

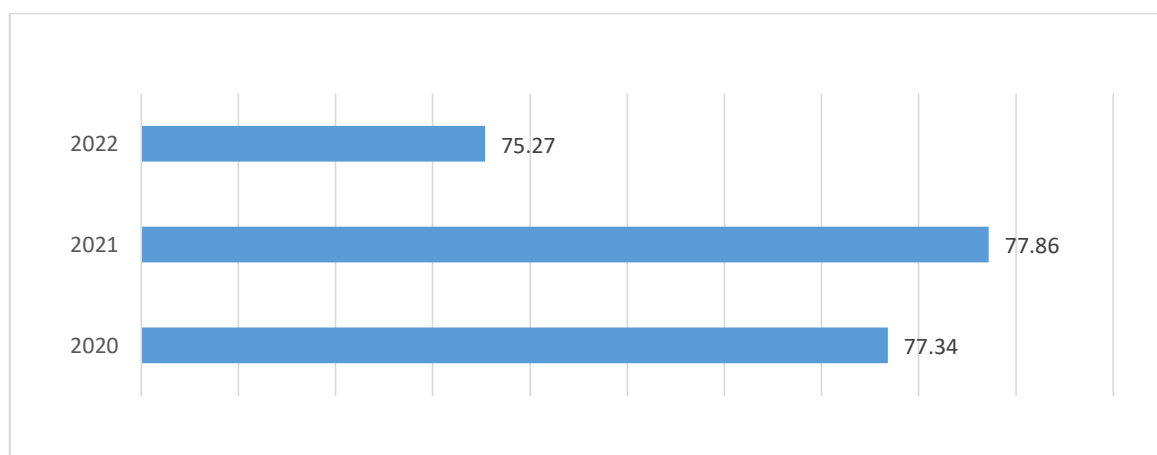
Capaian Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja Pembangunan	Tahun	
		2021	2022
1	Indeks Penurunan dampak resiko bencana	47,37	50,9%
2	Presentasi Bencana yang Tertangani	52,63%	34,6%

15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

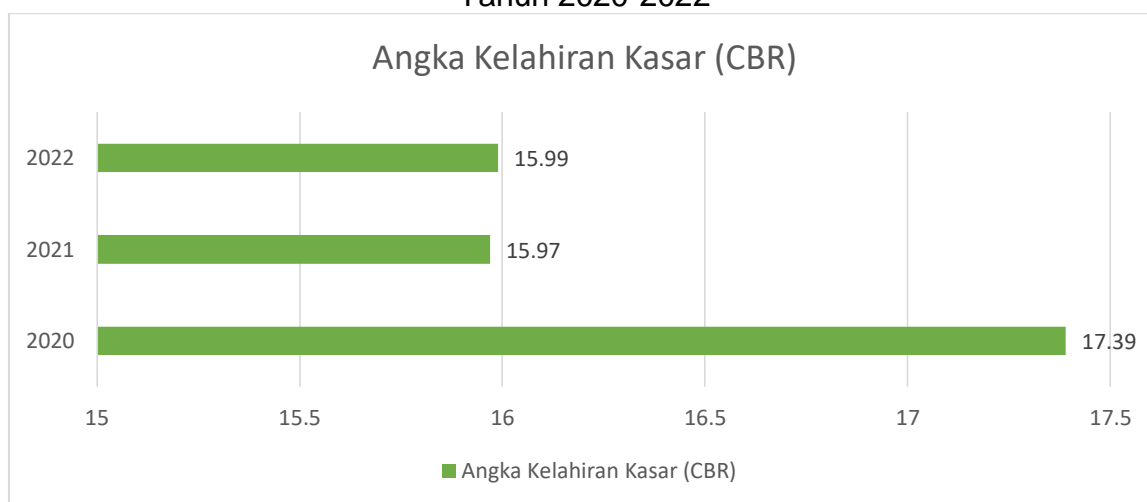
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Musi Rawas pemerintah sudah melakukan langkah-langkah terbaik, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat menggunakan alat kontrasepsi yang telah ditargetkan pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Capaian ini menunjukkan keberhasilan cukup baik, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.38
Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Contraceptive prevalence rate/CPR) %
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2022

Grafik 2.39
Angka kelahiran kasar (CBR)
Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Musi Rawas Tahun 2022

Capaian angka kelahiran kasar (CBR) dari grafik di atas pada tahun 2022 sebesar 15,99 bila di bandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 19,00 belum memenuhi target.

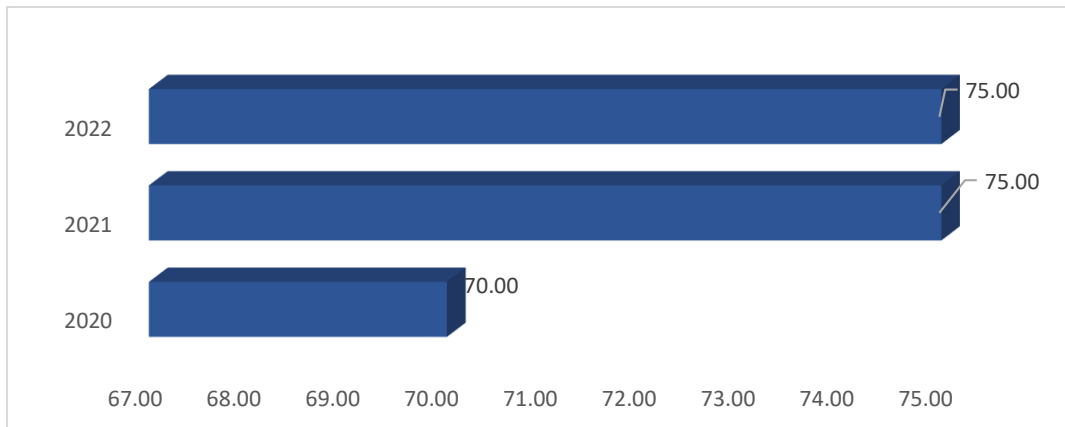
16. Perhubungan

Pada urusan perhubungan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 memiliki 5 terminal yang masing – masing berkapasitas 450 kendaraan dan daya tampung kendaraan sebesar 50 kendaraan, selain terminal Kabupaten Musi Rawas juga memiliki 3 pelabuhan sungai yaitu : Dermaga Muara Kelingi, Tambatan Perahu di Desa Pasenan dan Tambatan Perahun di Desa Sri Pengantin.

17. Komunikasi dan Informatika

Untuk menjadikan kabupaten musu rawas yang lebih maju dan bersaing maka bidang komunikasi dan informatika adalah hal yang paling berpengaruh untuk mejudkan keberhasilan tersebut diantara dengan keterbukaan informasi dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Langka ini didukung dengan adanya peningkatan jaringan komunikasi, untuk lebih lanjut dapat di lihat pada grafik berikut:

Grafik 2.40
 Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah
 Tahun 2020-2022



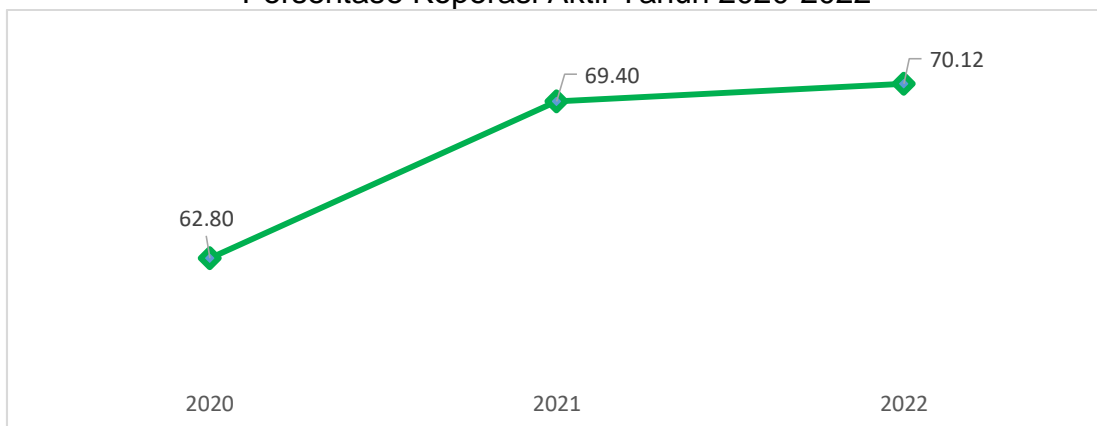
Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas 2022

18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Perkembangan koperasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Koperasi Aktif yang awalnya pada tahun 2020 sebesar 62,80% mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 69,40%. Pada Tahun 2021, koperasi aktif mengalami peningkatan kembali sebesar 70,12% dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.41
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2020-2022

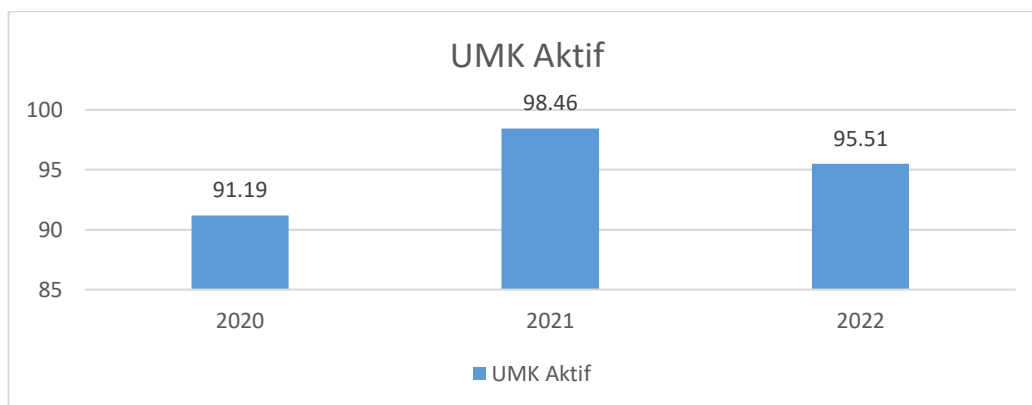


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2022

b. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada saat ini merupakan ujung tombak stabilitator dan penopang pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun daerah. Untuk itu Kabupaten Musi Rawas terus berusaha meningkatkan pertumbuhan UKM. Adanya Pandemi Covid 19 sangat mempengaruhi pertumbuhan UKM tidak hanya di tingkat nasional namun juga memberikan pengaruh yang sangat besar bagi pertumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas. Pertumbuhan UKM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mencapai 95,51%. UKM aktif dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.42
Usaha Mikro Kecil Aktif Tahun 2020-2022

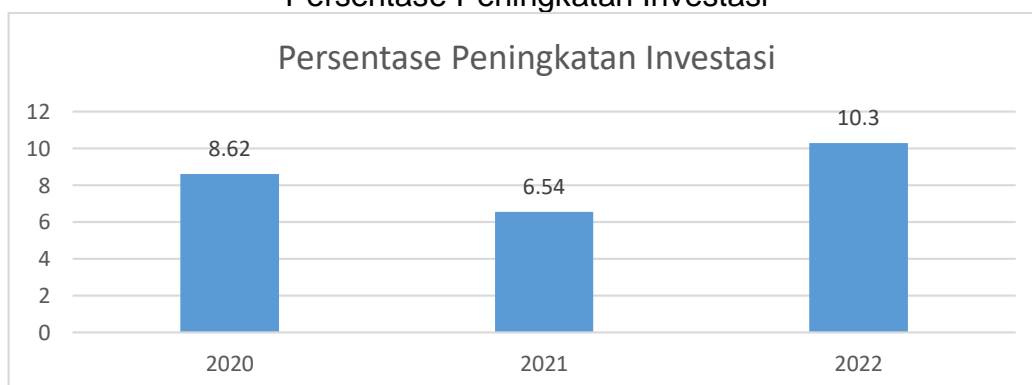


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM 2021

19. Penanaman Modal

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, khususnya pada nilai investasi berskala nasional, seperti tergambar pada grafik berikut:

Grafik 2.43
Persentase Peningkatan Investasi



Sumber : DPM-PTSP Kab. Musi Rawas Tahun 2022

20. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Musi Rawas menjadi salah satu prioritas utama. Untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas dan trampil banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas, diantaranya dengan mendirikan organisasi kepemudaan dan organisasi olahraga. Di tahun 2021 organisasi kepemudaan mencapai 18 organisasi.

21. Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang sangat berperan dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam hal ini Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik mengevaluasi dan menyajikan informasi guna untuk mendukung kebijakan nasional dan provinsi. Penyediaan data yang terintegrasi dan selalu di update merupakan modal utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan kedepannya. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas menyiapkan data indikator makro maupun indikator sektoral yang dapat diakses langsung melalui website <https://musirawaskab.bps.go.id/> atau publikasinya Musi Rawas Dalam Angka.

22. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu upaya Kabupaten Musi Rawas untuk meningkatkan tata kelola pada bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik. Kabupaten Musi Rawas telah memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan berbagai peralatan berupa sarana dan prasarana yang dilengkapi dengan Waren data (Network Operational Center), jaringan LAN, jaringan WAN dan perangkat komputer beserta kelengkapannya.

Tabel 2.18

Capaian Kinerja Urusan Persandian Kab.Musi Rawas Tahun 2019-2021

No	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	50	35	35	45

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

22. Kebudayaan

Capaian kinerja layanan umum pada urusan kebudayaan Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 diukur dengan indikator persentase warisan budaya yang dilestarikan dan indikator meningkatnya pelestarian budaya Musi Rawas, seperti pada table di bawah ini :

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kab. Musi Rawas Tahun 2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	74,5	47,8
2	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	-	70	47,8

23. Perpustakaan

Perpustakaan di Kabupaten Musi pada tahun 2021 terdiri dari Perpustakaan Daerah sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 12 orang, Perpustakaan Sekolah sebanyak 431 unit dengan pengelola sebanyak 792 orang, Perpustakaan Desa/Kelurahan sebanyak 396 unit dengan pengelola sebanyak 102 orang, Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 2 unit dengan pengelola sebanyak 10 orang dan Perpustakaan Khusus sebanyak 1 unit dengan pengelola sebanyak 4 orang. Jumlah pojok baca/ taman baca terdiri dari Pojok Baca Perpustakaan Daerah sebanyak 2 unit, Pojok Baca Desa sebanyak 58 unit. Sedangkan jumlah koleksi bahan pustaka berdasarkan jumlah judul sebanyak 229.991 dan berdasarkan jumlah eksemplar sebanyak 464.391 eksemplar. Jumlah Pemustaka di Kabupaten Musi Rawas sebanyak 50.065 orang.

Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan diukur dengan indikator : Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat, dan Rasio Pengunjung Perpustakaan. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Perpustakaan Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan, dapat dilihat dari data series pada tabel capaian kinerja urusan perpustakaan.

Tabel 2.20**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kab.Musi Rawas Tahun 2022**

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	-	52,6	48,36
2	Rasio Pengunjung Perpustakaan	9,50	6,94	7,05

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

24. Kearsipan

Kearsipan secara umum merupakan proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Kabupaten Musi Rawas dalam urusan kearsipan mengalami perbaikan dan peningkatan di setiap tahun. Capaian kinerja layanan umum pada urusan Kearsipan diukur dengan indikator: Rata-rata nilai audit kearsipan internal (LAKI), Persentase OPD yang nilai lakinya masuk dalam kategori baik. Data dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022

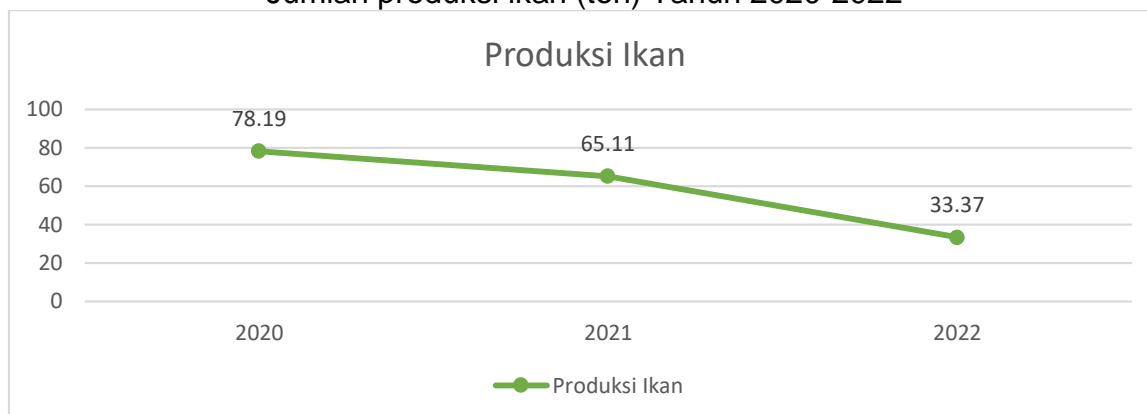
No	Indikator	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
1	Rata-rata nilai audit kearsipan internal (LAKI)	70,00	43,64
2	Persentase OPD yang nilai lakinya masuk dalam kategori baik	18	0,02

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Musi Rawas Tahun 2022

B. Fokus Layanan Urusan Pilihan**1. Urusan Perikanan**

Produksi ikan di Kabupaten Musi Rawas mengalami penurunan 3 tahun terakhir, pada tahun 2020 produksi ikan Kabupaten Musi Rawas sebesar 78,19 ton. Dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 65,51 ton dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 sebesar 33,37 ton.

Grafik 2.44
Jumlah produksi ikan (ton) Tahun 2020-2022



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas Tahun 2022

2. Pariwisata

Kabupaten Musi Rawas mempunyai banyak potensi wisata diantaranya wisata alam. Wisata alam yang ada di Kabupaten Musi Rawas kini mulai dilirik oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi tetangga, kunjungan wisata ke musirawas dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan pada tahun 2020 persentase kunjungan wisata ke musirawas sebesar 79,12 % dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 67,8%

Tabel 2.22
Kunjungan Wisata Tahun 2022 (%)

No	Indikator	Tahun 2022		
		2020	2021	2022
1	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	79,12	70	67,8

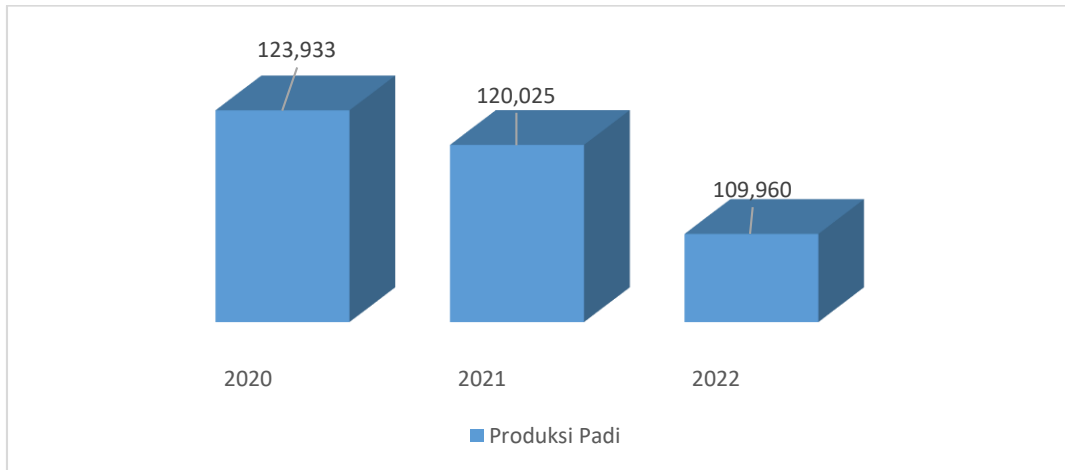
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Musi Rawas Tahun 2022

3. Pertanian

Capaian urusan pertanian di Kabupaten Musi Rawas diantaranya difokuskan pada produksi padi, jagung dan kedelai. Berikut grafik capaian produksi padi, jagung dan kedelai.

- Padi

Grafik 2.45
Produksi Padi Tahun 2020 – 2021

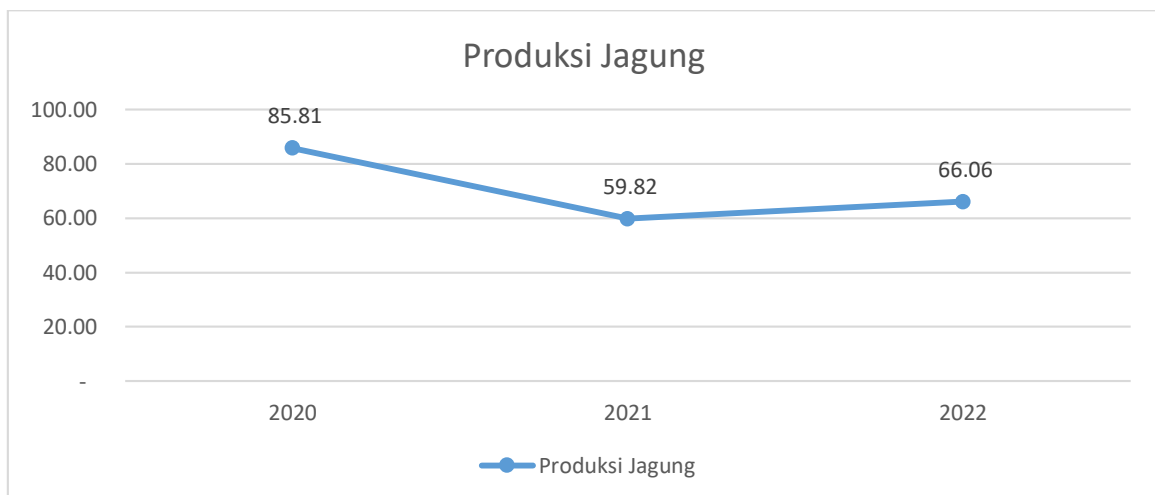


Sumber : BPS Sumatera Selatan

Dari grafik diatas menunjukkan produksi padi ditahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 produksi padi sebesar 109.960 ton.

- Jagung

Grafik 2.46
Produksi Jagung Tahun 2020 – 2022



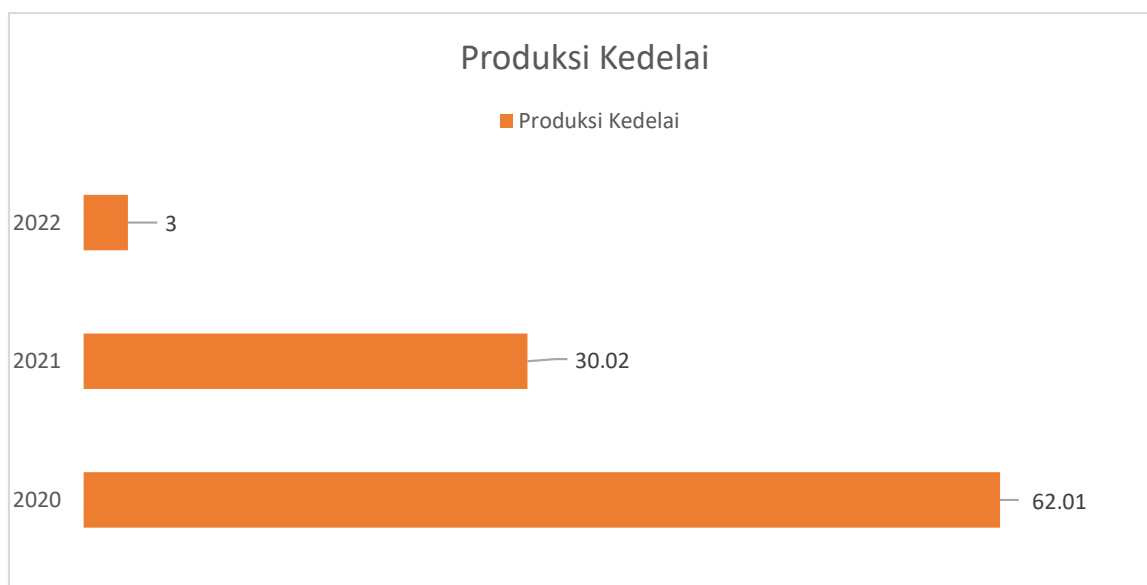
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

Urusan Pertanian pada sektor produksi jagung di Kabupaten Musi Rawas dari tahun 2020 sebesar 85.81 ton menurun menjadi 59.82 ton di tahun 2021, pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 66,06 ton.

- Kedelai

Produksi Kedelai di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2020 sebesar 15,90 ton, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 29 ton, pada tahun 2022 produksi kedelai mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 3 ton. Penurunan produksi kedelai disebabkan karena adanya disesuaikan dengan intruksi Menteri Pertanian untuk peningkatan produksi jagung.

Grafik 2.47
Produksi Kedelai Tahun 2020-2022

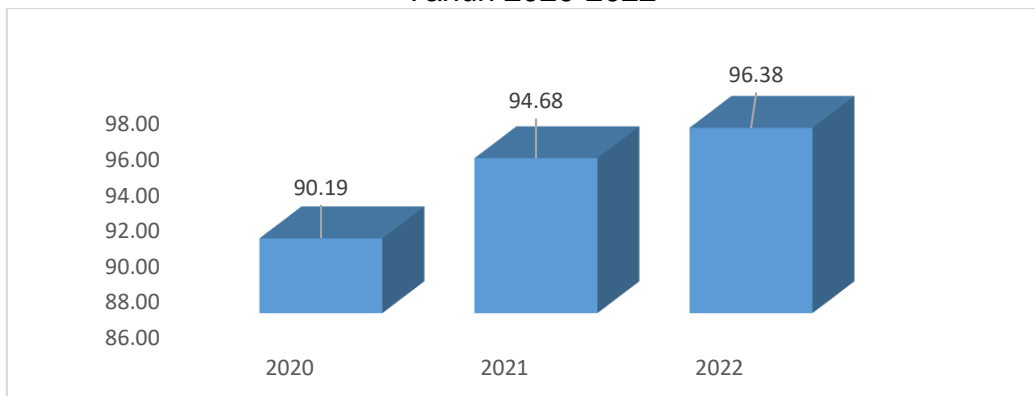


Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi pada tahun 2020 sebesar 90,19 sampai dengan tahun 2022 meningkat sebesar 96,38. Jumlah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.48
 Persentase Peningkatan Rasio Elektrifikasi
 Tahun 2020-2022

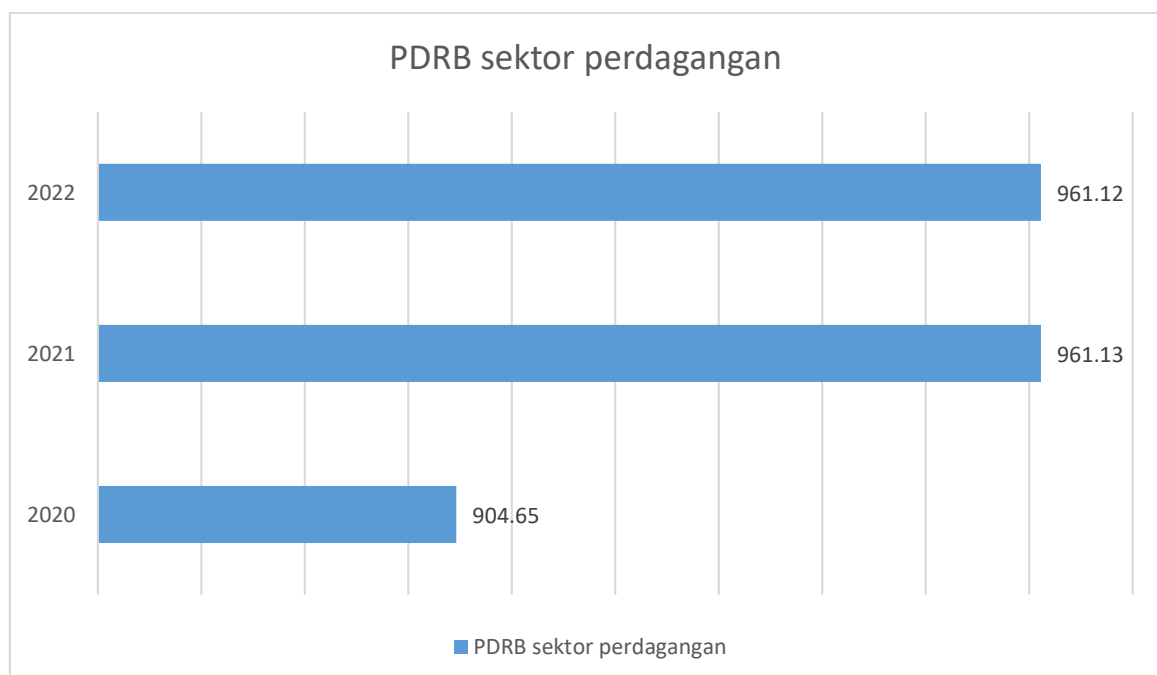


Sumber : Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kab. Musi Rawas Tahun 2022

5. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Musi Rawas dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di tahun 2020 sebesar 904,65 Milyar, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 6961,13 Milyar. Pada tahun 2022 sebesar 961,12 Milyar.

Grafik 2.49
 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (Milyar)
 Tahun 2020-2022



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Musi Rawas Tahun 2020

6. Perindustrian

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Musi Rawas, pemerintah melaksanakan banyak – banyak terobosan dan inovasi, diantaranya yaitu di bidang perindustrian baik itu dari yang kecil, menengah dan besar. Persentase peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2020 sebesar 45% dan pada tahun 2021 sebesar 2,16 %, pada tahun 2022 sebesar 1,92 %

7. Transmigrasi

Pada tahun 2017, Kabupaten Musi Rawas tidak menempatkan transmigran di lokasi transmigrasi. Sejak tahun 2013 jumlah transmigrasi yang di tempatkan adalah 15 KK dengan pendapatan perkapita pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,4, capaian ini belum memenuhi target RPJMD Kabupaten Musi Rawas sebesar 1,6.

C. Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Diberlakukannya penyelenggaraan pemerintah melalui otonomi daerah, tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mencapai prestasi, khususnya dalam pelayanan publik, termasuk di bidang perencanaan.

Untuk memastikan keberhasilan perencanaan Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 tahun berturut – turut dari tahun 2013, 2014, 2015 dan khususnya pada tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan atau Anugerah Pangripta Sriwijaya. Ditahun 2017 pemerintah Kabupaten Musi Rawas kembali mendapatkan Anugerah Pangrita Sriwijaya sebagai juara II ditingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Tahun 2019 Kabupaten Musi Rawas mendapat penghargaan terbaik (juara I) di tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan termasuk dalam 10 besar PPD tingkat Nasional. Pada tahun 2021, Kabupaten Musi Rawas meraih peringkat ketiga dalam lomba Penghargaan Pembangunan Daerah tingkat Provinsi.

2. Urusan Keuangan

Pada urusan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dari BPK. Dengan demikian Kabupaten Musi Rawas telah memperoleh predikat WTP di tahun 2014 sampai dengan tahun 2022. Penghargaan WTP merupakan penghargaan tertinggi akuntabilitas keuangan dari kementerian keuangan Republik Indonesia.

3. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Musi Rawas, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus melaksanakan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2022 Persentase Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 45 % dari target RPJMD sebesar 45% yang berarti tercapai 100%.

4. Urusan Pengawasan

Akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ini diukur dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah sebesar 67,51 kategori B ditahun 2020, mengalami peningkatan di tahun 2021 sebesar 70,01 kategori BB terus meningkat menjadi 70,60 pada tahun 2022 kategori BB.

5. Penelitian dan Pengembangan

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan Inovasi daerah dalam bidang pemerintahan dan Sosbud dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100%, dan inovasi pada bidang ekonomi pembangunan sebesar 50%.

Tabel 2.23

Capaian Kinerja Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan tahun 2022

No	Indikator	Target	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Pengkajian Peraturan dan Sosial Budaya yang dimanfaatkan	80,00%	100,00%	73,00%
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kependudukan	80,00%	50,00%	58,00%

3	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah	85,00%	66,67%	40,00%
---	---------------------------------------	--------	--------	--------

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022

6. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan berfungsi sebagai pemberi layanan administratif dalam hal ini memfasilitasi penyelesaian sejumlah produk hukum baik itu perda dan keputusan DPRD yang diputuskan. Pada tahun 2019 produk hukum DPRD yang dihasilkan sebanyak 13 perda dan 13 keputusan, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Perda dan Keputusan DPRD yang Diputuskan Tahun 2020

No	Indikator	Target RPJMD (Tahun 2020)	Ralisasi Tahun 2020	Capaian (%)
1	Persentase Propemperda yang di sahkan	82	50	60,97 %

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

a. Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Musi Rawas atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga 2022 terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 PDRB Per kapita Kabupaten Musi Rawas tercatat sebesar Rp. 43.84 juta rupiah. Secara nominal tersu mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai Rp. 55. 48 juta rupiah

Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

b. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Capaian kinerja fokus fasilitas wilayah/infrastruktur tahun 2016-2019 ditunjukkan oleh :1) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan.

Tabel 2.25

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kab.Musi Rawas Tahun 2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	43	43	47

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

c. Iklim Berinvestasi

Capaian kinerja fokus iklim berinvestasi ditunjukkan oleh: Persentase Peningkatan Investasi.

Tabel 2.26

Fokus Iklim Berinvestasi Kab.Musi Rawas Tahun 2020-2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase Peningkatan Investasi	8,62	6,54	10,3

Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu 2022

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Dalam peningkatan kapasitas ASN Kabupaten Musi Rawas, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus melaksanakan peningkatan kompetensi. Pada tahun 2022 Persentase Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 45 % dari target RPJMD sebesar 45% yang berarti tercapai 100%.

Tabel 2.27

Fokus Sumberdaya Manusia Kab. Musi Rawas Tahun 2020- 2022

No	Indikator	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	-	41,50	45

Sumber: BKPSDM Kabupaten Musi Rawas

2.2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN 2022, ANALISIS INDIKATOR MAKRO DAN REALISASI TARGET SASARAN RPJMD TAHUN 2022

2.2.1 Evaluasi Kondisi Makro Kabupaten Musi Rawas

Secara detail capaian indikator makro RPJMD Musi Rawas tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator Makro Daerah dan target RPJMD Musi Rawas Dari Tahun 2021-2026

INDIKATOR MAKRO	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	2021		2022		2023	2024	2025	2026
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target
Indikator Makro									
1) PDRB	19.237.351,36	20.125.776.970.000	20.415.494.000	21.232.694.703.000	22.342.116,54	22.400.492.912.000	23.632.520.022.000	24.932.306.623.000	26.303.585.597.000
2) Indek Pembangunan Manusia	66.79	67	67,01	67.5	67,78	68.1	68.8	69.7	70.1
3) Pengeluaran Perkapita	9.520.000	9.692.683	9.550.000	9.865.365	10 107,00	10.038.050	10.210.730	10.383.410	10.556.100
4) Laju Pertumbuhan Ekonomi	0.24	4.26	2.33	4.5%-5.5%	4.06	4.5%-5.5%	4,8%-5,8%	5%-6%	5%-6%
5) Tingkat Kemiskinan	84,94	13.35	13,89	13.2	13,34	13.05	11,9	10.85	9.9
6) Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29	3,25	2.78	3.21	1.92	3.15	3.09	3.04	2.98

2.2.2 ANALISIS INDIKATOR MAKRO KABUPATEN MUSI RAWAS

Pembangunan Manusia yang tinggi mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempengaruhi kualitas pembangunan manusia (Findi dan Ezkiriando, 2013). Pada tahun 2022, pembangunan manusia masuk pada level sedang dengan nilai IPM 67,78. Capaian ini diperoleh karena meningkatnya komponen kesehatan, pendidikan dan perekonomian di Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas mencapai 4.06% dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1.92%. Perbandingan Pertumbuhan ekonomi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori yg baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu sejalan dengan tingginya kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Selain itu permasalahan yang tidak kalah penting adalah mengenai kemiskinan dan ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menjamin kesenjangan pendapatan di suatu wilayah menjadi rendah (Pangkiro, 2016). Dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori sedang.

2.2.3 Realisasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2022 dan Realisasinya

Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2022 di Kabupaten Musi Rawas itu sebesar Rp. **2.035.752.756.227,-** dengan realisasi sebesar **96,94 %** atau Rp.**1.860.429.965.150,-** untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29

Rekap Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung per OPD Tahun 2022

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
1	Dinas Pendidikan	483.196.253.243	99,98	423.176.750.952	87,58
2	Dinas Kesehatan	193.165.142.791	97,81	165.006.655.153	85,42
3	Rs. Dr. Sobirin	117.238.195.503	86,68	101.627.908.803	86,68
	BLUD	79.261.515.717	100,00	65.646.433.610	82,82
	APBD	37.976.679.786	100,00	35.981.475.193	94,75
4	Dinas PU Bina Marga	253.876.707.620	99,56	252.240.792.637	99,36
5	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	147.295.113.544	99,51	143.712.656.684	97,57
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	75.210.438.353	99,56	60.516.485.377	80,46
7	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	12.714.209.463	100,00	12.446.468.358	97,89
8	Dinas Sosial	13.915.137.661	98,45	13.178.321.737	94,70
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.030.958.757	99,27	4.861.245.040	96,63
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.535.825.748	88,13	3.116.268.433	88,13
11	Dinas Ketahanan Pangan	10.308.089.490	85,33	8.744.859.838	84,83
12	Dinas Lingkungan Hidup Daerah	10.213.719.194	97,96	9.310.546.616	91,16
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.075.578.939	100,00	4.842.104.165	95,40
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.434.209.803	100,00	7.075.262.796	95,17
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.636.417.901	87,47	9.953.634.277	85,54
16	Dinas Perhubungan	6.967.090.741	88,89	6.787.713.857	97,43
17	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	9.227.231.024	100,00	8.880.507.804	96,24
18	Dinas Koperasi dan UKM	4.794.963.173	100,00	4.727.111.649	98,58
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.003.560.683	99,99	4.548.336.177	90,90

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	11.880.007.606	98,70	11.725.966.999	98,70
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.617.619.785	96,08	5.397.487.321	96,08
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.986.320.924	94,83	3.780.146.410	94,83
23	Dinas Perikanan	8.012.557.570	100,00	7.421.896.101	92,63
24	Dinas Pertanian dan Peternakan	34.100.936.172	94,31	32.154.748.753	94,29
25	Dinas Perkebunan	9.341.971.995	100,00	9.019.906.753	96,55
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.819.515.366	73,83	6.928.758.795	88,61
27	Bagian Perekonomian dan SDA	620.257.650	100,00	615.953.078	99,31
28	Bagian Tata Pemerintahan Dan Kerjasama	1.160.100.000	100,00	1.151.982.400	99,30
29	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.872.050.000	82,42	2.847.908.136	99,16
30	Bagian Organisasi	735.000.000	100,00	728.578.800	99,13
31	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.813.700.000	97,31	10.485.840.600	96,97
32	Bagian Perencanaan dan Keuangan	15.777.504.572	100,00	15.252.537.504	96,67
33	Bagian Hukum	1.165.234.500	91,00	1.137.044.200	97,58
34	Bagian Administrasi Pembangunan	1.358.336.700	100,00	1.283.328.943	94,48
35	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	868.446.900	97,00	802.545.400	92,41
36	Bagian Umum	24.600.000.680	93,53	20.957.910.037	85,19
37	Sekretariat DPRD	92.018.758.716	93,62	84.427.257.416	91,75
38	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.155.492.778	100,00	7.886.325.037	96,70
39	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.386.064.841	83,33	3.990.384.354	90,98
40	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	333.328.350.509	95,42	311.034.406.274	93,31
41	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	8.851.762.471	95,92	7.937.728.962	89,67
42	Inspektorat	16.643.488.083	72,27	15.860.328.253	95,29

No	Nama SKPD	Jumlah Anggaran	Realisasi Fisik dan Keuangan		
			Fisik	Keuangan	
			Realisasi	Realisasi	
			%	Rp	%
43	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	9.594.222.719	99,24	8.632.652.501	89,98
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.883.592.177	100,00	5.742.843.548	97,61
45	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.162.615.859	95,73	2.070.166.983	95,73
46	Kecamatan STL Ulu Terawas	2.524.776.225	98,52	2.453.049.526	97,16
47	Kecamatan Selangit	2.722.092.878	100,00	2.655.888.701	97,57
48	Kecamatan Sumber Harta	2.216.469.840	100,00	2.125.787.689	95,91
49	Kecamatan Tugumulyo	3.402.306.887	99,86	3.289.373.150	96,68
50	Kecamatan Purwodadi	3.844.791.123	100,00	3.740.771.977	97,29
51	Kecamatan Muara Beliti	2.418.230.266	99,25	2.285.512.168	94,51
52	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.591.544.333	88,00	1.399.593.905	87,94
53	Kecamatan Jayaloka	2.700.276.798	93,64	2.606.014.041	96,51
54	Kecamatan Sukakarya	1.525.733.776	100,00	1.473.078.066	96,55
55	Kecamatan Muara Kelingi	3.245.864.819	99,82	3.105.829.615	95,69
56	Kecamatan Tuah Negeri	1.723.104.234	92,88	1.437.278.341	83,41
57	Kecamatan Muara Lakitan	2.845.863.312	95,65	2.722.114.956	95,65
58	Kecamatan Megang Sakti	3.738.253.631	97,72	3.653.018.631	97,72
59	Kecamatan BTS Ulu	2.871.963.201	99,89	2.784.672.271	96,96
JUMLAH		2.034.964.023.527	96,99	1.859.760.246.948	91,39

Penilaian RKPD dilakukan dengan menghitung realisasi sampai dengan bulan Desember 2022. Dari hasil evaluasi didapatkan bahwa dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.860.429.965.150,- atau sebesar 91,39 % termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Diperlukan komitmen dari Kepala OPD sebagai pelaksana program/kegiatan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan senantiasa

melakukan koordinasi kepada semua pihak terkait dan diupayakan adanya agenda kerja untuk kegiatan rutin bagi masing-masing OPD Pelaksana. Sikap ketelitian petugas menjadi penting dan harus diutamakan dalam pelaksanaan tugas yang diutamakan dalam pelaksanaan tugas, sebaiknya Kepala OPD menempatkan petugas yang kompeten di bidang program/kegiatan.

2.2.4 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai dengan Tahun Berjalan

Secara umum, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan, walaupun dari sasaran yang telah ditetapkan masih terdapat beberapa sasaran yang belum menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis sampai dengan tahun 2022 dilakukan terhadap 21 sasaran didukung oleh program pada tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026. Adapun analisa atas pencapaian Sasaran Strategis tahun 2022 sebagai berikut:

TUJUAN 1 DARI MISI PERTAMA	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (REFORMASI BIROKRASI) BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi pertama telah ditetapkan 3 sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini:

1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks RB	55,62	54,90	98,71
2.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (70,60)	100,84

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51	59,56	73,07

1.1.2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks SPBE	2,95	1,92	65,08
2.	Indeks Profesionalitas ASN	62,92	59,95	95.27

1.1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,04	92,41	104,96

TUJUAN 1 DARI MISI KEDUA	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas
---------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi kedua telah ditetapkan 3 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

2.1.1	Meningkatnya Derajat Pendidikan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pendidikan	69,39	69,23	99,77

2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan
--------------	---------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kesehatan (%)	79,2	73,00	92,17

2.1.3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Pembangunan Gender	87,45	85,81*	98,12
2.	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	100
3.	Status Kabupaten Layak Anak	700 (Madya)	820,40 (Nindya)	117,2

TUJUAN 2 DARI MISI KEDUA	Memantapkan Kehidupan Masyarakat yang aman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religius dan kearifan local
---------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi kedua telah ditetapkan 3 sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini

2.1.1	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	96	77,14	80,35

2.1.2	Terwujudnya Keamanan dan Kerukunan Umat Beragama
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	75,2	101,62

2.1.3	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan lokal dan kebudayaan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	70	47,8	68,29
2.	Indeks Budaya Literasi Daerah	30	35,88	119,60

TUJUAN 1 DARI MISI KETIGA	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur
----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi ketiga telah ditetapkan 2 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

3.1.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase konektivitas antar wilayah (%)	92,19	93,84	101,79

3.1.2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Irigasi, komunikasi)
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Infrastruktur Dasar	96,5	97,81	101,36
2.	Indeks Sumber Daya Air	52	49,3	94,81

TUJUAN 2 DARI MISI KETIGA	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang serta ketahanan bencana
----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi ketiga telah ditetapkan 3 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	IKLH	69,9	70,97	101,53

3.2.2	Meningkatnya Penataan Ruang
--------------	------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96	92,26	96,10

3.2.3	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Penurunan Dampak Resiko Bencana	50	47,37	94.74

TUJUAN 1 DARI MISI KEEMPAT	Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan pertama dari misi keempat telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	PDRB Sektor Pertanian	Rp 6.057,19 Milyar	Rp 6.573,75 Milyar	108,52

4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	PDRB Sektor Industri	Rp 1.682,29 Milyar	Rp 1.763,21 Milyar**	104,81
2.	PDRB Sektor Perdagangan	Rp 982,5 Milyar	Rp 1.050,27 Milyar**	106,89

4.1.3	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas
--------------	---

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase peningkatan investasi	8	10,03	125,37

TUJUAN 2 DARI MISI KEEMPAT	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
-----------------------------------	--

Untuk mewujudkan tujuan kedua dari misi keempat telah ditetapkan 3 sasaran strategis, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.2.1	Menurunnya tingkat kemiskinan
--------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Angka kemiskinan	13,2	13,34	98,93

4.2.2	Menurunnya tingkat pengangguran
--------------	--

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Tingkat Pengangguran	3,21	1,92	140,18

4.2.3	Meningkatnya Ketahanan Pangan
--------------	--------------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks Ketahanan Pangan	77,94	75,38	96,71

TUJUAN 3 DARI MISI KEEMPAT	Meningkatnya Pembangunan Masyarakat desa
-----------------------------------	---

Untuk mewujudkan tujuan ketiga dari misi keempat telah ditetapkan 1 sasaran, dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini.

4.3.1	Meningkatnya Status Desa
--------------	---------------------------------

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase Peningkatan Desa Maju	34,94	40	114,48

Tabel 2.30

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja RKPD Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Indeks RB	55,62	54,90	98,71
	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (70,60)	100,84
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51	59,56	73,07
Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	2,95	1,92	65,08
	Indeks Profesionalitas ASN	62,92	59,95	95,27
Meningkatnya pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,04	92,41	104,96
Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,39	69,23	99,77
Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,2	73,00	92,17
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,45	85,81*	98,12
	Kabupaten Layak Pemuda	Pratama	Pratama	100

Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
	Status Kabupaten Layak Anak	700 (Madya)	820,40 (Nindya)	117,2
Terwujudnya Ketertiban, keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	96	77,14	80,35
Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	75,2	101,62
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan local dan kebudayaan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	70	47,8	68,29
	Indeks Budaya Literasi Daerah	30	35,88	119,60
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah	92,19	93,84	101,79
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	96,5	97,81	101,36
	Indeks Sumber Daya Air	52	49,3	94,81
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	69,9	70,97	101,53
Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	96	92,26	96,10
Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	50	47,37	94.74

Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.057,19 Milyar	Rp 6.573,75 Milyar	108,52
Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1.682,29 Milyar	Rp 1.763,21 Milyar**	104,81
	PDRB sektor perdagangan	Rp 982,5 Milyar	Rp 1.050,27 Milyar**	106,89
Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	8	10,03	125,37
Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	13,2	13,34	98,93
Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,21	1,92	140,18
Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77,94	75,38	96,71
Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	34,94	40	114,48

Pada tabel sasaran diatas, didapatkan hasil bahwa:

a. Indikator termasuk dalam kriteria penilaian **SANGAT TINGGI** yaitu:

- Indeks RB
- Nilai SAKIP
- Indeks Profesionalitas ASN
- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Indeks Pendidikan
- Indeks kesehatan
- Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- Status Kabupaten Layak Anak
- Indeks Kerukunan Umat Beragama
- Persentase Konektivitas Antar Wilayah

- Indeks Infrastruktur dasar
 - Indeks Sumber Daya Air
 - IKLH
 - Persentase ketaatan terhadap RTRW
 - Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana
 - PDRB sektor pertanian
 - PDRB sektor Industri
 - PDRB sektor perdagangan
 - Persentase peningkatan investasi
 - Angka kemiskinan
 - Tingkat pengangguran
 - Indeks Ketahanan Pangan
 - Persentase peningkatan Desa Maju
- b. Indikator termasuk dalam kriteria penilaian **SEDANG** yaitu :
- Indeks Ketertiban dan Ketentraman
- c. Indikator termasuk dalam kriteria **Rendah** yaitu :
- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
 - Indeks SPBE
 - Peresentase Warisan Budaya yang Dilestarikan

2.3. Permasalahan Pembangunan dan Strategi Penanganan Masalah pada Tahun Berjalan

Setiap daerah memiliki permasalahan-permasalahan yang unik sebagai bagian dari tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga optimalisasi pembangunan daerah merupakan cerminan dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi setiap permasalahan yang ada. Penuntasan permasalahan merupakan esensi tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan merealisasikan tahapan demi tahapan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah mengingat permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks dan multi dimensional yang bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat teratasi dan dituntaskan dengan adanya kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tepat dan relevan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Oleh karena itu, penting adanya pengendalian dan evaluasi capaian kegiatan serta program sebagai bagian dari pemahaman tingkat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dimasa lalu untuk memecahkan setiap permasalahan pembangunan.

Identifikasi permasalahan dapat diverifikasi dari informasi dan kinerja yang telah dicapai sampai dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana tercantum pada bab gambaran umum kondisi daerah. Segala perbandingan perihal apa yang telah dicapai terhadap standar dan rencana atau dengan melakukan *benchmarking* dapat diketahui berbagai kinerja pembangunan yang masih harus diperbaiki. Selain itu, pemahaman berbagai faktor yang menyebabkan permasalahan pembangunan akan terdeteksi melalui kajian dan analisis indikator kinerja pemerintah.

Dari hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan, maka dirumuskan permasalahan utama Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Tabel 2.31
Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan masih tinggi meskipun sudah ada penurunan dari tahun sebelumnya tetapi belum sesuai target. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Penurunan kemiskinan Ekstrem dan <i>Stunting</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IPM masih dibawah capaian Provinsi dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan Kuantitas infrastruktur yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks RB belum sesuai dengan target. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reformasi Birokrasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 dan kestabilan Polhukhankam

a. Kemiskinan

Pada tahun 2022 Persentase jumlah penduduk miskin di Musi Rawas mengalami penurunan sebesar 13,34% dibanding tahun 2021 sebesar 13,89%(*data BPS Kab. Musi Rawas 2022*). Angka tersebut masih dibawah target dan masih akan diupayakan penanganannya secara komprehesnif yang melibatkan seluruh stakeholder. Khusus untuk kemiskinan ekstrem yang menjadi target pemerintah pada tahun 2024 sebesar 0% akan menjadi

focus rencana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dan telah dilakukan beberapa aksi untuk mewujudkan hal tersebut.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2022 sebesar 67,78 masih berada dibawah capaian provinsi dan capaian nasional, IPM Provinsi sebesar 70,9 dan IPM Nasional sebesar 72,91.

c. Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2022 mengalami peningkatan seperti pada infrastuktur jalan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, terlihat dari jalan dalam kondisi baik yang pada tahun 2021 sebesar 819,29 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 847,98 namun untuk jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 265,3 menjadi 261,73 km pada tahun 2022, hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, namun capaian tersebut belum merata pada seluruh desa di Kabupaten Musi Rawas karena keterbatasan kemampuan dan juga beberapa wilayah merupakan hutan kawasan yang perlu mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Selain jalan, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan stunting Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meningkatkan pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan dan air minum. Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan mengurangi ketertinggalan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus berupaya mengurangi wilayah-wilayah *blank spot* melalui infrastruktur komunikasi.

d. Tata Kelola Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks RB	55,62	54,90	98,71
2.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (70,60)	100,84
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51	59,56	73,07
4.	Indeks SPBE	2,95	1,92	65,08
5.	Indeks Profesionalitas ASN	62,92	59,95	95,27
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,04	92,41	104,96

Berdasarkan indikator penunjang tata kelola pemerintah pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 masih terdapat target indikator kinerja yang belum tercapai yakni Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target pada tahun 2022 sebesar 81,51% dengan realisasi sebesar 59,95% dan Indeks SPBE dengan target pada Tahun 2022 sebesar 2.95 dan realisasi sebesar 1.92.

2.3 Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan

sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisir, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

5. Kesetaraan gender.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.

6. Air bersih dan sanitasi layak.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.

7 Energi bersih dan terjangkau.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.

8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.

9 Industri, inovasi dan infrastruktur.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.

10. Berkurangnya kesenjangan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara.

11. Kota dan komunitas berkelanjutan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

13. Penanganan perubahan iklim.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 2.32 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs*.

Tabel 2.32

Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPDKabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPDKabupaten Musi Rawas
			3. Penyediaan Rumah layak huni 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan 5. Program Pemberdayaan masyarakat miskin
2	Tanpa adanya kelaparan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Jaringan Pengamanan Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Penyelenggaraan pendidikan nonformal • Pendidikan kejar paket
5	Kesetaraan gender.	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin rakyat

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPDKabupaten Musi Rawas
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana TIK
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Pembangunan sarana dan prasarana TIK • Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
13	Penanganan perubahan iklim	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPDKabupaten Musi Rawas
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Peningkatan reformasi birokrasi dan stabilitas polhukhankam	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Peningkatan kualitas SDM layanan Publik
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Peningkatan reformasi birokrasi dan stabilitas polhukhankam	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

2.2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

a) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Tabel 2.33

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Satuan	Target	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS	%	100	96.72%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	89.66%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	94.68%

Urusan Pendidikan selama tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 483.196.253.243,- dengan realisasi selesai Rp. 422.820.819.988, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.34

Alokasi Anggaran Tahun 2022

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
2022	483.196.253.243,00	422.820.819.988,00	87,50

b) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tabel 2.35

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
1	Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	95,64
2	Pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	90,05
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang	%	100	99,69

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
		mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.			
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	96,13
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	%	100	90,20
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun satu tahun	%	100	85,78
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang	%	100	89,39

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
		mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.			
8	Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 Tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	94,29
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	94,65
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah OGDJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	100

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Defenisi Operasional	Satuan	Target	Capaian
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	%	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus-HIV</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar diwilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	%	100	92,87

Urusan Kesehatan selama tahun 2022 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 193.165.142.791,- dengan realisasi sebesar Rp. 165.006.655.153, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.36
Alokasi Anggaran Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja operasi :	173.826.019.209	149.239.149.038	85,86
	- Belanja Pegawai	84.339.751.803	76.676.428.981	90,91
	- Belanja Barang dan Jasa	89.386.267.406	72.562.720.057	81,18
	- Belanja Hibah	100.000.000	0	0
2	Belanja Modal	19.339.123.582	15.767.506.115	81,53
	- Belanja modal peralatan dan mesin	13.361.202.782	9.815.675.815	73,46

	- Belanja modal Gedung dan bangunan	5.977.920.800	5.951.830.300	99,56
Total		193.165.142.791	165.006.655.153	85,42

c) Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pengairan Tahun 2021.

Tabel 2.37

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Satuan	Target	Capaian
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum			
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	99,03%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	99,15%

Dalam Tahun Anggaran 2022, Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan (DPUCKTRP) melaksanakan kegiatan APBD dengan dana sebesar Rp. Rp. 147.295.113.544,- Dengan realisasi sebesar Rp. 143.712.656.684,- Alokasi anggaran per jenis belanja pada DPUCKTRP dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.38
Alokasi anggaran Tahun 2022

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	68.807.820.847	66,511,292,760	96,65
	- Belanja Pegawai	12.645.698.947	12,161,148,441	98,85
	- Belanja Barang dan Jasa	56.162.121.900	54,350,144,319	96,19
2	Belanja Modal	78.487.292.697	77,201,363,924	98,36
TOTAL		147.295.113.544	143.712.656.684	97,57

d) Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

Tabel 2.39
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.	%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota	Jumlah warga negara terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi	%	100%	100%

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
		penyediaan rumah yang layak huni			

Bidang Perumahan Rakyat selama tahun 2022 telah mengalokasikan dana dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.40
Rincian Anggaran, Program Dan Kegiatan
Penerapan Dan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Cakupan pelayanan dasar rumah korban bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota sesuai standar	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	705.659.940	24.066.600

e) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Trantibumlinmas

Tabel 2.41

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Capaian			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Capaian
1	Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenterman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegak hukum perda dan perkada kabupaten/ Kota	100 %	1 tahun	81,48%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	1 Tahun	88,13%
3	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pecegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	1 Tahun	99,25%
4	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1 Tahun	89,33%
5	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana Kebakaran	100%	1 Tahun	92,00%

Alokasi anggaran tahun 2022 di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.42

Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Anggaran
	Pemeliharaan Ketentraman & Ketertiban Masyarakat			
1	Pelayanan pemeliharaan ketertiban umum, ketenterman masyarakat dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Keamanan Dan Ketertiban	-Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum - Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Rp. 132.530.100,-
2	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pencegahan Kebakaran	Program Pencegahan, Penganggungan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Rp. 76.457.700,-

f) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Realisasi Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Pada Dinas Sosial Tahun 2022

Tabel 2.43

Standar Pelayanan Minimal Dinas Sosial

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
	Bidang Rehabilitasi Sosial				
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;	Prosentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	Persentase (%) Anak Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100%	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Persentase (%) Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial yang memperoleh bantuan untuk	%	100	100

No	Standar pelayanan minimal (SPM)	Indikator	Satuan	Target	Capaian
		pemenuhan kebutuhan dasar			
	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial				
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.	Persentase (%) korban bencana daerah dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100

Tabel 2.44
Alokasi Anggaran Pelaksanaan SPM
Bidang Sosial Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Bidang Rehabilitasi Sosial			
	a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosia	Jumlah PMKS yang mendapatkan rehabilitasi di luar panti	940.076.400	734.009.800

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	54.112.30	54.068.800
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasa	166.163.100	118.721.550

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Musi Rawas.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 diselaraskan dengan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat Musi Rawas pasca pandemi *Corona Virus Disease 19* dengan mengedepankan upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, pembangunan sumber daya manusia dan

peningkatan penanaman modal. Pada Tahun 2024 ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan Tahun 2023 dengan tetap menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global dan sangat tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab itu asumsi perekonomian Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2024 memperhitungkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan nasional pada Tahun 2022 dan 2023.

3.1.1. Analisis Perekonomian Global

Proyeksi perekonomian Musi Rawas tahun mendatang tidak lepas dari kondisi ekonomi global, nasional dan provinsi. Pemerintah memperkirakan ketidakpastian masih mewarnai perekonomian global di 2024. Setidaknya ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi.

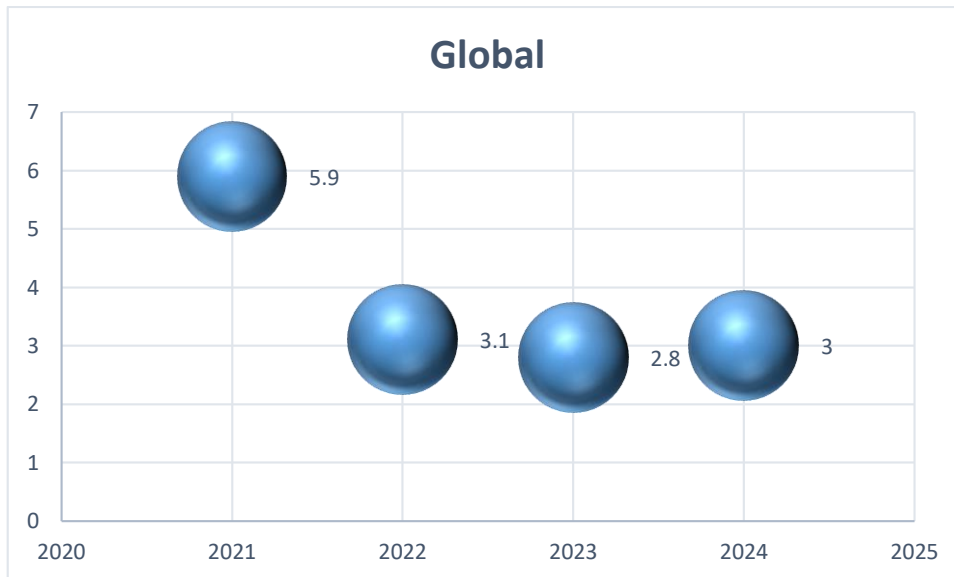
Tensi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan memanasnya hubungan dagang Amerika Serikat-Tiongkok menyebabkan kebijakan negara-negara besar cenderung “inward looking”. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Kondisi ini akhirnya berimbas pada penurunan volume perdagangan global sehingga laju pertumbuhan ekonomi dunia terhambat.

Di samping itu, tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan “higher for longer”. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga ‘cost of fund’ juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kendati cukup tertekan di 2023, perekonomian global diprediksi sedikit lebih meningkat di 2024 seiring normalisasi harga komoditas. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mengalami akselerasi dari sebelumnya 2,8% di tahun 2023

menjadi 3,0% di 2024. Pertumbuhan volume perdagangan dunia juga turut diperkirakan meningkat dari 2,4% di tahun 2023 menjadi 3,5% tahun 2024.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber : Kementerian Keunagan

3.1.2. Analisis Perekonomian Nasional

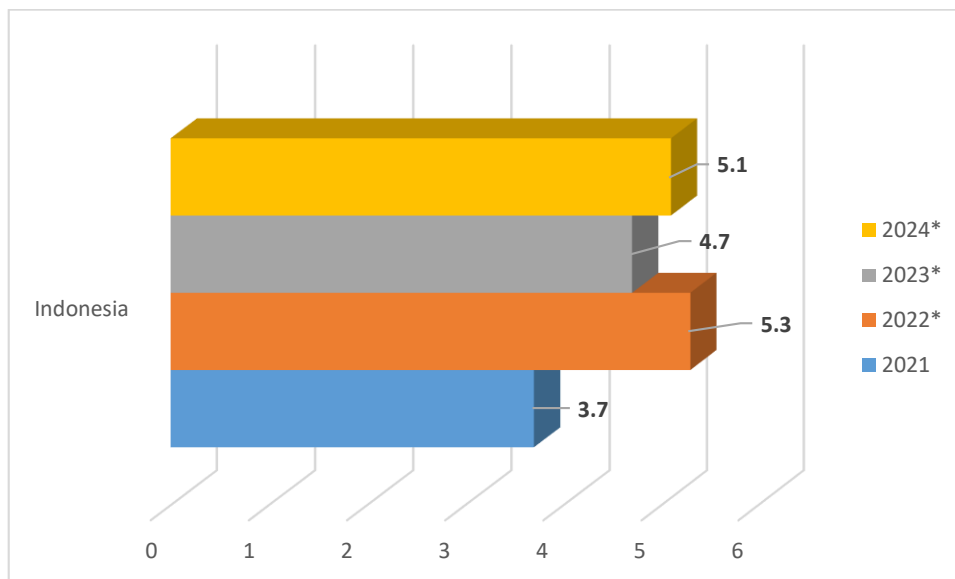
Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan

berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer)

Grafik 3.2

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia menurut



Sumber : Kemenkeu

3.1.3. Proyeksi Perekonomian Sumatera Selatan Tahun 2024

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I-2023 dibanding triwulan IV-2022 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,11 persen. Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami kontraksi terdalam sebesar 13,06 persen, diikuti oleh Jasa Pendidikan yang terkontraksi sebesar 8,08 persen; Jasa lainnya sebesar 5,93 persen; serta Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 4,48 persen. Sementara itu, Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,14 persen; diikuti oleh Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,96 persen; serta Industri Pengolahan sebesar 1,04 persen.

Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 25,83 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 18,01 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,65 persen. Peranan

ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Sumatera Selatan mencapai 57,49 persen.

Ekonomi Sumatera Selatan triwulan I-2023 Kontraksi terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh sebesar 1,19 persen. Komponen pengeluaran yang mengalami kontraksi tertinggi yaitu Komponen PK-P sebesar 47,82 persen. Hal ini disebabkan oleh menurunnya realisasi anggaran pengeluaran konsumsi pemerintah secara total (APBN, APBD, dan APBDesa) sebesar 61,48 persen, serta realisasi belanja modal pemerintah turun sebesar 60,15 persen. Selain itu, komponen pengeluaran lainnya yang mengalami kontraksi, yaitu Ekspor Luar Negeri sebesar 6,48 persen; Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,26 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 0,27 persen. Struktur PDRB Sumatera Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Sumatera Selatan masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Selatan yaitu sebesar 60,89 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 29,20 persen; Komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 18,60 persen; Komponen PK-P sebesar 3,65 persen; dan Komponen Komponen PK-LNPRT sebesar 1,40 persen. Sementara itu, Komponen Impor Luar Negeri sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 1,60 persen.

Mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan nasional serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan meningkat dengan inflasi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Perbaikan aktivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun lapangan usaha. Selanjutnya, perkembangan inflasi di tahun 2024 juga diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan

meningkat, didorong oleh inflasi pada seluruh kelompok yakni *volatile food*, *administered price*, dan *core inflation*.

Tabel 3.1
Proyeksi Pertumbuhan Sektor PDRB Sisi Lapangan Usaha
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 dan 2024 (%)

Sektor	2022	Proyeksi	
		2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,1-2,5	2,3-2,6	2,64
Pertambangan dan Penggalian	4,5-5,5	5,7-6,5	5,09
Industri Pengolahan	2,5-3,0	3,0-3,5	4,83
Pengadaan Listrik dan Gas	13,0-13,5	13,0-13,6	13,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,0-5,5	5,3-5,8	5,62
Konstruksi	0,5-1,0	1,0-1,5	-36,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,5-4,5	4,0-4,6	2,32
Transportasi dan Pergudangan	-1,5-1,0	2,5-3,0	-3,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,5-0,0	1,5-2,0	0,14
Informasi dan Komunikasi	12,5-13,5	12,5-13,5	13,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,5-2,0	1,5-2,0	1,78
Real Estate	2,6-3,4	3,5-4,5	4,34
Jasa Perusahaan	3,0-4,0	3,0-4,1	2,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,5-5,0	4,5-5,1	4,87
Jasa Pendidikan	2,0-2,5	2,0-2,6	1,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,0-7,5	7,0-7,5	7,11
Jasa lainnya	5,0-6,0	5,2-6,2	5,74

Sumber RPJMD Provinsi Sumsel Tahun 2018-2023

Dengan mempertimbangkan perkembangan faktor-faktor pendorong ekonomi Sumatera Selatan tersebut di atas, di proyeksikan pada tahun 2024 perekonomian Sumatera Selatan diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,8 – 6,5 persen dari 5,27 – 6,27 persen pada tahun 2023.

Secara keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sejalan dengan membaiknya prospek perekonomian domestik dan global.. Tren pemulihan sudah

mulai terlihat sejak dibukanya kembali beberapa sektor utama dari pertengahan tahun 2023, mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 akan tumbuh lebih tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, perbaikan permintaan global di beberapa negara yang sebaran virusnya mulai turun, mendorong kembalinya aktivitas manufaktur sehingga memberikan dampak positif kepada kinerja ekspor. Kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat dan menopang ekonomi tumbuh lebih tinggi. , terutama ekspor komoditi unggulan daerah seperti karet dan kelapa sawit.

Perekonomian Sumatera Selatan pada tahun 2024 dihadapkan pada faktor risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari proyeksi. Beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti kepastian implementasi vaksin yang belum terealisasi ke seluruh masyarakat, adanya risiko politik global yang berpengaruh kepada aktivitas perdagangan dan harga komoditas global, fenomena La Nina yang lebih buruk dari perkiraan, serta realisasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih tinggi dibandingkan dengan rencana.

Sementara itu, tekanan inflasi Sumatera Selatan di tahun 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, namun tetap berada di dalam kisaran target inflasi nasional. Meningkatnya tekanan inflasi tersebut diperkirakan terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok transportasi. Selain itu, inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga diperkirakan masih meningkat.

3.1.4. Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2024

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Secara keseluruhan tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kabupaten Musi Rawas diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup baik dibandingkan tahun

sebelumnya, dan diproyeksikan pada tahun 2024 akan mengalami kenaikan / pertumbuhan PDRB dari sisi Lapangan Usaha pada beberapa sektor berikut ini :

1. **Sektor Industri Pengolahan** diproyeksikan akan tumbuh seiring dengan adanya permintaan ekspor negara-negara yang mengalami perbaikan ekonomi pasca covid 19.
2. **Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, khusus pada tahun 2023 sebagian besar penduduk Indonesia merayakan dua hari besar agamanya.
3. **Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor**, diproyeksikan naik pada tahun 2023 dan akan terus mengalami pertumbuhan. Hal ini berkaitan dengan mulai pulihnya perekonomian dunia/global khususnya Negara-negara pengimpor hasil perkebunan seperti sawit dan karet, yang berdampak langsung terhadap pendapatan per kapita sebagian besar petani karet dan sawit di kabupaten Musi Rawas.
4. **Sektor Lapangan usaha konstruksi** diproyeksikan akan tumbuh yang disebabkan mulai berlanjutnya pembangunan infrastruktur baik yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional maupun pekerjaan umum lainnya, sejalan dengan tema pembangunan kabupaten Musi Rawas Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum.
5. **Sektor Real Estate**, dengan melemahnya perekonomian daerah khususnya pendapatan per kapita masyarakat maka permintaan pembangunan perumahan akan menurun.
6. **Sektor Jasa Perusahaan**, khususnya industri manufaktur akan mengalami penurunan produksi karena permintaan konsumen menurun walaupun tidak sampai berakibat mem PHK kan karyawan perusahaan.
7. **Sektor Jasa Pendidikan**, diproyeksikan perlahan-lahan akan pulih kembali seiring dengan berakhirnya masa pandemi, sehingga para siswa dapat mengikuti proses belajar di sekolah.

Tabel 3.2.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Musi Rawas Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019 – 2022 serta proyeksi pada Tahun 2023 dan 2024

Lapangan Usaha	Realisasi				Proyeksi	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,72	0,96	3,76	4.36	3,51	3,56
Pertambangan dan Penggalian	7,87	-0,92	-0,65	1.67	3,96	4,01
Industri Pengolahan	6,06	0,75	4,39	6.13	4,21	4,26
Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	13,10	6,56	6.96	10,21	10,26
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,05	5,46	0,23	3.14	9,9	9,95
Konstruksi	6,41	-1,44	1,30	2.94	4,88	4,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	-0,02	5,21	10.34	4,8	4,85
Transportasi dan Pergudangan	8,75	-4,57	1,92	7.57	2,57	2,62
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,74	-0,56	2,13	9.11	4,06	4,11
Informasi dan Komunikasi	8,09	15,10	8,38	8.74	13,22	13,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,46	1,57	1.93	2,53	2,58
Real Estate	7,47	1,05	3,04	4.96	3,42	3,47
Jasa Perusahaan	7,63	7,91	7,98	3.84	3,52	3,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,99	1,47	3.56	5,03	5,08
Jasa Pendidikan	7,95	0,35	4,69	4.71	4,79	4,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,09	6,48	8,12	4.33	7,31	7,36
Jasa lainnya	4,81	1,37	1,65	2.04	5,91	5,96
PDRB dengan Migas	5,88	0,24	2,33	4.06	5,50	5,55

Sumber :Data diolah

Mengacu pada proyeksi Tahun 2024 Nasional dan Provinsi serta mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRB tersebut di atas, maka

pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Musi Rawas diperkirakan tumbuh sekitar 5,50 persen dan 5,55 persen pada tahun 2024.

b. PDRB

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dari capaian PDRB baik dari sisi Lapangan Usaha maupun dari sisi Pengeluaran. Melalui pemberian stimulus dengan berbagai program maupun pembangunan fisik yang ikut membawa dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas serta peran serta Investasi Swasta dalam menggerakkan roda perekonomian. Selain itu fungsi lembaga perbankan sebagai intermediasi juga menunjukkan peningkatan kinerja sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Musi Rawas bisa berjalan dengan baik. Berikut ini, realisasi dan target PDRB Kabupaten Musi Rawas menurut sisi Lapangan Usaha :

Tabel 3.3.

PDRB Kabupaten Musi Rawas ADHB menurut Lapangan Usaha
Tahun 2017-2020 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.289,73	5.586,00	5.821,98	6094957,29	6,573.76	5949,03	6.887,64
Pertambangan dan Penggalian	5.520,96	6.206,80	5.944,77	6377853,58	7,162.01	6059,75	7.015,98
Industri Pengolahan	2.365,01	2.571,30	2.705,27	2885814,13	3,071.55	2869,59	3.322,41
Pengadaan Listrik dan Gas	4,81	5,00	5,74	6242,4	6,78	36,36	42,10
Pengadaan Air, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,37	1,50	1,58	1605,61	1,66	31,18	36,10
Konstruksi	1.061,48	1.138,90	1.109,63	1153041,72	1,211.411	1188,82	1.376,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.528,12	1.700,90	1.793,01	1901675,17	2,188.09	1989,42	2.303,35

Lapangan Usaha	Realisasi					Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transportasi dan Pergudangan	82,10	91,10	88,13	89987,64	100.84	116,37	134,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	57,84	65,90	66,71	68438,19	75.94	95,60	110,69
Informasi dan Komunikasi	56,26	62,10	72,69	79580,12	86.63	103,65	120,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	119,30	126,10	123,80	127611,77	133.58	152,62	176,70
Real Estate	240,44	268,40	279,17	285832,73	301.06	307,75	356,31
Jasa Perusahaan	3,14	3,60	3,95	4284,99	4.54	34,42	39,85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382,06	391,00	407,30	414431,94	436.12	435,27	503,96
asa Pendidikan	487,35	531,06	527,47	555730,29	597.83	556,28	644,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	122,73	131,60	146,79	555730,29	169.94	252,31	292,12
Jasa lainnya	177,23	195,20	205,45	210777,07	220.32	233,60	270,46
PDRB Dengan Migas	17.499,94	19.076,90	19.303,45	20418194,7	22,342.11	21.262,02	23.632,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas (2018-2022)
Proyeksi 2023-2024 (data diolah)

c. Pengangguran

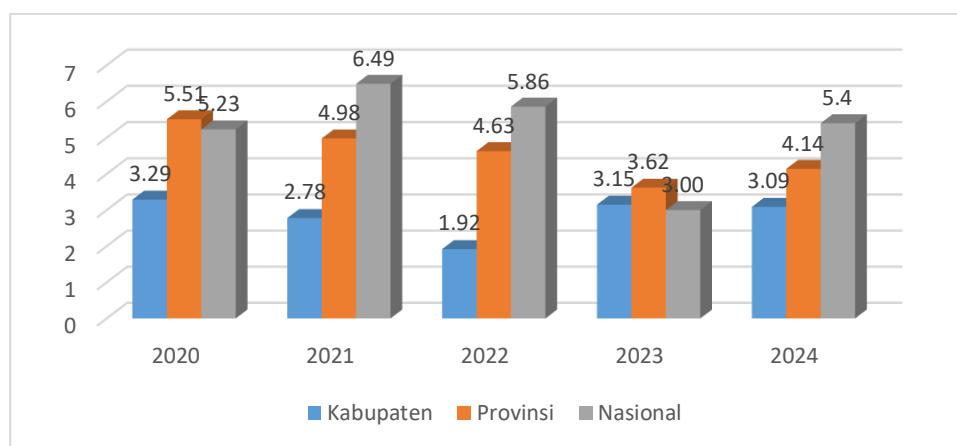
Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor alternatif (pertanian).

Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas tahun 2022 diperkirakan pada tahun 2024 akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (confidence) dan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

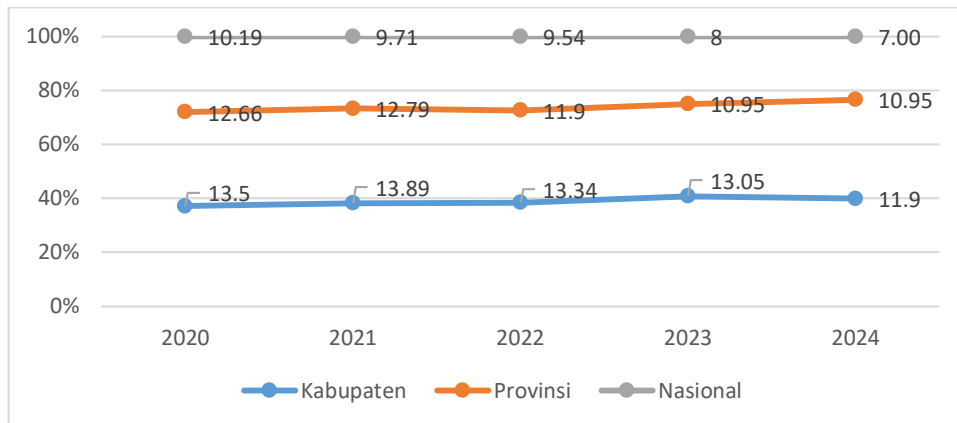
Grafik 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2022 dan target Tahun 2023-2024



d. Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas masih jauh di bawah Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional, pencapaian pada tahun 2022 sebesar 13,34% hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas berkurang 0,55 % dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 13,89 % dan diproyeksikan akan turun menjadi 11,9 % pada tahun 2024.

Grafik 3.7
Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Musi Rawas
Tahun 200-2022 dan Target Proyeksi Tahun 2023-2024



Sumber: BPS, RPJMD Musi Rawas 2016-2021, RPJMD Sumatera Selatan 2018-2023, RPJMN Tahun 2019-2024 (tahun 2023-2024 data diolah)

Setelah terjadinya wabah Pandemi Covid, tentu akan berdampak pada angka kemiskinan secara nasional, regional (provinsi maupun kabupaten) khususnya Kabupaten Musi Rawas.

3.1.5 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas tidak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah secara makro, maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian perekonomian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi			
	a. Range		4,5%-5,5%	4,8 %-5,8 %
	b. Moderat	4,06	5,5 %	5,55 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas			
	* PDRB (ADHB menurut LU/ Milyar Rupiah)	22,342.11	21.262,02	23.632,89
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,78	68,1	68,8
4	Kemiskinan	13,34	13,05	11, 9 -12, 32
,5	Tingkat Pengangguran	1,92	2,75	1,92

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 5 - 6 persen untuk Tahun 2024. PDRB akan dipacu di Tahun 2024 hingga mencapai 23.632.520 (milyar rupiah). Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada Tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas ditargetkan menurun sampai pada angka **11,9** persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada Tahun 2024, TPT akan berada pada angka **1,92** persen. Secara sektoral, sektor primer diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas. Untuk sektor sekunder dan sektor tersier diperkirakan juga masih akan memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Kabupaten Musi Rawas. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi komponen-komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Kabupaten Musi Rawas tetap stabil dan investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil.

Untuk mencapai target ekonomi makro yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk memperkuat sektor-sektor strategis yang ada di daerah seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan Sektor-sektor Strategis

No	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produktivitas komoditi unggulan daerah; • Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi; • Penataan kelembagaan tani; • Percepatan pembentukan food estate;
2.	Pengembangan Industri Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi; • Penerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produk • Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk hasil pertanian; • Melakukan labelisasi pada produk unggulan UMKM daerah.
3.	Meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mutu infrastruktur dikawasan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produk; • Pembangunan Infrastruktur TIK.
4.	Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kawasan agropolitan center; • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan.

Tabel 3.6.
Strategi Dan Arah Kebijakan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi (Sisi pengeluaran)

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan konsumsi rumah tangga	<p>Menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan pemulihan ekonomi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi masyarakat; • Memperkuat sistem kesehatan masyarakat;

		<ul style="list-style-type: none"> Updating data masyarakat penerima bantuan, khususnya warga kurang mampu. Seperti bantuan BLT, PKH
2	Peningkatan konsumsi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industri pengolahan; Efektivitas penyaluran dan KUR;
3	Peningkatan investasi	<ul style="list-style-type: none"> Efisiensi belanja daerah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
4	Ekspor	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan daya saing produk unggulan.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan, peluang dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas maka Fokus Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Pengentasan Desa Tertinggal
3. Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa
4. Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa
5. Peningkatan Kondisi Infrastruktur Kecamatan dan Desa
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah
8. Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan Persentase Belanja Modal
9. Fokus Pada Program Prioritas (Program Nyata dalam RPJMD 2021-2026)
10. Penyederhanaan Jenis Program dan Kegiatan pada Perangkat Daerah

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 juga akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagai kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pada industri, pariwisata, investasi dan penguatan sistem kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

infrastruktur, pengentasan kemiskinan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintah maka kebijakan ekonomi pada RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diarahkan ***Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum***

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur melalui proses analisis secara efektif untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Upaya yang digunakan untuk memenuhi target pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyerderhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*. Kebijakan umum pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah guna

membayai pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, agar dapat semaksimal mungkin dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan terukur secara nasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, upaya-upaya penting yang terus dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD tersebut adalah :

1. Menghitung kembali PAD secara riil, khususnya pada sumber-sumber pendapatan tertentu dalam kerangka ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan PAD, baik sumber-sumber retribusi daerah maupun pajak.
2. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat ekonomis dan rasional dengan merangsang pertumbuhan potensi perekonomian daerah.
3. Optimalisasi peran BUMD guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta dapat memberikan kontribusinya secara signifikan terhadap peningkatan PAD.
4. Mempelajari kemungkinan meningkatkan pendapatan melalui penjualan jasa-jasa publik.
5. Menyempurnakan administrasi penerimaan pendapatan daerah dan meningkatkan pengendalian pendapatan daerah untuk menjamin efektivitas pengumpulan pendapatan.

Sedangkan, upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pendapatan daerah, antara lain melalui penyampaian akurasi data maupun penyusunan kegiatan prioritas yang berskala nasional dan regional.
2. Pengusulan kegiatan khusus dan strategis dalam skala daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.7

Realisasi Pendapatan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	Realisasi (Rp)				
		2018	2019	2020	2021	2022
	PENDAPATAN DAERAH	1.703.507.636.928,00	1.920.259.977,68	1.809.795.136.717,68	1.939.565.577.829,13	1.967.804.626.660.20
1	Pendapatan Asli Daerah	123.015.681.089,00	128.563.715.132,68	169.757.910.843,75	169.805.313.539,73	138.977.052.926.79
2	Pendapatan Transfer	1.524.153.855.430,00	1.740.394.017.310,35	1.567.941.384.656,93	1.706.834.606.689,40	1.816.960.392.689.41
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	56.338.100.400,00	51.302.245.069,00	72.155.841.217,00	62.925.657.600,00	11.867.181.044.00

Tabel 3.8
Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024

No	Uraian	APBD TA. 2023	PROYEKSI APBD TA. 2024
1	2		4
	PENDAPATAN DAERAH	1.461.438.980.282,00	1.737.289.065.519
1.	Pendapatan Asli Daerah	299.824.835.942,00	235.746.099.084,98
1.1.	Pajak Daerah	185.293.398.374,00	131.601.016.413,00
1.2.	Retribusi Daerah	5.177.281.000,00	4.120.705.808,00
1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	7.000.000.000,00
1.4.	Lain-lain PAD yang sah	101.354.156.568,00	93.024.376.863,98
2.	Pendapatan Transfer	1.161.614.144.340,00	1.501.542.966.434,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.079.794.305.000,00	1.408.950.568.000,00
2.2	Transfer Antar Daerah	81.819.839.340,00	92.592.398.434,00
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00
3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0

Sumber : BPKAD 2023

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa pendapatan daerah Tahun 2024 diproyeksikan meningkat dari pendapatan di Tahun 2023. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 disesuaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan mengikuti ketentuan perundangan berlaku. Belanja daerah disusun untuk mendanai

pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah di arahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Bupati Musi Rawas. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut.

a. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja

Anggaran yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Berikut ini pelaksanaan terkait dengan efisiensi dan efektifitas belanja daerah :

1. Memperbaiki komposisi dan efisiensi belanja dengan peningkatan efisiensi belanja dengan penajaman nomenklatur belanja (jelas peruntukannya, penyederhanaan jenis program dan kegiatan dan menghindari duplikasi.
2. Memperkenalkan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi, serta spasial untuk meningkatkan kualitas belanja
3. Menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat Daerah maupun program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran.
4. Pengurangan persentase belanja operasional dan peningkatan persentase belanja langsung.

b. Prioritas Anggaran

Prioritas penggunaan anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan dalam memenuhi tema pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 yaitu **Peningkatan ketahanan ekonomi, stabilitas keamanan dan ketertiban umum**. Terutama dalam hal pemulihan ekonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penanggulangan stunting serta mendukung kegiatan pelayanan publik untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum dalam rangka Pilpres, Pemilu maupun Pilkada serentak pada tahun 2024.

c. Pengoptimalan belanja modal

Belanja modal diupayakan dengan tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan. Bentuk optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik dengan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan berlaku.

d. Transparansi dan Akuntabel

Transparansi dan akuntabel setiap pengeluaran belanja harus dengan pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku. Pelaporan pertanggungjawaban harus memenuhi aspek administrasi dan juga menyangkut proses keluaran dan hasil harus jelas.

Tabel 3.9

Rencana Struktur Belanja Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2023 dan Proyeksi Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Belanja	
		APBD TA. 2023	Proyeksi APBD TA. 2024
	BELANJA DAERAH	1.471.438.980.282,00	1.747.289.065.519,00
1.	Belanja Operasi	984.856.132.109,00	1.139.803.087.512,00
a.	Belanja Pegawai	606.911.775.180,00	639.422.057.844,50
b.	Belanja Barang dan Jasa	363.919.842.929,00	420.517.863.917,50
c.	Belanja Bunga	-	-

No	Uraian	Belanja	
		APBD TA. 2023	Proyeksi APBD TA. 2024
d.	Belanja Subsidi	-	-
e.	Belanja Hibah	14.024.514.000,00	79.863.165.750,00
f.	Belanja Bantuan Sosial	-	-
2.	Belanja Modal	180.210.456.635,00	308.130.988.385,00
3.	Belanja Tidak Terduga	16.311.011.400,00	12.000.000.000,00
4.	Belanja Transfer	290.061.380.138,00	287.354.989.622,00
a.	Belanja Bagi Hasil	19.047.067.938,00	13.572.172.222,00
b.	Belanja Bantuan Keuangan	271.014.312.200,00	273.782.817.400,00

Sumber : Data Diolah

Berikut uraian dari Struktur Belanja dan Pengeluaran Wajib Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

- 1) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU Tahun Anggaran 2023 serta memperhitungkan penganggaran gaji ke-13 dan ke-14.
- 2) Penganggaran Tambahan Penghasilan, Tunjangan Kinerja Daerah atau Tunjangan Beban Kerja PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriterianya ditentukan dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana di atur oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 % dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Nasional (BPJS) serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Sosial.

- 5) Tunjangan Beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER-3/PB/2015 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang, bahwa pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada PNS ditetapkan sebesar Rp. 8.047,00 per kilogram;
- 6) Penganggaran untuk Tunjangan Jabatan Fungsional dirinci secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan jabatan fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 7). Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
- 8 Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah.

Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pada jenis belanja barang/jasa ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Sehingga terhadap penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga

lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun pihak ketiga dianggarkan pada belanja barang dan jasa dimaksud.

2. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa barang persediaan tahun sebelumnya.
3. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
4. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Permenkeu No. 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah menerapkan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*). Standar satuan harga perjalanan dinas selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan SDM yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.

6. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
7. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014.
8. Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 bahwa Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk tahun 2024 pemerintah kabupaten Musi Rawas akan mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak, baik itu Pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II, DPD RI), pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (gubernur dan bupati). Penganggaran akan dilaksanakan dengan mekanisme hibah melalui Badan Kesbangpol yang diperuntukan untuk komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Musi Rawas, sebesar 60% dari Naskah Perjanjian Pemberian Hibah Daerah (NPHD). Selain itu, untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu serentak juga akan diberikan hibah untuk menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah melalui hibah yang diberikan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Musi Rawas dan Kamandi Distrik Militer 0406 Lubuk Linggau.

2. Belanja Modal

- a. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standar barang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.
- b. Kemudian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

4. Belanja Transfer

Penetapan belanja transfer dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan target pendapatan pada Tahun Anggaran 2023, belanja transfer direncanakan terdiri dari :

- Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Dana Desa yang berasal dari APBN, Alokasi Dana Desa dan bantuan partai politik.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dalam Struktur APBD selain komponen Pendapatan dan Belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan Pembiayaan daerah serta kebijakan dan Rencana

Pengeluaran Pembiayaan daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
2. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost sharing* antara Pemerintah Pusat dan Provinsi ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Transfer dari dana cadangan daerah, pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
4. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga seperti : Piutang terhadap Provinsi terkait dana bagi hasil Provinsi.
5. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di pisahkan.

Tabel 3.10
Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah	
		APBD TA. 2023	Proyeksi TA. 2024
	PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000	10.000.000.000
1	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran(SiLPA) tahun sebelumnya	10.000.000.000	10.000.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman	-	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-
2	Pengeluaran pembiayaan	-	-
2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-
2.3	Pembayaran pokok utang	-	-
2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-

Dari rencana pendapatan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 1.737.289.065.519** dan rencana pembiayaan sebesar **Rp. 10.000.000** karena penerimaan pembiayaan berimbang dengan pengeluaran pembiayaan, direncanakan akan di alokasikan untuk belanja sebesar **Rp. 1.747.289.065.519,00**.

6. Pendanaan Pembangunan yang berasal dari dana Non APBN

Selain dana yang bersumber dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pendanaan pembangunan di Musi Rawas juga didukung oleh Sumber Dana yang lain yaitu dana dari lembaga non pemerintah (NGO), maupun dari dana partisipasi social perusahaan (CSR), dana CSR tersebut dikoordinir melalui forum CSR yang dibentuk oleh pemerintah kabupaten Musi Rawas yang berfungsi untuk mengkoordinasikan lokus dan jenis pembiayaan pembangunan yang akan didanai oleh perusahaan (CSR).

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas melalui penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat keutamaan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 ini merupakan pelaksanaan periode ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan capaian kinerja RPJMD, identifikasi isu strategis, permasalahan dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta permasalahan-permasalahan yang mendesak. Disamping hal tersebut di atas, dalam penentuan prioritas pembangunan seharusnya juga memperhatikan sasaran pembangunan

nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2024, RKPD Kabupaten Musi Rawas mengacu mempertimbangkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Musi Rawas didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai di Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.1
Keterkaitan Misi dan Tujuan Pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan
1	2	3
1	Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi informasi	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemenuhan pelayanan publik
2	Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing dan berkualitas 2. Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal
3	Pemerataan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur 2. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana
4	Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan 2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat 3. Meningkatnya pembangunan masyarakat desa

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 terdapat 21 (dua puluh satu) Sasaran Pembangunan yang di terjemahkan dalam bentuk prioritas daerah, yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, dalam menjabarkan program dan kegiatan Tahun 2024. Selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Sasaran pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target 2024
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas birokrasi	1. Indeks RB	60,12
		2. Nilai SAKIP	BB (72,03)
		3. IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,54
2	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	1. Indeks SPBE	3,5
		2. Indeks Profesionalitas ASN	68,76
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,06
4	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,83
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,8
6	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,45
		2. Indeks Pembangunan Pemuda	Madya
		3. Status Kabupaten Layak Anak	745 Madya
7	Terwujudnya Ketertiban, Keamanan, Ketentraman dan Kenyamanan Masyarakat	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	98%
8	Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks kerukunan umat beragama	76%
9	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan kearifan dan kebudayaan lokal	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	74

No.	Sasaran	Indikator	Target 2024
		2. Indeks Budaya Literasi Daerah	31
10	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Persentase konektivitas antar wilayah	94,06
11	Kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infastruktur Dasar	97,5
		Indeks Sumber Daya Air	60
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,99
13	Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	98
14	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	53,57
15	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.301,9 milyar
16	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1773,16 milyar
		PDRB sektor perdagangan	Rp 1060,3 milyar
17	Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	14
18	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	11,9
19	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,09
20	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,44
21	Persentase peningkatan desa maju	Persentase peningkatan Desa Maju	45,69

4.2. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

RKPD Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maka pemerintah daerah perlu untuk menetapkan tema pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2024 guna mendukung prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Tema pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2024 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah ” **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” Sedangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tertuang dalam arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah “**Peningkatan Reformasi Birokrasi dan**

Ekonomi Kerakyatan". Selanjutnya dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022, arah kebijakan RKP 2024, arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, maka permasalahan di Kabupaten Musi Rawas, serta kerangka RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dirumuskan didalam tema RKPD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yaitu :

“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum ”

Pasca pandemi Covid-19 pertumbuhan ekonomi global yang berkontraksi pada tahun ini menandakan semakin dalamnya ketidakpastian ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi Rawas, maka Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam perencanaan pembangunan tahun 2024 akan fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketahanan Ekonomi
2. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Umum

Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan daerah di atas dapat diimplementasikan dengan gambaran kondisi yang diperlukan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia.

Adapun keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional, Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dan Tema Pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Keselarasan Tema Pembangunan RKP Nasional Tahun 2024 dan Tema Pembangunan
RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan Tema Pembangunan Musi
Rawas Tahun 2024

RKP Nasional	RKPD Musi Rawas	RKPD Sumatera Selatan
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum”	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan

Keselarasn tema pembangunan antara RKPD Musi Rawas dengan Prioritas Nasional yang pertama **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah memiliki kata kunci **“Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”**

Adanya rencana “Peningkatan Ketahanan Ekonomi ” sesuai dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dan dilatarbelakangi oleh tingkat capaian target pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan pada tahun 2022 , belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

4.3 Telaah Terhadap Dokumen Perencanaan Untuk Penentuan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun sebelumnya, dan memperhatikan pokok-pokok pikir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akandihadapi Musi Rawas pada Tahun 2024.

4.3.1. Telaah Terhadap RKP 2024

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasardalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah. Perencanaan pembangunan nasional Tahun 2024 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020 – 2024.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan 2005-2025 adalah **“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”**, maka tujuan RPJPN Tahap ke-4 Tahun 2020-2024 diarahkan kepada **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”**.

Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Kelembagaan politik dan hukum.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif.
4. Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan pada RPJPN maka tema pada RPJMN 2020-2024 adalah **“Indonesia Berpenghasilan Menengah–Tinggi Yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”** yang didukung dengan :

1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Karakter Bangsa
3. Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas
4. Pengembangan Wilayah Untuk Pemerataan
5. Infrastruktur Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Selanjutnya berdasarkan RPJPN dan RPJMN 2020-2024 maka ditetapkan tema RKP Tahun 2024 yang didukung dengan 7(tujuh) Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri dari:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun LH, memperkuat ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik;

4.3.2. Telaah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Pada tahun 2024 tema RKPD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai, berikut:

“ Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan ”

Dalam kaitan itu, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 terdiri dari:

1. Meningkatkan reformasi birokrasi dan trantibum
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas hidup hidup dan pengelolaan bencana

4.3.3. Telaah Terhadap pemenuhan janji Kepala Daerah pada saat kampanye yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021– 2026

Sesuai dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas yang telah lalu, telah dituangkan kedalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 melalui visi dan misi RPJMD. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Musi Rawas Yang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB)”

Makna visi tersebut adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas maju dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan

masyarakat bermartabat”. Adapun pengertian dari akronim “*Musi Rawas Maju, Mandiri dan Bermartabat (Mantab)*” adalah sebagai berikut:

Musi Rawas : Yaitu merefleksikan seluruh wilayah dan isi Kabupaten Musi Rawas. Artinya Kabupaten Musi Rawas dan seluruh masyarakat yang berada dan tercatat dalam wilayah administratif Kabupaten Musi Rawas.

Maju : Yaitu kondisi masyarakat yang terus bergerak menuju kearah yang lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, lebih sejahtera dan religius, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta adanya perhatian utama pada terpenuhinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya dan ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia (religius).

- Mandiri** : adalah kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan. Selain itu ditandai oleh (bersifat) mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) produk-produk yang mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya) serta menguntungkan dan mampu menghasilkan secara terus menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru secara berkisambungan. Mandiri juga ditandai dengan kecukupan ruang untuk hidup dan berkembang, kecukupan pangan, fasilitas peribadatan, pengelolaan air bersih, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas kebugaran, fasilitas transportasi, keselamatan permukiman/kota, pengelolaan air kotor dan drainase serta sanitasi layak, fasilitas pejalan kaki, ruang terbuka hijau, fasilitas untuk semua penduduk dan informasi pembangunan dan keterlibatan masyarakat serta wilayah dengan keseimbangan antara fisik-infrastruktur dan alam yang lestari, kemajuan perekonomian serta sosial budaya.
- Bermartabat** : yaitu Masyarakat Musi Rawas menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan beretika termasuk didalamnya ramah sebagai ciri khas Musi Rawas.

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026, ditetapkan menjadi 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi;
2. Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas
3. Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
4. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat.

Tabel 4.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2024)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas birokrasi	Indeks RB	60,12
					Nilai SAKIP	BB (72,03)
					Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	81,54
				Meningkatnya Kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	3,5
					Indeks Profesionalitas ASN	68,76
Meningkatnya pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,06				
2.	Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berdaya Saing dan berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya Derajat Pendidikan	Indeks Pendidikan	69,83
				Meningkatnya Derajat Kesehatan	Indeks kesehatan	79,8
				Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan pemuda serta perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,45
					Indeks Pembangunan Pemuda	Madya
					Status Kabupaten Layak Anak	745 Madya
Memantapkan kehidupan masyarakat yang religius	Indeks Demokrasi	Terwujudnya Ketertiban,	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	98%		

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2024)
1	2	3	4	5	6	7
		dan aman serta menjunjung tinggi nilai kearifan lokal		keamanan, Ketentraman dan kenyamanan masyarakat		
				Terwujudnya keimanan dan kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	93%
				Meningkatnya pelestarian dan pengembangan nilai kearifan dan kebudayaan lokal	Persentase Lembaga Adat yang Aktif	76
					Indeks Literasi Budaya membaca	31
3.	Pemerataan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase Konektivitas Antar Wilayah (%)	94,06
				Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar (Ciptakarya, Kelistrikan, Pemukiman, Pengairan)	Indeks Infrastruktur dasar	97,5
		Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, penataan ruang dan ketahanan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	IKLH	70,99
				Meningkatnya penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	98
				Meningkatnya	Indeks Penurunan Dampak	53,57

No	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian (2024)
1	2	3	4	5	6	7
				kesiapsiagaan dan penanganan penanggulangan bencana	resiko Bencana	
4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	PDRB Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	PDRB sektor pertanian	Rp 6.301,9 milyar
				Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	PDRB sektor Industri	Rp 1773,16 milyar
					PDRB sektor perdagangan	Rp 1060,3 milyar
				Meningkatnya realisasi investasi Di Kabupaten Musi Rawas	Persentase peningkatan investasi	14
		Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran perkapita	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan	11,9
				Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran	3,09
				Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78,44
Meningkatnya Pembangunan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya status desa	Persentase peningkatan Desa Maju	45,69		

4.3.4. Telaah Terhadap Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas

Sesuai dengan pasal Pasal 78 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, salah satu perumusan rancangan awal RKPD adalah penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten.

Pokok-Pokok Pikiran ini memiliki nilai yang strategis karena menjadi pertimbangan dalam merumuskan permasalahan daerah, sehingga diharapkan dapat memiliki kontribusi positif dalam menyempurnakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas di masa yang akan datang. Penyusunan ini sekaligus merupakan penyaluran dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses maupun komunikasi dengan masyarakat pada berbagai event kegiatan sosial kemasyarakatan. Penyusunan pokok-pokok pikiran ini sebagai bagian dari strategi mewujudkan visi dan misi Kabupaten Musi Rawas sehingga diupayakan memiliki keselarasan dan kesinambungan dengan RKPD 2024 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk tahun 2024 terdapat 411 Usulan Kegiatan, yang rata-rata berasal dari bidang Infrastruktur di tingkat Desa yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah desa, meskipun ada beberapa usulan yang menjadi kewenangan Kabupaten, usulan tersebut sudah di verifikasi oleh OPD teknis, untuk menentukan kelayakannya dalam pembangunan Tahun 2024.

4.3.5. Telaah Terhadap Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Evaluasi terhadap RKPD tahun sebelumnya dilakukan terhadap tiga aspek yaitu :

a. Evaluasi terhadap capaian indikator makro RKPD tahun sebelumnya:

Ada beberapa indikator makro yang capaiannya perlu ditingkatkan yaitu “ **Angka Kemiskinan**”. Sejak tahun 2020 angka kemiskinan terus mengalami kenaikan,

akibat Pandemi Covid 19 sehingga penduduk dengan pengeluaran per kapita dibawah garis kemiskinan Kabupaten Musi Rawas yaitu Rp. 504.598,- sekitar 37.750 jiwa atau 19,47 %. Tentunya saja masih sangat sulit untuk mencapai target “**Satudigit**” sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Provinsi yaitu Angka Kemiskinan Satu Digit sehingga diperlukan upaya yang maksimal dari OPD dan pihak-pihak terkait agar capaian kinerjanya dapat meningkat dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Indikator Sasaran RKPD tahun sebelumnya

Beberapa indikator yang capaian kinerjanya kurang dari 75%, antara lain yaitu:

1. Indeks Ketertiban dan Ketentraman yang capaian kinerjanya 80,35%.
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang capaian kinerjanya 73,07%.
3. Indeks SPBE yang capaian kinerjanya 65,08%.
4. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan yang capaian kinerjanya 68,29%.

Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 terdiri dari kriteria Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah dan Sangat Rendah. Secara Umum Capaian Kinerja Pemerintah Sangat Tinggi dan Tinggi. Namun ada beberapa indikator yang masih termasuk dalam kriteria rendah, hal ini dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden /Peraturan Pemerintah maupun Menteri yang disertakan dengan kebijakan-kebijakan terkait Pandemi Covid 19 menyebabkan pembatasan terhadap aktivitas/ kegiatan diluar rumah seperti : aktivitas sekolah dilakukan melalui daring, penutupan objek wisata mengakibatkan capaian kinerja menjadi sangat rendah.

c. Evaluasi Pelaksanaan terhadap Program RKPD Tahun 2022 dan Realisasi Fisik mencapai 96,94 % dan Realisasi Keuangan mencapai 91,39% atau termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi** (berdasarkan data LKPJ Kabupaten Musi Rawas per Desember 2022/dalam proses).

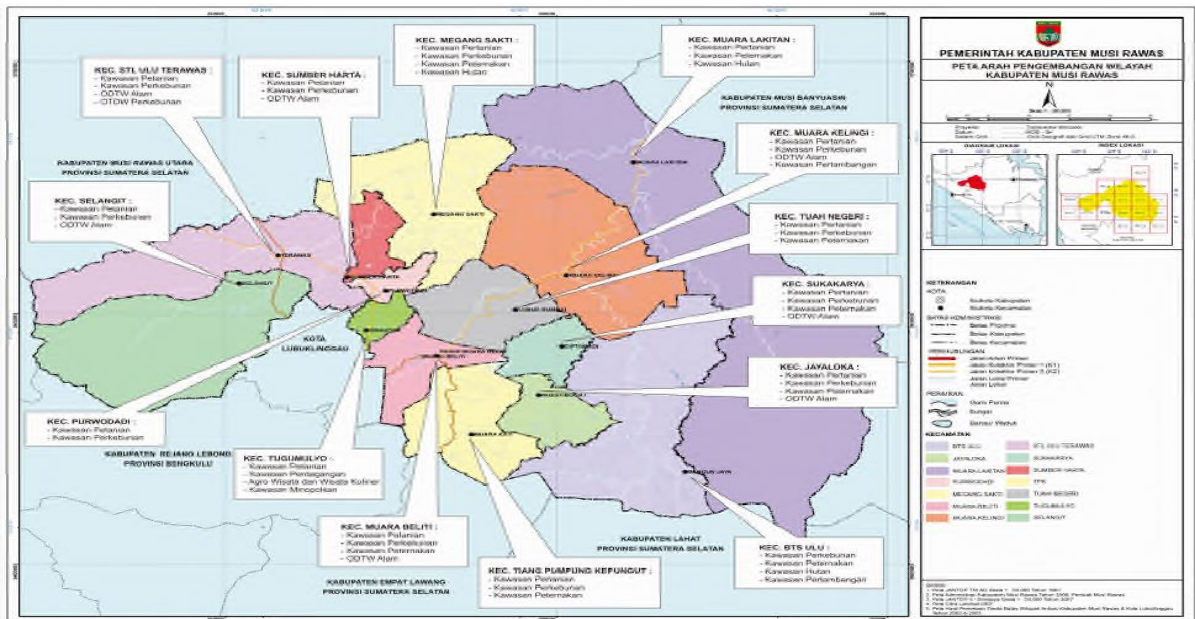
4.3.6. Telaah Terhadap RTRW Kabupaten Musi Rawas

Strategi dan prioritas pembangunan disusun agar mencapai tujuan dan hasil yang terukur dalam hal melaksanakan kegiatan di daerah agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan prioritas pembangunan serta strategi yang ditempuh, maka arah kebijakan pembangunan wilayah diupayakan untuk melakukan percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong pembangunan wilayah di setiap kecamatan sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Dalam hal mewujudkan visi dan pelaksanaan misi dan prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

Gambar 4.1.

Peta Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Musi Rawas



Dalam konstelasi RTRW, Muara Beliti sebagai ibukota Kabupaten Musi Rawas berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Mengacu pada kebijakan pembangunan Kabupaten Musi Rawas yang tertuang dalam RPJMD, Muara Beliti berperan sebagai pusat agropolitan (*agropolitan centre*). Berdasarkan rencana sruktur ruang, sistem pusat permukiman Kabupaten Musi Rawas terdiri dari Muara

Beliti sebagai PKL dan pada jenjang berikutnya terdapat pusat pelayanan yang sekaligus menjadi sub pusat agropolitan (*agropolitan district*) yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Simpang Semambang dan Muara Lakitan. Sedangkan ibukota kecamatan lainnya diarahkan sebagai sub pusat pelayanan bagi wilayah kecamatan masing-masing. Dengan demikian diharapkan tercipta suatu struktur ruang yang efektif dan efisien dimana Kota Muara Beliti menjadi pusat agropolitan yang akan melayani 4 sub pusat agropolitan dan masing-masing sub pusat akan menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah *hinterland*. Agar struktur tersebut dapat terwujud dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Pembangunan pusat pemerintahan dan pusat agropolitan di Muara Beliti yang terdiri dari :
 - a. Pembangunan infrastruktur kawasan perkantoran, pusat perdagangan dan jasa serta pusat agropolitan berupa sistem jaringan jalan, listrik, drainase, air minum dan telekomunikasi.
 - b. Pembangunan bangunan utama perkantoran, pusat perdagangan dan bangunan pendukung kegiatan agropolitan.
 - c. Pembangunan pemukiman perkotaan, fasilitas sosial, ekonomi dan budaya, serta RTH untuk mendukung fungsi pusat perkotaan dengan pelayanan skala kabupaten.
 - d. Muara Beliti yang berfungsi sebagai *Agropolitan Center (AC)* didukung dengan pembangunan Terminal Peti Kemas di desa Durian Remuk dan Pergudangan.
- 2). Pembangunan Sub Pusat Agropolitan atau Pusat Pelayanan pada 4(empat) lokasi yaitu Simpang Terawas, Megang Sakti, Muara Lakitan dan Simpang Semambang berupa :
 - a. Sub Terminal Agropolitan.
 - b. Kawasan pertokoan/ruko.
 - c. Perkantoran untuk jasa dan keuangan.
 - d. Sub Terminal Penumpang.
 - e. Permukiman perkotaan.
 - f. Industri agro.

- g. Workshop dan fasilitas pendukung kegiatan agropolitan.
- 3). Pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung terbangunnya sistem perkotaan dan agropolitan, yaitu :
 - a. Jalan kolektor yang menghubungkan pusat agropolitan Muara Belitidengan sub pusat agropolitan dan antar sub pusat agropolitan.
 - b. Pembangunan sistem pengairan berupa Bendung Daerah Irigasi (DI) Lakitan, DI Kelingi, DI Megang Tikip, dan DI lainnya, dengan sistem jaringan irigasi untuk kecamatan yang telah dan akan dikembangkan pertanian padi-sawah seperti Tugumulyo, Muara Beliti, Purwodadi, Sumber Harta, STL Ulu Terawas, dan Megang Sakti.
 - c. Pembangunan infrastruktur strategis lainnya seperti jalan Kereta Api (KA) yang akan menghubungkan Lubuklinggau, rencana Terminal Peti Kemas (di Selatan Muara Beliti), Palembang dan peningkatan Bandara Silampari.
- 4). Pembangunan fasilitas sosial ekonomi pada setiap ibukota kecamatan (sub pusat pelayanan) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, yaitu:
 - a. Pasar Kecamatan
 - b. Puskesmas
 - c. Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah
 - d. Fasilitas umum; Tempat Ibadah, RTH dan lainnya

4.3.7. Telaah Terhadap Isu Strategis

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah dijabarkan pada tabel di Bab 2 didepan, maka Kabupaten Musi Rawas menerjemahkan permasalahan pembangunan ke dalam isu strategis pada perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Isu Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan	Isu Strategis
<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kemiskinan masih tinggi / capaian yang diperoleh belum sesuai target. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan Penurunan kemiskinan Ekstrem dan <i>Stunting</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Perekonomian dan Nilai Tambah Sektor Unggulan
<ul style="list-style-type: none"> • Capaian IPM masih dibawah capaian Provinsi dan Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)
<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas dan Kuantitas infrastruktur yang belum merata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Kerakyatan
<ul style="list-style-type: none"> • Indeks RB belum sesuai dengan target. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan reformasi Birokrasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemilu/Pilkada serentak tahun 2024 dan kestabilan Polhukhankam

a. Kemiskinan

Pada tahun 2022 Persentase jumlah penduduk miskin di Musi Rawas mengalami penurunan sebesar 13,34% dibanding tahun 2021 sebesar 13,89%(*data BPS Kab. Musi Rawas 2022*). Angka tersebut masih dibawah target dan masih akan diupayakan penanganannya secara komprehensif yang melibatkan seluruh stakeholder. Khusus untuk kemiskinan ekstrim yang menjadi target pemerintah pada tahun 2024 sebesar 0% akan menjadi focus rencana pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dan telah dilakukan beberapa aksi untuk mewujudkan hal tersebut. Berikut Program kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

Tabel 4.6

Program Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana TA 2022		Penanggung Jawab
			Target /Sasaran	Pagu (Rp.)	
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	100%	28.356.025.152	Dinkes
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Luas Perairan Umum yang Dimanfaatkan		493.000.000	Dinas Perikanan Kab. Musi Rawas
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Luas lahan budidaya potensi yang dimanfaatkan		2.220.486.000	
3	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil		266.998.100	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial bagi PMKS di luar panti		226.039.600	
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan sosial bagi anak telantar di luar panti		138.204.300	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana TA 2022		Penanggung Jawab
			Target /Sasaran	Pagu (Rp.)	
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Luas Panen Hortikultura	0,91	1.671.162.950	Pertanian
		Persentase Capaian Luas Panen Tanaman Pangan	0,91		
		Persentase Capaian Luas Tanam Hortikultura	0,91		
		Persentase Capaian Luas Tanam Tanaman Pangan	0,91		
		Persentase Capaian Populasi Ternak	0,91		
		Persentase Capaian Produktivitas Hortikultura	0,91		
		Persentase Capaian Produktivitas Tanaman Pangan	0,91		
		Persentase Capaian Produktivitas Peternakan	0,91		
5.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Patuh terhadap Aturan		39.999.800	Dinas Koperasi dan UKM Kab.Musi Rawas
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Terfasilitasi Bantuan Sarana Usaha		40.000.000	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Kelembagaan Koperasi yang baik		40.000.000	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Produk Usaha Mikro yang Mengikuti Promosi		164.968.000,00	
	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Persentase Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK			
	Program Pengembangan UMKM	Persentase Produk Usaha Mikro yang Mengikuti Promosi			
6.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Stok Barang		84.997.000,00	Dislutkan Disperindag Kab. Mura
7.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak		7.944.500.000,00	DPUCKTRP
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase PAUD dalam kondisi Baik		3.999.600.000	Dinas Pendidikan
		Persentase SD,SMP dalam kondisi Baik			
		Persentase PAUD Cukup Sarpras			

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan*	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana TA 2022		Penanggung Jawab
			Target /Sasaran	Pagu (Rp.)	
		Persentase SD,SMP Cukup Sarpras			
		Persentase Lembaga Penerima Subsidi			
		Persentase Siswa Penerima Subsidi			
		Persentase Sekolah Yang Menerapkan MBS			
		Persentase Kunjungan Pembinaan Pengawas Sekolah			
		Persentase Siswa Berprestasi			
9	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Jumlah Lumbung Pangan dan Kelengkapannya yang Dibantu Untuk Masyarakat Jumlah Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Desa	1 Unit Lantai Jemur, Mesin Penempungan	110.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Konsumsi Energi, Nilai Konsumsi Protein, Persentase peningkatan produk pangan olahan, Persentase desa yang memanfaatkan Lahan Pekarangan untuk tanaman pangan		185.000.000,00	
	Program Penangan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan	22%	50.000.000,00	
Jumlah				46.030.980.902	

Terkait dengan isu penurunan stunting pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga terus berupaya melaksanakan program-program percepatan penurunan stunting dengan melakukan pemetaan program/kegiatan seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Pemetaan Program Penurunan Stunting Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)#1	1. perencanaan jumlah kebutuhan TTD sesuai dengan sasaran yang ada , 2. pengadaan tablet tambah darah, 3. distribusi, 4. pencatatan dan pelaporan, 5. monitoring dan evaluasi.	1. jumlah TTD yang terdistribusi, 2. jumlah remaja putri yang mendapat TTD, 3. realisasi anggaran yang tersedia	1. Peningkatan kadar HB rata2 rematri, 2. Perubahan prevalensi anemi menjadi di bawah 15%	1. Cakupan kegiatan pemberian TTD di atas 50%, 2. Ketepatan Sasaran , 3. ketepatan waktu distribusi, 4. Pencatatan dan pelaporan	260.778.000	DAK
2	Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)#2	1. Perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana scrining anemia, 2. Sosialisasi pencegahan anemia remaja , 3. pemetaan tempat dan sasaran , 4. Pelaksanaan kegiatan , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya semua kebutuhan (tenaga, sarana dan prasarana scrining anemia, 2. Tersedianya tempat dan sasaran, 3. realisasi anggaran yang tersedia.	1. Jumlah rematri yang discrining anemia, 2. Diketuainya persentase rematri anemia	1. Cakupan rematri yang mendapatkan scrining anemia, 2. jumlah rematri yang anemia, 3. Ketepatan Tenaga, sarana dan prasarana , 3. Ketepatan waktu / jadwal dan sasaran pemeriksaan. 4, Pencatatan dan pelaporan	4.775.000	APPBD
3	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap#19	1. Perencanaan Kebutuhan Vaksin dan Logistik (RKO) 2. Rekapitulasi dan Validasi data Balita	1. tersedianya usulan RKO Vaksin dan Logistik 2. ditetapkannya	Persentase anak balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	95%	128.927.200	APBD dan DAK Non Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		sasaran IDL 3. Pengambilan dan distribusi vaksin rutin dan logistik 3. Pencatatan dan Pelaporan 4. Supervisi Supportif Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi rutin dan BIAS	data sasaran balita per Puskesmas 3. terlaksananya kegiatan distribusi vaksin dan logistik 4. Jumlah anak usia 12 bulan keatas yang telah mendapatkan Imuniasi Dasar Lengkap (IDL)				
4	Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah#4						
5	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah#5						
6	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan	Binwin Calon Pengantin		Persentase Catin yang telah diperiksa kesehatannya	560	Kemenag	PNBPNR

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	perkawinan dengan materi pencegahan stunting#6						
7	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat#7	Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbitnya data SP2D/data bayar KPM PKH dari Kementerian Sosial RI	Jumlah alokasi KPM PKH - PUS yang menjadi penerima dana bantuan sosial bersyarat	12514	8.935.310.000	APBN
8	Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah#5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calon pengantin (catin) diarahkan untuk mendaftar dan mengisi kuesioner pada aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai langkah awal pendampingan bagi catin 2. Catin mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memeriksakan kesehatannya 3. Pelaksanaan KIE terkait Kesehatan Reproduksi dan Gizi bagi Calon Pengantin, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah catin yang terdaftar pada aplikasi Elsimil 2. Jumlah pendampingan yang dilakukan oleh TPK pada setiap pasangan catin 3. Realisasi anggaran yang tersedia 	Catin mendapatkan sertifikat ELSIMIL berdasarkan hasil pengisian kuesioner pada aplikasi Elsimil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan sasaran 2. Pencatatan dan pelaporan 	Rp57.760.000	DAK NON-FISIK#6

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		baik pada aplikasi Elsimil maupun pendampingan oleh TPK					
9	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting#6	1. Perencanaan kegiatan, 2. Pendataan peserta, 3. Mengadakan MOU dengan dinas terkait, 4. Pelaksanaan kegiatan, 5. Pencatatan dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA,	1. Jumlah calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah, 2. Adanya MOU pembagian tablet tambah darah bagi PUS	Jumlah calon pengantin (PUS) yang mendapat bimbingan perkawinan pranikah di wilayah kab. Musi Rawas	Rp. 105.000.000,-	APBN
10	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat#7	Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbitnya data SP2D/data bayar KPM PKH dari Kementerian Sosial RI	Jumlah alokasi KPM PKH - PUS yang menjadi penerima dana bantuan sosial bersyarat	12514	8.935.310.000	APBN
11	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima	Program Sembako / BPNT	Persentase Keluarga PUS Penerima Manfaat	Jumlah KPM PUS yang Mendapatkan Bantuan Sosisal Pangan (BPNT)	18000	43.099.200.000	APBN

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	bantuan pangan nontunai#8						
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan#9	Program PBI- JKN KIS	PUS Penerima Bantuan Iuran JKN KIS	Jumlah Jiwa PUS Penerima Bantuan Iuran JKN KIS	33979	14.271.180.000	APBN
13	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi#10	1. Perencanaan kebutuhan PMT bumil KEK, 2. 3. Perhitungan jml sasaran dan bufer stok , 4. Distribusi PMT Bumil KEK, 5. Pemberian PMT bumil KEK, 6. Pencatatan dan pelaporan, 7. monitoring dan evaluasi	1. jumlah PMT yang terdistribusi, 2. jumlah Bumil KEK yang mendapat PMT, 3. realisasi anggaran yang tersedia	1. Jumlah bumil KEK yang mendapat PMT, 2. Tidak ada lagi kasus bumil KEK (0%)	1. Cakupan bumil KEK yang mendapat PMT, 2. Ketepatan sasaran , 3. Ketepatan jumlah PMT yang tersedia , 3. Ketepatan waktu / jadwal pemberian. 4, Pencatatan dan pelaporan		
14	Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan#11	1. perencanaan jumlah kebutuhan TTD sesuai dengan sasaran yang ada , 2. pengadaan tablet tambah darah, 3. distribusi, 4. konseling dan edukasi 4. pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi.	1. jumlah TTD yang terdistribusi untuk bumil, 2. jumlah bumil yang mendapat TTD 90 tablet,	1. Peningkatan kadar HB rata2 bumil, 2. tidak terdapat ibu hamil anemia zat besi (0%)	1. Cakupan bumil yang mendapat TTD 90 tablet, 2. Ketepatan sasaran , 3. Ketepatan jumlah TTD yang tersedia , 3. Ketepatan waktu / jadwal pemberian. 4, Pencatatan dan pelaporan		

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
15	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana#12	1. Pemetaan PUS tidak ber-KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Ditunda (IAT) 2. Jumlah Unmet Need yang dilayani	1. Jumlah unmet need yang dilayani 2. Realisasi anggaran yang tersedia	Terjadinya penurunan unmet need sesuai target	1. Ketepatan sasaran 2. Pencatatan dan pelaporan	Rp 25.000.000	APBD
16	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif#14	1. Perencanaan kegiatan promosi dan advokasi ASI eksklusif, 2. Pengadaan sarana dan prasarana promosi ASI eksklusif, 3. Pelatihan tenaga konselor ASI eksklusif, 4. Pelaksanaan kegiatan, 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. terlaksananya pelatihan konselor ASI eksklusif, 4. Pencatatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan	1. Meningkatnya cakupan pemberian ASI eksklusif	1. Cakupan pemberian ASI eksklusif, 2. Peningkatan promosi dan advokasi pemberian ASI eksklusif, 3. Meningkatnya kemampuan petugas puskesmas untuk melakukan konseling ASI, 4. Peningkatan Pembinaan puskesmas untuk memberdayakan konselor ASI yang sudah terlatih, 5. Realisasi anggaran yang tersedia		
17	Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)#15	1. Perencanaan kegiatan promosi dan advokasi pemberian makanan pendamping ASI, 2. Pelatihan tenaga / kader MP ASI, 4. Pembinaan kegiatan pemberian	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. terlaksananya pelatihan MPASI,	1. Semua ibu2 yang mempunyai balita memahami cara pemberian MPASI	1. Terbentuknya kelompok/kader/tenaga pemberian MPASI, 2. terbentuknya Jadwal Pemberian MPASI, 3. Peningkatan Pemahaman ibu-ibu untuk memberikan		

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		MP ASI , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	4. Pecatatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan		MPASI yang tepat dan benar.		
18	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk#16	1. Perencanaan kegiatan surveilan gizi , 2. Pelatihan tenaga surveilan gizi , 4. Pelaksanaan kegiatan surveilan gizi , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. terlaksananya pelatihan tenaga surveilan gizi, 4. Pencatatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Semua Puskesmas mampu melaksanakan surveilan gizi dan tatalaksana gizi buruk	1. Tersedianya tenaga surveilan gizi yang terlatih, 2. Puskesmas mampu melaksanakan tatalaksana gizi buruk, 3. Semua kasus gizi buruk terlacak dan mendapatkan perawatan	Rp. 16.400.000	DAK non fisik
19	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya# 17	1. Perencanaan anggaran kegiatan posyandu, , 2. Pelatihan tenaga / kader posyandu , 4. Pelaksanaan kegiatan posyandu , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. Pembinaan posyandu, 4. Pencatatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan	1. Semua balita di ukur dan di timbang setiap bulan, 2. Peningkatan D/S , K/S, N/D 3. Penurunan angka stunting, wasting, gizi kurang dan gizi lebih	1. Tersedianya data penimbangan dan pengukuran balita (D/S, K/S, N/D, balita wasting , stunting, gizi kurang dan gizi lebih	0	
20	Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang	1. Perencanaan anggaran kegiatan dan kebutuhan PMT	1.Tersedianya anggaran , 2. jumlah PMT yang	1. Semua anak gizi kurang mendapat PMT, 2.	1. Tersedianya data anak gizi kurang, 2. Terdistribusinya PMT		

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	yang mendapat tambahan asupan gizi#18	anak gizi kurang, 2. Pendataan sasaran dan bufer stok , 4. Distribusi PMT anak gizi kurang, 5. pembinaan Pemberian PMT anak gizi kurang , 6. Pencatatan dan pelaporan, 7. monitoring dan evaluasi	terdistribusi, 2. jumlah anak gizi kurang yang mendapat PMT, 3. realisasi anggaran yang tersedia	Menurunnya kasus anak Gizi Kurang	anak gizi kurang, Pencatatan dan pelaporan, realisasi anggaran yang tersedia		
21	Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap#19	1. Perencanaan Kebutuhan Vaksin dan Logistik (RKO) 2. Rekapitulasi dan Validasi data Balita sasaran IDL 3. Pengambilan dan distribusi vaksin rutin dan logistik 3. Pencatatan dan Pelaporan 4. Supervisi Supportif Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) 5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Vaksinasi rutin dan BIAS	1. tersedianya usulan RKO Vaksin dan Logistik 2. ditetapkannya data sasaran balita per Puskesmas 3. terlaksananya kegiatan distribusi vaksin dan logistik 4. Jumlah anak usia 12 bulan keatas yang telah mendapatkan Imuniasi Dasar Lengkap (IDL)	Persentase anak balita yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	95%	128.927.200	APBD dan DAK Non Fisik
22	Keluarga yang Stop BABS#20	1. Pemicuan STBM. 2, Monitoring pasca pemicuan. 3. Melakukan	1. Jumlah masyarakat yang terpicu. 2. Jumlah jamban yang	1. Peningkatan akses jamban. 2. Penambahan jumlahkeluarga	1. Cakupan keluarga stop BABS 100%. 2. Perubahan perilaku	Rp. 50.000.000	APBD & DAK NON FISIK#7

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		pendampingan. 4. Evaluasi dan pelporan	dibuat. 3. Realisasi anggaran yang tersedia	yang stop BABS			
23	Keluarga yang melaksanakan PHBS#21	1. Perencanaan kegiatan, 2. Pembinaan kader, 3. pelaksanaan kegiatan, 4. pencatatan dan pelaporan, 5. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya target sasaran kegiatan, 2. terselenggaranya kegiatan kunjungan KIE PHBS Ke rumah, 3. tersedianya kegiatan KIE pada sasaran kelompok, 4. terselenggaranya pengadaan media Edukasi dan Informasi, 4. tersedianya data capaian PHBS	Meningkatkan cakupan dari 10 indikator PHBS	1. Meningkatnya cakupan Rumah Tangga sehat, 2. Terbentuknya peran serta aktif masyarakat dalam implementasi PHBS	Rp. 37.300.000,-	APBD
24	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri#22	1. Perencanaan kegiatan, 2. Sosialisasi/promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri pada keluarga prioritas	Terlaksananya sosialisasi/promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Jumlah Keluarga prioritas yang mengkonsumsi ikan	Jumlah keluarga prioritas yang mengetahui manfaat konsumsi ikan dalam negeri	0	APBD
25	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan#23	1. Pendataan ibu hamil 2. Pemetaan pada ibu yang melahirkan di bawah 42 hari	1. Jumlah ibu hamil yang terdata 2. Jumlah peserta KB pasca persalinan yang	Terjadi peningkatan kepesertaan ber-KB pada ibu pasca salin	1. Cakupan ibu pasca salin yang ber-KB 2. Pencatatan dan pelaporan	Rp 475.458.000	DAK NON Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		3. Monitoring dan evaluasi	dilayani				
26	Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan#24	1. Pemetaan keluarga berisiko stunting 2. Keluarga PUS yang memiliki baduta atau balita atau hamil serta calon pengantin mendapatkan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	1. Jumlah keluarga yang terdata oleh TPK 2. Jumlah pendampingan yang dilakukan oleh TPK 3. Realisasi anggaran yang tersedia	Meningkatnya pemahaman keluarga berisiko stunting mengenai stunting	1. Ketepatan sasaran 2. Pencatatan dan pelaporan	Rp801.200.000	DAK NON-FISIK#6
27	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi#25	Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat pekarangan pangan lestari (P2L)	9 Desa	Jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat pekarangan pangan lestari (P2L)	9 Desa	114.867.000	APBD dan DAK Non Fisik
28	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak#26	IKL, Pengambilan sampel dan pelaporan	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak.	1. Peningkatan akses air minum layak. 2. Penambahan jumlah rumah tangga yang menggunakan air minum layak	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan air minum layak 100%	Rp. 50.000.000	APBD & DAK NON FISIK#7
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur Dalam Terlindungi / Broncaptering Desa Ngadirejo Kec.	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	84	Rp420.000.000	DAK Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		Tugumulyo					
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering Desa Sidoharjo Kec. Tugumulyo	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	85	Rp425.000.000	DAK Fisik
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering Desa Pagarsari Kec. Purwodadi	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	70	Rp35.000.000	DAK Fisik
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering Desa Ciptodadi II Kec. Sukakarya	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	75	Rp375.000.000	DAK Fisik
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering Desa Kota Baru Kec. BTS Ulu	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	88	Rp440.000.000	DAK Fisik
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi /	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk	82	Rp410.000.000	DAK Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		Broncaptering Desa Air Beliti Kec. Tuah Negeri		masyarakat			
		Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA)/ Penambahan Sumur DalamTerlindungi / Broncaptering Desa Marga Puspita Kec. Megang Sakti	1 Dokumen	Meningkatnya akses air bersih dan air minum yang layak untuk masyarakat	90	Rp450.000.000	DAK Fisik
31	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak#27	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Kota Baru Kec. BTS Ulu	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	52	Rp364.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Megang Sakti II Kec. Megang Sakti	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	51	Rp357.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Campur Sari Kec. Megang Sakti	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	51	Rp357.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Rejosari Kec. Megang Sakti	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	51	Rp357.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai	51	Rp357.000.000	DAK Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		Perkotaan Minimal 50 KK Desa Sumber Asri Kec. Sumber Harta		akses sanitasi yang layak bagi masyarakat			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Mambang Kec. Muara Kelingi	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	52	Rp364.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Giriyoso Kec. Jayaloka	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	51	Rp357.000.000	DAK Fisik
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Air Beliti Kec. Tuah Negeri	1 Dokumen	Tersedianya MCK Individual sebagai akses sanitasi yang layak bagi masyarakat	52	Rp364.000.000	DAK Fisik
32	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi#28	Program Keluarga Harapan (PKH)	Persentase Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah KPM yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Pendidikan dari PKH	14.000	453.851.600	APBD
33	Cakupan Bantuan Jaminan Nasional	Program PBI-JKN KIS	Penerima Bantuan Iuran JKN KIS	Jumlah Jiwa Penerima Bantuan	206129	86.574.180.000	APBN

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	Penerima luran (PBI) Kesehatan#30			luran JKN KIS			
34	Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat#31	Program Keluarga Harapan (PKH)	Terbitnya data SP2D/data bayar KPM PKH dari Kementerian Sosial RI	Jumlah alokasi KPM PKH yang menjadi penerima dana bantuan sosial bersyarat untuk tahap 1 dan tahap 2 tahun 2022	21.953	30.803.400.000	APBN
35	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan#32	Program Sembako / BPNT	Persentase Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah KPM yang Mendapatkan Bantuan Sosisal Pangan (BPNT)	37.040	88.896.000.000	APBN
36	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota#34	1. Merancang Agenda Pelaksanaan Rembuk Stunting 2. Menyiapkan Dokumen Pendukung 3. Sosialisasi dan Diseminasi Komitmen Aksi Integrasi Penurunan Stunting	Terlaksananya rancangan agenda pelaksanaan rembuk stunting, Tersedianya dokumen pendukung, Terlaksananya sosialisasi dan desiminasi komitmen aksi integrasi penurunan stunting	a. Naskah komitmen, b. Berita acara kesepakatan rencana kegiatan yang di tandatangani oleh pemerintah daerah (bupati) , perwakilan sektor non pemerintah, perwakilan masyarakat dan semua OPD terkait	1.Sosialisasi komitmen bersama yang dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang tersedia 2. Melakukan sosialisasi dan diseminasi komitmen hasil Rembuk Stunting untuk menegaskan kembali komitmen dan mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya penurunan stunting	Rp. 43.862.000,-	DAK non fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
					terintegrasi oleh pemerintah daerah. 3. Melakukan monitoring sosial terhadap pelaksanaan komitmen dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di wilayahnya masing-masing oleh masyarakat.		
37	Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kecamatan#35	1. Merancang rencana kegiatan 2. Musrembang desa 3. Musrembang tingkat kecamatan 4. Konfirmasi rencana kebutuhan program/kegiatan	1. Terlaksananya rancangan agenda pelaksanaan rembuk stunting tk kecamatan, 2. Tersedianya dokumen pendukung, 3. Terlaksananya sosialisasi dan desiminasi komitmen aksi integrasi penurunan stunting	1. Analisa situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting, 2. Deklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi, 3. Komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi di kecamatan.	1. Komitmen hasil rembuk stunting, 2. Kesepakatan rencana kegiatan 3. Apresiasi bagi unsur pemerintahan dan masyarakat yang berhasil dalam upaya penurunan stunting terintegrasi		DAK non fisik
38	Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang	Pertemuan Tim	Tersedianya Perbup Stunting No. 54		1 Perbup	0	DAK

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting#36						
39	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota#37	Monitoring			31 Desa	0	DAK
40	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)#38	1. pemantauan berkelanjutan. 2. Monitoring dan pelaporan	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)#38	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)#38	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)#38	Rp. 50.000.000	APBD & DAK NON FISIK#7
41	Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting#39						
42	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas	Monitoring dan pelaporan	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari	Rp. 50.000.000	APBD & DAK NON FISIK#7

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	dari buang air besar sembarangan (ODF)#40		tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF)#40	dari buang air besar sembarangan (ODF)#40	buang air besar sembarangan (ODF)#40		
43	Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas#41	1. Pemetaan jumlah ibu hamil dan calon pengantin pada lokasi prioritas 2. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bagi ibu hamil dan catin	1. Jumlah ibu hamil dan calon pengantin yang terdata 2. Tersedianya tempat dan sasaran kegiatan 3. Realisasi anggaran yang tersedia	1. Peningkatan pemahaman ibu hamil mengenai pengasuhan 1000 HPK dan pendidikan pra nikah bagi Catin	1. Peningkatan promosi tentang 1000 HPK dan pendidikan pra nikah 2. Ketepatan sasaran 3. Realisasi anggaran yang tersedia	Rp611.600.000	DAK Non-Fisik
44	Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota#42	1. Perencanaan anggaran kegiatan publikasi stunting , 2. Pemantauan pengukuran tk. puskesmas , 4. Pemantauan pengukuran tk. Desa lokus , 5. Penyusunan rencana / sosialisasi hasil pengukuran , 6. analisis data dan publikasi, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. terlaksananya publikasi stunting tk. Kabupaten, kecamatan dan tk. desa, 4. Pечатatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan	Tersedianya data hasil pengukuran tumbuh kembang balita terutama data stunting	data prevalensi stunting tk. Kabupaten, kecamatan dan desa.	Rp. 56.208.200	DAK
45	Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh	1. Perencanaan anggaran kegiatan pemantauan pertumbuhan dan	1. Peningkatan PHBS, 2. Penanggulangan kelainan gizi, 3.	semua anak mampu tumbuh kembang optimal sesuai dengan	1. stimulasi dini, 2. intervensi dini, 3. deteksi dini tumbuh kembang balita		

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	kembang di posyandu#43	perkembangan balita , 2. Pelatihan tenaga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita , 4. Pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	Deteksi dan penanggulangan penyebab tumbuh kembang, 4. Pertolongan pertama pada kecelakaan.	umurnya.			
46	Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting#44	1. Perencanaan anggaran kegiatan audit baduta stunting, 2. Pelatihan tenaga audit stunting , 4. Pelaksanaan kegiatan audit , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya anggaran kegiatan, 2. Tersedianya sarana dan prasarana, 3. terlaksananya pelatihan bagi tenaga audit stunting, 4. Pelaksanaan audit stunting, 6. Pecatatan dan pelaporan, 5. Monitoring dan evaluasi kegiatan	1. Tersedianya data baduta stunting yang lebih akurat, 2. Penurunan jumlah kasus stunting.	1. Identifikasi penyebab kasus stunting, 2. efektifitas intervensi kasus stunting, 3. Tidak terjadinya over dan under diagnostic kasus stunting, 4. Penganggaran penanganan stunting yang lebih fokus.		
47	Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan#45	1. Penyusunan anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana serta	1. Tersedianya anggaran , 2. Peningkatan dan penempatan	1. Adanya bidan di setiap desa, 2. Meningkatnya pelayanan	1. Pelayanan kesehatan pada masyarakat desa oleh nakes profesional, 2.		

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
		tenaga bidan desa	tenaga bidan desa yang terlatih, 3. Audit kinerja bidan desa	kesehatan oleh nakes	meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 3. Terlaksananya program kesehatan yang sudah direncanakan.		
48	Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting#46	Pelatihan/Sosialisasi	Meningkatnya kualitas Pemerintah dan Perangkat Desa	Jumlah Pemdes yang ikut dalam pelatihan/sosialisasi	30 Desa	198.720,00	Dana Desa
49	Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota#47	Pelatihan/Sosialisasi	Persentase KPM Yg Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Jumlah KPM Yg Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	30 Desa	88.250.000	Dana Desa
50	Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan	Insentif Kader, Kegiatan RDS, Kegiatan Posyandu, Tikar Pertumbuhan, Kegiatan Pangan	terintegrasinya program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran desa	30 Desa	2.928.154.689	Dana Desa

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)#48						
51	Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting#49	Insentif Kader, Kegiatan RDS, Kegiatan Posyandu, TIKAR Pertumbuhan, Kegiatan Pangan	Terlaksananya Kegiatan dalam Penguatan Program Pencegahan & Penurunan Stunting di Desa	Alokasi Dana Desa dalam APBDES	30 Desa	2.928.154.689	Dana Desa
52	Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa#51	Monev Pemerintah Desa	Adanya Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan scord Card Desa	Jumlah Data Pelayanan & Laporan	30 Desa	112.250.000	Dana Desa
53	Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting#52	Monitoring		Jumlah Desa Bebas Stunting	155	0	Dana Desa

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
54	Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting#53	Monitoring			95	0	Dana Desa
55	Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting#54						
56	Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)#55	Pelatihan	Terlaksanannya Pelatihan PCP Stunting	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan	50 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0	APD
57	Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan	Pelatihan	Terlaksanannya Pelatihan PCP Stunting	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Pelatihan	199 Desa	0	APBD

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	pelatihan di Kabupaten/Kota#56						
58	Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)#57	Pembinaan terhadap lembaga PAUD	Sosialisasi penyelenggaraan PAUD HI	Satuan PAUD menyelenggarakan PAUD	50 lembaga yang menyelenggarakan PAUD HI	Rp 69.200.000,-	APBD
59	Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama#58	1. Perencanaan kegiatan, 2. Pertemuan /sosilisasi moderasi beragama, 3. Merancang komitmen pemuda lintas agama untuk menjaga persatuan	Terlaksananya kegiatan moderasi beragama bagi pemuda lintas agama	1. Adanya pertemuan sosialisasi yang melibatkan pemuda lintas agama, pemimpin daerah, kepala OPD yang terkait , 2. Adanya komitmen pemuda lintas agama untuk menjaga kerukunan beragama.	1. Komitmen pemuda lintas agama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, 2. erciptanya kerukunan antar umat beragamaT	Rp. 10.000.000,-	Operasional FKUB
60	Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting#59						
61	Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga#60						
62	Persentase Kabupaten/kota yang menerima						

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
	pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi#61						
63	Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja#62	1. Perencanaan kebutuhan tenaga, sarana dan prasarana pusat informasi dan layanan konseling FIKR dan BKR, 2. Pelatihan tenaga konselor dan pendidik sebaya FIKR dan BKR , 3. Pembinaan pengelola PIKR dan fasilitas pelayanan FIKR dan BKR , 4. Pelaksanaan kegiatan , 5. Pencatatan dan pelaporan, 6. monitoring dan evaluasi	1. Tersedianya tenaga konselor FIKR dan Pendidik sebaya remaja, 2. Tersedianya sarana dan prasarana FIKR dan BKR, 3. Terlaksananya pembinaan remaja dan masyarakat, 4. Adanya dukungan kegiatan Bina Keluarga Remaja.	1. Menurunnya angka pernikahan dini, 2. Menurunnya angka seks pranika, 3. Menurunnya penyalagunaan NAFZA oleh remaja.	1. Meningkatkan pengetahuan remaja sehingga mampu merencanakan kehidupannya, 2. Meningkatnya pengetahuan serta mendorong pengelola PIKR dan pendidik sebaya untuk memberikan informasi yang tepat dan benar kepada teman sebayanya.	122.975.000.00 0	DAK
64	Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK#63	1. Pemetaan keluarga balita yang ikut dalam kelompok BKB 2. Perencanaan kegiatan pertemuan dengan anggota kelompok BKB	1. Jumlah keluarga balita yang ikut dalam kelompok BKB 2. Tersedianya sarana dan prasarana 3. Terlaksananya penyuluhan mengenai	1. Semua keluarga balita menjadi anggota kelompok BKB 2. Semua anggota kelompok BKB mendapatkan penyuluhan mengenai pengasuhan 1000	1. Meningkatnya pemahaman anggota kelompok BKB mengenai pengasuhan 1000 HPK	Rp801.200.000	DAK Non-Fisik

NO	INDIKATOR	URAIAN KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KELUARAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
			pengasuhan 1000 HPK 4. Pencatatan dan pelaporan	HPK			
65	Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha#64	1. perencanaan kegiatan 2. Penentuan sampel dan kategori sampel 3. penentuan petugas dan alat pendukung sampling 4. Sampling dan pengujian 5. Monitoring dan Evaluasi	1. Terlaksananya kegiatan sampling pangan fortifikasi di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Sampel makanan yang diperiksa oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. menurunnya jumlah pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	0	0

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2022 sebesar 67,78 masih berada dibawah capaian provinsi dan capaian nasional, IPM Provinsi sebesar 70,9 dan IPM Nasional sebesar 72,91.

c. Infrastruktur

Kondisi Infrastruktur Kabupaten Musi Rawas Pada tahun 2022 mengalami peningkatan seperti pada infrastuktur jalan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, terlihat dari jalan dalam kondisi baik yang pada tahun 2021 sebesar 819,29 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 847,98 namun untuk jalan dalam kondisi sedang mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 265,3 menjadi 261,73 km pada tahun 2022, hal ini perlu menjadi perhatian kedepannya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, namun capaian tersebut belum merata pada seluruh desa di Kabupaten Musi Rawas karena keterbatasan kemampuan dan juga beberapa wilayah merupakan hutan kawasan yang perlu mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat.

Selain jalan, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan stunting Pemerintah Kabupaten Musi Rawas meningkatkan pembangunan infrastruktur sanitasi lingkungan dan air minum. Untuk mendukung kelancaran komunikasi dan mengurangi ketertinggalan daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus berupaya mengurangi wilayah-wilayah *blank spot* melalui infrastruktur komunikasi.

d. Tata Kelola Pemerintah

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
1.	Indeks RB	55,62	54,90	98,71
2.	Nilai SAKIP	BB (70,01)	BB (70,60)	100,84
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	81,51	59,56	73,07
4.	Indeks SPBE	2,95	1,92	65,08

No	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)
5.	Indeks Profesionalitas ASN	62,92	59,95	95,27
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,04	92,41	104,96

Berdasarkan indikator penunjang tata kelola pemerintah pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 masih terdapat target indikator kinerja yang belum tercapai yakni Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan target pada tahun 2022 sebesar 81,51% dengan realisasi sebesar 59,95% dan Indeks SPBE dengan target pada Tahun 2022 sebesar 2.95 dan realisasi sebesar 1.92.

4.4 Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Program Nomenklatur Pembangunan Daerah Tahun 2024

Dengan memperhatikan memperhatikan isu strategis daerah sebagaimana yang tertuang didalam tabel 4.5 diatas serta RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 dalam penentuan prioritas daerah tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas juga memperhatikan arahan Pemerintah Pusat sebagaimana yang tertuang didalam RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan RKP Tahun 2024, serta arah kebijakan RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023. Berdasarkan arahan Pemerintah Pusat dan Provinsi, selanjutnya dilakukan sinkronisasi kondisi dan karakteristik daerah, prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yaitu untuk mendukung pencapaian fokus dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu isu permasalahan yang ada di Kabupaten Musi Rawas maka penjabaran tema dan prioritas pembangunan dituangkan ke dalam arah kebijakan, program prioritas dan program nomenklatur pembangunan daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1	Peningkatan ketahanan ekonomi	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin	Pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Program Jaringan Pengamanan Sosial	Pemberian Bantuan bagi masyarakat miskin
			2. meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin	1.pendidikan gratis bagi masyarakat miskin	pendidikan gratis bagi masyarakat miskin
					2. Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin	Pengobatan gratis bagi masyarakat miskin
					3. Penyediaan Rumah layak huni	Pembangunan Rumah Layak Huni
					4. Penyediaan listrik gratis	Penyediaan listrik yang murah dan merata untuk penduduk miskin
			3. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	Peningkatan akses masyarakat terhadap Sumber Daya Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin	pemberian modal usaha, bantuan alat usaha, pelatihan/penguatan SDM Petani/Pelaku Usaha Kecil, penciptaan lapangan kerja

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan PDRB masyarakat	Peningkatan Investasi	Program Peningkatan Kualitas Layanan Perizinan	Peningkatan Peran Mall Pelayanan Publik
	Peningkatan Sarana dan Prasarana MPP					
	Peningkatan SDM Mall Pelayanan Publik					
	Program Promosi Potensi Daerah			Pameran Potensi Daerah		
	Pengendalian Inflasi		Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Peningkatan produksi dan pemasaran produk pertanian dalam arti luas		
				Peningkatan produksi dan pemasaran produk koperasi dan UMKM		
				Peningkatan pengelolaan dan pemasaran destinasi/obyek wisata		
		Peningkatan Pendapatan Per Kapita	Peningkatan daya beli masyarakat	Program Peningkatan taraf hidup masyarakat	Peningkatan pendapatan keluarga	
		Penurunan TPT	Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan kualitas angkatan kerja	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja	
	Pelatihan Penguatan Kualitas SDM Tenaga Kerja					

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
						Pengembangan program kemitraan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha untuk peningkatan kualitas tenaga kerja
2	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1.Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Program peningkatan jalan dan jembatan	Kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik	Kegiatan Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrikPembangunan sarana dan prasarana listrik
				Pembangunan dan meningkatkan kualitas jaringan irigasi	Program Pengelolaan sumber daya air untuk irigasi	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi
				Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur sanitasi	Program Pengelolaan dan pengembangan limbah	Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan limbah

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
				Peningkatan jaringan dan layanan air bersih	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Pembangunan dan Peningkatan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik	Program Peningkatan sarana dan prasarana umum	Pembangunan sarana dan prasarana Umum
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana TIK
		2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Pembangunan infrastruktur pengelolaan persampahan	Pembangunan prasarana pengelolaan persampahan	Pengelolaan persampahan
				Peningkatan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	· Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar	Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan	Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan untuk semua anak bangsa termasuk juga kaum difabel
						Penyelenggaraan pendidikan dasar dua belas tahun
						Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
				Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana pendidikan	Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan	Pembangunan dan peningkatan kualitas gedung sekolah
				Peningkatan Peran Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan Kapasitas Peran Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengadaan sarana pendidikan
						Sosialisasi Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
			Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidikan	Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan SDM tenaga pendidik	Sosialisasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Penyelenggaraan peningkatan kapasitas SDM Bidang pendidikan

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
			Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Peningkatan Pendidikan keagamaan dan Budaya	penyelenggaraan pendidikan nonformal	Pendidikan keagamaan Rumah tahfiz, pondok pesantren Pendidikan kejar paket
				Peningkatan Peran Pemuda	Peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan akses layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan	Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan
4	Peningkatan Kualitas Layanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan publik	Pemantapan Reformasi Birokrasi berbasis TIK	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK	Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis elektronik
				Pengembangan SDM layanan publik	Peningkatan kualitas SDM layanan Publik	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/kompetensi ASN
				Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintah yang baik

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		2. Meningkatnya keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka peningkatan kemanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan Kamtibmas	Pemeliharaan kamtibmas	Sosialisasi Kamtibmas Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas

Tabel 4.9
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN)

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
PN 1						
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan						
1	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Pengelolaan hutan berkelanjutan	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
		Penyediaan air untuk pertanian	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengelolaan sumber daya air
		Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
			Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk	peningkatan pembangunan dan pemeliharaan	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program pengelolaan sumber daya air

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			mendukung pengembangan ekonomi	infrastruktur jaringan irigasi rawa dan sumber pengairan lainnya		
		Pemeliharaan, Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk revitalisasi Danau dan Infrastruktur	Membangun lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan					
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau					
		Pengembangan Waduk Multiguna	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan infrastruktur	Pembangunan dan Optimalisasi Jaringan Irigasi	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
		Peningkatan ketersediaan pangan hasil	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan	Peningkatan derajat kemandirian	Penanganan daerah rawan pangan	Program pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	kemiskinan	pangan		kemandirian pangan
					Pengembangan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
		Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian
		Peningkatan tata kelola system pangan nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan derajat kemandirian pangan	Penanganan daerah rawan pangan	Pogram pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
3.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutudan nilai tambah produk kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitasi usaha pembiayaan dan akses	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil	Peningkatan Produksi dan Produktivitas	Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya		Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Perikanan	
		Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta database kelautan dan perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
						Program Pengembangan Perikanan Tangkap
						Program Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya
4.	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan Koperasi	Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah dan besar	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pengembangan kerjasama koperasi, UMK dan UMKM	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif
		Peningkatan kapasitas jangkauan dan inovasi koperasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
		Peningkatan penciptaan start up dan peluang usaha	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan nilai tambah usaha sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas dan kuantitas koperasi, UMKM	Pemberdayaan koperasi dan UKM, Kelompok Tani, Bumdes	Program pengembangan lembaga ekonomi desa
5.	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja,	Peningkatan industri pengolahan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah	Peningkatan Produksi dan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
	dan Investasi di sektor riil dan industrialisasi	berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	kemiskinan	hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	produktivitas pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	
		Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
		Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata termasuk wisata alam yang didukung penguatan rantai pasok	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Objek Wisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
						Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi termasuk reformasi ketenagakerjaan	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pengembangan industri halal	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
6.	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	Peningkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk ekspor dan jasa	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
		Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pelayanan Pengadaan
		Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding dan produk kreatif	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan Pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
7.	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Peningkatan pendalaman sektor keuangan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
					pemerintah	
		Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan Industri 4.0	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan system logistic dan stabilitas harga	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Produksi, dan Nilai Tambah hasil Pertanian, Pekebunan, Peternakan, dan Perikanan	Peningkatan Produksi dan produktivitas pertanian, Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian masyarakat	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan Iklim yang Kondusif Untuk Berinvestasi	Peningkatan Penanaman Modal	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
		Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pengembangan pariwisata	Pengembangan pemasaran pariwisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		perkembangan ekonomi terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan data informasi statistik daerah
PN 2						
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
-	-	-	-	-	-	-
PN 3						
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan	Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan Administrasi Kependudukan.
		Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependudukan
		Pendampingan dan layanan terpadu	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi	Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dan bersih	pemerintah Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penataan Administrasi Kependidikan
2.	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Sistem jaminan sosial nasional	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
			Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pelayanan Kesehatan Masyarakat
		Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	Pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.
			Kesejahteraan sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
3.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan aksesdan mutu pelayanan kesehatan	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		Percepatan perbaikan gizi masyarakat	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan aksesdan mutu pelayanan kesehatan	Perbaikan Gizi Masyarakat
		Peningkatan pengendalian penyakit	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		Penguatan system kesehatan dan pengawasan obat dan makanan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan layanan Kesehatan yang berkualitas	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pengawasan Obat dan Makanan
4.	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan aksesdan pemerataan layanan pendidikan	Program Pendidikan Usia Dini
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidik	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan aksesdan pemerataan layanan pendidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penjaminan mutu pendidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Peningkatan tata kelola kependidikan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib pendidikan dasar sembilan tahun
5.	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Kelembagaan Pengarasutamaan Gender dan Anak
		Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
		Kualitas Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan Pemberdayaan Pemuda	Peningkatan kualitas pemuda	Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Peningkatan peran serta kepemudaan
6.	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehataraan Sosial Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan
		Keperantaraan usaha dan dampaksosial	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Reforma Agraria	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			pelayanan prima		instansi pemerintah	
		Perhutanan Sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Penguatan perekonomian pedesaan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
8.	Peningkatan produktivitas dan daya saing	Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasamaindustri	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Program Pendidikan Non Formal
				Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Pengembangan Inovasi Daerah
		Prestasi Olahraga	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah	Program Pendayagunaan Iptek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
PN 4						
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Revolusimental dan pembinaan	Revolusi mental dalam system	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)	Pelestarian dan pengembangan	Pengembangan dan pengelolaan	Program pengembangan wawasan kebangsaan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
	ideology pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa maju, modern dan berkualitas	pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	yang berdaya saing	kebudayaan lokal	keragaman dan nilai budaya	
		Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsive	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Peningkatan kapasitas aparatur	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas/ kompetensi ASN	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Revolusi mental dalam system Sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program Penyiapan tenagapendamping kelompok bina keluarga
						Program peningkatan perlindungan anak
		Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	Pembangunan dan pembudayaan system ekonomi kerakyatan berlandaskan pancasila	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan kualitas koperasi, UMKM dan IKM	Pemberdayaan koperasi, UMKM dan IKM	Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah	
					Program peningkatan kualitas koperasi	

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Pembinaan ideology pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela Negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
2.	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan bangsa	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan nilai budaya
		Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budayabangsa untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Perlindungan	Pembangunan Sumber	Pelestarian	Pelestarian dan	Program pengembangan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		hakkebudayaan danekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	dan pengembangan kebudayaan lokal	pengembangan kebudayaan lokal	nilai budaya
		Pengembangan diplomasi kebudayaan untuk memperkuat Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal	Program pengembangan kebudayaan
3.	Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial	Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dankebersamaan di kalangan umat beragama	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
		Penyelarasan Relasi agama danbudaya	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pengembangan wawasan keagamaan	Penyelenggaraan musisi rawas bertilawah	Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
		Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan	Pengentasan kemiskinan	Peningkatan Perlindungan sosial	Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas adatterpencil, dan penyandang	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.	Peningkatan budaya literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	Peningkatan budaya literasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		Pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksaradaerah serta sastra	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun
		Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas dan daya cipta	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pembelajaran	Program wajib belajar sembilan tahun Program penelitian dan pengembangan daerah
		Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Peningkatan budayaliterasi	Peningkatan budaya gemar membaca	Program pembinaan perpustakaan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
PN 5						
emperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1.	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan terjangkau	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana pemukiman	Program pengembangan perumahan
					Pembangunan ansarana keciptakaryaan	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
						Program pembangunan infrastruktur perdesaan
					Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan
		Program peningkatan jalan dan jembatan				
		Sanitasi layak dan aman	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan Pembangunan sanitasi	Pembangunan ansarana sanitasi	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Pengelolaan air tanah dan air baku merata serta berwawasan lingkungan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan	Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Program pengembangan lingkungan sehat
Peningkatan pembangunan sanitasi	Pembangunan sarana penyediaan air minum dan air bersih					Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Program pembangunan infrastruktur perdesaan						

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			ekonomi			
		Keselamatan dan keamanan transportasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
		Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pemeliharaan/ rehabilitasi bangunan pengendalian banjir/ pengamanan sungai	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengendalian banjir dan pengamanan sungai Program pembangunan turap/talud/bronjong
		Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan dan optimalisasi jaringan irigasi	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya
3.	Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk	Peningkatan infrastruktur perhubungan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			mendukung pengembangan ekonomi			Pelayanan Angkutan
		Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
4.	Energi dan Ketenagalistrikan	Keberlanjutan penyediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Akses dan keterjangkauan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan energy alternatif
		Kecukupan penyediaan energy dan tenaga listrik	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pembangunan sarana keciptakaryaan	Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
5.	Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
			berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi			
		Pemanfaatan infrastruktur TIK	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
		Fasilitas Pendukung transformasi digital	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pembangunan infrastruktur TIK	Pembangunan sarana dan prasarana TIK	Program pengelolaan aplikasi informatika
PN 6						
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Penanggulangan	Peningkatan	Pengendalian	Pemantauan	Program Pengendalian

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	n pencemaran lingkungan hidup	kualitas lingkungan hidup	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Penguatan kelembagaan dan pecegahan hukum di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
2.	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Penanggulangan bencana	Peningkatan pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan	Pelayanan Kebencanaan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
		Peningkatan	Peningkatan	Pengendalian	Pemantauan	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
						Program Pembinaan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
						Program Pengendalian

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		ketahanan iklim	pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan untuk mendukung pengembangan ekonomi	n pencemaran lingkungan hidup	kualitas lingkungan hidup	dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
3.	Pembangunan rendah karbon	Pembangunan energy berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Berkelanjutan
		Pemulihan Lahan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta berwawasan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Pemantauan kualitas lingkungan hidup	Program Peningkatan kualitas dan akses informasi lingkungan
			Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Peningkatan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan dan peternakan	Program Peningkatan produksi (pertanian/Perkebunan)
		Pengembangan industri hijau	Memperkuat ketahanan ekonomi rakyat untuk pengentasan kemiskinan	Penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi	Peningkatan penanaman modal	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
		Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan	Program Pengembangan Inovasi Daerah	Program Pengembangan Sentra-sentra industry

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		berwibawa, dan pelayanan prima	teknologi untuk pelayanan prima	keuangan instansi pemerintah	Program Pendayagunaan Iptek	potensial
PN 7						
Memperkuat Stabilitas, Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik						
No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
1	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
		Penguatan kesetaraan dan kebebasan	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pendidikan politik masyarakat
		Peningkatan kualitas komunikasi publik	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik Program Pengelolaan aplikasi informatika
2.	Optimalisasi kebijakan luar negeri	Penguatan integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	-	-	-	-
		Penguatan kerjasama pembangunan internasional	-	-	-	-
		Peningkatan citra	-	-	-	-

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		positif di Dunia Internasional				
		Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global	-	-	-	-
3.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan implementasi manajemen ASN	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
		Transformasi pelayanan public	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
		Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penataan peraturan perundang-undangan
		Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
4.	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan keamanan dalam negeri	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Pemasyarakatan Kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtimas	Program pemeliharaan kantrabtimas dan pencegahan tindak kriminal
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

No	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah
		Penguatan kemampuan pertahanan dibarengi CBM	-	-	-	-
		Penguatan keamanan laut	-	-	-	-
		Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Pemasyarakatan kantibmas	Pemeliharaan Kantrabtibmas	Program pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak criminal
						Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Penguatan Ketahanan dan Keamanan siber	Tata kelola birokrasi yang bersih, bermartabat, berbasis teknologi untuk pelayanan prima	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah	Program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah

4.7. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Dengan Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

Kabupaten Musi Rawas secara administratif merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 yang direncanakan pada sub bab didepan juga ditujukan untuk mendukung pencapaian Prioritas Provinsi Sumatera Selatan pada RKPD Sumatera Selatan Tahun 2024. Sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas provinsi disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan
Prioritas Provinsi Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Garis Keterkaitan	Prioritas Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024
1.	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Trantibum		Meningkatkan Ketahanan Ekonomi
2	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sdm
3	Meningkatkan Infrastruktur Dan Ekonomi Kerakyatan		Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana		Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dan Stabilitas Polhukhankam

Tabel 4.11
Sinkronisasi Prioritas Daerah Tahun 2024 dengan
RPJMD 2021-2026

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan ketahanan ekonomi	1. Menurunnya angka kemiskinan	1. Memperkuat Ketahanan sosial bagi masyarakat miskin	Memantapkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	M4. Memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat	Rp. 601.857.916.080
			2. meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat miskin		
		2. Memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat miskin	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap Sumber Daya Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin		
2.	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan dasar	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dasar	M2. Membangun sumber daya manusia yang berkualitas	Rp. 794.531.010.830
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan		
			Meningkatkan kualitas SDM tenaga kependidikan	Pemerataan guru		
				Peningkatan kualitas guru		
			Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal	Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan ketrampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal		

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat		
3.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan infrastruktur	Membangun dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah	M3. Pemerataan infrastruktur yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Rp. 354.400.579.463
				Memelihara dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan		
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur kelistrikan, sanitasi, jaringan irigasi	Pemenuhan jaringan listrik untuk konektivitas dan pengembangan wilayah		
			Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas umum dan pemerintahan	Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur fasilitas pelayanan publik		
			meningkatkan cakupan layanan infrastruktur TIK	Membangun infrastruktur TIK		
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Membangun infrastruktur pengelolaan persampahan		
				Meningkatkan peran aktif masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup		
4..	Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Polhukhankam	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akses dan kemudahan layanan	memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	M1. Mewujudkan birokrasi yang profesional berbasis teknologi	Rp.317.089.069.012

NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN PADA RKPD TAHUN 2024	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	MISI	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7
				Pengembangan SDM layanan publik		
				Peningkatan kualitas kelembagaan unit layanan publik		

4.5 Strategi Pendukung Tujuan Pembangunan

4.5.1. Pemulihan dampak Pandemi Covid-19

Penyebaran kasus Corona virus Disease 2019 (covid-19) sudah mulai terdapat di Kabupaten Musi Rawas sejak bulan April 2020. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mengupayakan langkah pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui berbagai strategi pencegahan dan penanganan pandemi covid 19 yaitu:

1. Strategi Penanganan Kesehatan

Penanganan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Di sektor hilir, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tetap konsisten untuk melakukan kebijakan-kebijakan pendukung seperti mengkampanyekan penggunaan masker saat berada di ruang tertutup, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat termasuk perilaku rajin mencuci tangan.

2. Strategi Pemulihan Ekonomi

Melalui stimulus yang diberikan kepada masyarakat, berupa bantuan modal usaha dan prasarana sebagai upaya penguatan dan optimalisasi produktivitas sektor-sektor strategis di Kabupaten Rawas yaitu sektor pertanian dalam arti luas, meliputi tanaman padi sawah irigasi, perkebunan

karet, kopi, sawit dan lain-lain, budidaya ikan tawar dan peternakan. Selain itu, stimulus yang dimaksud, diberikan juga kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Kriteria penerima bantuan ini berdasarkan usulan dari pemerintah desa dan kecamatan.

4.5.2. Strategi Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) atau yang lebih dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan sebuah kesepakatan global baru yang dibuat oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) sebagai bentuk dari tindak lanjut kesepakatan global yang telah dibuat sebelumnya yakni MDGs (Millennium Development Goals). SDGs juga dapat didefinisikan sebagai kesepakatan tujuan pembangunan baru yang dapat mendorong pembangunan ke arah yang lebih lanjut didasarkan pada hak asasi manusia ataupun kesetaraan manusia dengan tujuan mendorong pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan hidup dan sebagainya. SDGs juga dilaksanakan dengan prinsip universal dan memiliki motto yaitu *"No One Left Behind"* yang memiliki arti tidak ada satu pun yang tertinggal.

SDGs (Sustainable Development Goals) sendiri memiliki 17 tujuan yang diadopsi, diperbaharui serta dimodifikasi dari MDGs (Millennium Development Goals) itu sendiri, yakni sebagai berikut :

1. Tanpa adanya kemiskinan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu segala bentuk kemiskinan di berbagai tempat harus diminimalisirkan, entah itu dengan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan ataupun hal semacamnya.

2. Tanpa adanya kelaparan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu untuk mengakhiri kelaparan yang ada, mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi yang dicakup, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan ke depannya.

3. Kehidupan sehat dan sejahtera.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua jenjang usia.

4. Pendidikan berkualitas.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan setiap pendidikan yang diterima berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang di dunia.

- 5 Kesetaraan gender.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mencapai kesetaraan gender sekaligus mengurangi kesenjangan antar gender dan memberdayakan semua perempuan sebagaimana mestinya.
- 6 Air bersih dan sanitasi layak.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
- 7 Energi bersih dan terjangkau.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan akses untuk energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua kalangan.
- 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua sebagai salah satu contohnya.
- 9 Industri, inovasi dan infrastruktur.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya kesenjangan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan diantara negara-negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu membuat wilayah perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim.
Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Contohnya mengurangi pemakaian Air Conditioner yang dapat merusak lingkungan,

14. Ekosistem laut.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

15. Ekosistem daratan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu ekosistem yang ada di darat contohnya seperti hutan harus dikelola secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.

17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Maksud dari tujuan ini sendiri yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

17 tujuan di atas telah disetujui oleh 197 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada bulan Agustus tahun 2015 lalu. SDGs (Sustainable Development Goals) ini sendiri akan dijadikan sebagai tujuan pembangunan global selama 15 tahun ke depan hingga tahun 2030. Dengan adanya SDGs (Sustainable Development Goals) ini, diharapkan pembangunan yang ada di dunia menjadi lebih baik dan terarah ke depannya seiring perubahan zaman.

Berikut ini tabel 4.10 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Musi Rawas dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan SDGs

Tabel 4.12
Korelasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun
2024 Dalam Merespon Program SDGs

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RKPDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
1	Tanpa adanya kemiskinan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	1. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan 2. Peningkatan akses dan mutu Pelayanan kesehatan 3. Penyediaan Rumah layak huni 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kelistrikan 5. Program Pemberdayaan masyarakat miskin
2	Tanpa adanya kelaparan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Jaringan Pengamanan Sosial
3	Kehidupan sehat dan sejahtera	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
4	Pendidikan berkualitas	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan yang terjangkau untuk penduduk miskin • Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga pendidik • Penyelenggaraan pendidikan nonformal • Pendidikan kejar paket
5	Kesetaraan gender.	Meningkatkan kualitas dan daya aing Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan serta SDM Bidang Kesehatan
6	Air bersih dan sanitasi layak	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Limbah dan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi • Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
7	Energi bersih dan terjangkau	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik
8	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin rakyat

No	Tujuan Pembangunan SDGs	Prioritas Pembangunan RPKDKabupaten Musi Rawas	Program Prioritas RKPD Kabupaten Musi Rawas
9	Industri, inovasi dan infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana TIK
10	Berkurangnya kesenjangan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan
11	Kota dan komunitas berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembangunan jalan dan jembatan • Program peningkatan jalan dan jembatan • Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana • Pembangunan sarana dan prasarana TIK • Pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan listrik • Peningkatan penanganan pemukiman kumuh •
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
13	Penanganan perubahan iklim	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
14	Ekosistem laut.	Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
15	Ekosistem daratan	Peningkatan Ketahanan Ekonomi	Program Pemberdayaan masyarakat miskin
		Peningkatan Infrastruktur berwawasan lingkungan	Pemberdayaan masyarakat dan korporasi dalam pengelolaan lingkungan hidup
16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Peningkatan reformasi birokrasi dan stabilitas polhukhankam	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih
			Peningkatan kualitas SDM layanan Publik
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	Peningkatan reformasi birokrasi dan stabilitas polhukhankam	Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

4.5.3. Strategi Untuk Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarustamaan adalah upaya/strategi yang harus dilakukan untuk memberi peluang kepada seluruh komponen atau stakeholders agar dapat berperan secara optimal dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender (gender mainstreaming) merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya kesetaraan dan keadilan gender (marginalisasi, stereotype, subordinasi, kekerasan dan beban ganda).

Pelaksanaan PUG dalam masyarakat tercermin dalam berbagai aktivitas yang dijalankan oleh OPD dengan didukung Tim Penggerak PKK dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW). Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terhadap kaum perempuan dan anak-anak antara lain :

- Sosialisasi Kesetaraan Keadilan Gender (KKG)
- Pencanaan Musi Rawas sebagai Kabupaten layak anak,
- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan,
- Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui koordinasi dan sosialisasi dengan kader PKK, posyandu, puskesmas dan RS dalam upaya mengurangi/ meminimalisir kematian Ibu dan bayi.
- Kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka program terpadu pemberdayaan masyarakat berbasis gender, serta
- Koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi masyarakat perempuan di Musi Rawas meliputi PKK, DWP, dan GOW.

Tabel 4.13
Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Pengarusutamaan Gender

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none">• Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah

Prioritas Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Nomenklatur Daerah	Kegiatan Nomenklatur Daerah
			Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
		<ul style="list-style-type: none"> Program Perlindungan Perempuan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4.5.4. Strategi Untuk Mendukung Pelaksanaan SPM

SPM merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sementara itu, pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah/pemerintah daerah untuk memenuhinya merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan demikian maka penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah daerah terhadap mutu dan jenis pelayanan yang prioritas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam rangka percepatan pencapaian SPM di Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2024, telah dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Strategi

- 1) Penataan kelembagaan pemerintah yang sesuai kebutuhan, tepat fungsi dan tepat ukuran
- 2) Peningkatan kualitas SDM aparatur yang berkinerja tinggi dan sejahtera
- 3) Pemanfaatan teknologi bagi aparatur untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- 4) Pemberian kemudahan akses infrastruktur dan akses modal bagi masyarakat

b. Arah Kebijakan

- 1) Mewujudkan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- 3) Peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar publik terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air minum, energi/listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- 4) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antar kawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.

4.6. Arah Pengembangan Kecamatan

Strategi kebijakan pembangunan wilayah kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah dengan memperhatikan karakteristik suatu wilayah seperti kandungan sumber daya alam, perbedaan demografis, dan konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

- Pengembangan Pendidikan akan diarahkan dan dipusatkan di Kecamatan Muara Beliti sebagai Ibu Kota Kabupaten sekaligus akan diwujudkan sebagai Kota Pendidikan.
- Kawasan *Food Estate* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan akan dikembangkan di 5 Kecamatan potensial pertanian, yaitu kecamatan Muara beliti, kecamatan Tugumulyo, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Megang Sakti.

- Sektor Perkebunan sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Musi Rawas di kembangkan di Kecamatan BTS Ulu, Jayaloka, Sukakarya, Muara Kelingi, Muara Lakitan, Tuah Ngeri, Selangit dan Tiang Pungpung Kepungut (TPK).
- Kecamatan Sumber Harta dikembangkan sebagai sektor Pariwisata utamanya pengemabngan Danau Aur dan untuk wisata kuliner akan dikembangkan di Kecamatan Tugu Mulyo.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dan akan diformulasikan pada Musrenbang Tahun 2024, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk Tahun 2024 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan APBD Tahun 2024. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam rancangan awal RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV, bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan isu aktual dan kondisi umum yang dihadapi, maka agenda pada Tahun 2024 adalah pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, prioritas pembangunan daerah tersebut tertuang dalam daftar program dan kegiatan serta pagu indikatif Perangkat Daerah, karena bersifat indikatif maka implementasinya akan disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, berikut rencana pembiayaan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Peningkatan Ketahan Ekonomi	Dinas Pertanian dan Peternakan	24.741.647.000
		Dinas Ketahanan Pangan	4.687.591.000
		Dinas Perkebunan	7.826.093.215
		Dinas Perikanan	5.200.174.001
		Dinas Koperasi UKM	4.016.973.000
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.019.219.945
		DPMPTSP	4.852.669.370
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.762.670.295
		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.081.277.420
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.204.103.000
		Sekretariat Daerah	67.856.418.944
		Sekretariat DPRD	96.068.063.831
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	348.055.906.638
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.681.526.650
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	10.803.581.771		
2	Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	131.890.912.005
		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	174.364.475.070
		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.166.384.420
		Dinas Lingkungan hidup	13.585.770.789
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.414.851.779
		Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.681.526.650
		Dinas Perhubungan	5.345.262.750
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	8.951.396.000
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan	136.163.526.913
		RS. Dr. Sobirin	88.262.498.000
		Dinas Pendidikan	402.053.364.000
		Setda	67.856.418.944
		Badan Kesatuan Bangsa Politik	56.318.609.036
		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	11.897.051.091
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.737.948.456
		Dinas Pemuda dan Olahraga	7.347.010.000

NO	PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.267.090.000
		Dinas Sosial	11.704.442.000
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.923.052.390
4.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum	Dinas Kesehatan	136.163.526.913
		RS. Dr. Sobirin	88.262.498.000
		DPMPTSP	4.852.669.370
		BPPRD	10.803.581.771
		Badan Kesatuan Bangsa Politik	56.318.609.036
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.737.948.456
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.267.090.000
		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.176.500.624
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.506.644.842
		Seluruh Perangkat Daerah	-

Dari usulan rencana kerja dan pendanaan daerah melalui perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 dapat dilihat pada berikut table berikut ini :

Tabel 5.2
Rekap Rencana Pendanaan Per Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	Perkiraan PAGU OPD 2024
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	402.053.364.000
2	Dinas Kesehatan	136.163.526.913
3	Rumah Sakit Dr. Sobirin	88.262.498.000
4	Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	131.890.912.005
5	Dinas PU Bina Marga	174.364.475.070
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.166.384.420
7	Satuan Polisi Pamong Peraja dan Pemadam Kebakaran	11.176.500.624
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.506.644.842

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	Perkiraan PAGU OPD 2024
9	Dinas Sosial	11.704.442.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.204.103.000
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.267.090.000
12	Dinas Ketahanan Pangan	4.687.591.000
13	Dinas Lingkungan Hidup	13.585.770.789
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.407.089.710
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.762.670.295
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.897.051.091
17	Dinas Perhubungan	5.345.262.750
18	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	8.951.396.000
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.016.973.000
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.852.669.370
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	7.347.010.000
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4.081.277.420
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.737.948.456
24	Dinas Perikanan	5.200.174.001
25	Dinas Pertanian dan Peternakan	24.741.647.000
26	Dinas Perkebunan	7.826.093.215
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.019.219.945
28	Sekretariat Daerah	67.856.418.944
29	Sekretariat DPRD	96.068.063.831
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.414.851.779
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	348.055.906.638
32	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi	10.803.581.771
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.923.052.390
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.681.526.650
35	Inspektorat	13.085.347.568
36	Kecamatan BTS Ulu	2.737.001.000
37	Kecamatan Muara Kelingi	3.388.101.000
38	Kecamatan Muara Lakitan	2.758.826.000
39	Kecamatan Jayaloka	2.391.164.177
40	Kecamatan Megang Sakti	3.969.535.300
41	Kecamatan Sukakarya	1.521.273.000
42	Kecamatan Tuah Negeri	1.607.168.000
43	Kecamatan Tugumulyo	3.752.501.000
44	Kecamatan Purwodadi	3.563.435.000

No	NAMA PERANGKAT DAERAH	Perkiraan PAGU OPD 2024
45	Kecamatan STL Ulu Terawas	2.506.435.000
46	Kecamatan Sumberharta	2.491.674.000
47	Kecamatan Muara Beliti	2.031.211.770
48	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	1.383.009.750
49	Kecamatan Selangit	2.760.587.000
50	Badan Kesatuan Bangsa Politik	56.318.609.036
	TOTAL	1.747.289.065.519

Adapun rencana program/kegiatan pembangunan dalam rancangan awal RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 sesuai urusan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah diuraikan secara rinci pada tabel berikut:

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan organisasi. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja berfungsi untuk:

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan daerah/perangkat daerah;
2. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja;
4. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

Penetapan Indikator kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dapat dilihat pada :

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Musi Rawas

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
1	Indeks RB	Penilaian terhadap kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian dari KemenPANRB Ket : -AA : nilai >90-100, Predikat istimewa -A : Nilai > 80-90, predikat Sangat Baik -BB : Nilai .70-80, predikat Baik -B : Nilai >60-70, predikat Cukup Baik -CC : Nilai >50-60, predikat Cukup -C : Nilai >30-50, predikat Buruk	60,12

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
			-D : Nilai 0-30, predikat Sangat Buruk	
2	Nilai SAKIP	Ukuran untuk mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah yang merupakan hasil penilaian dari Kementerian PAN dan RB	Hasil penilaian dari KemenPANRB	BB (72,03)
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	$" = (15\%n1) + (20\%n2) + (15\%n3) + (20\%n4) + (15\%n5) + (15\%n6)"$ n1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran n2 = pengelolaan anggaran belanja dalam APBD n3 = transparansi pengelolaan keuangan daerah n4 = penyerapan anggaran n5 = kondisi keuangan daerah n6 = opini BPK atas LKPD	81,54
4	Indeks SPBE	Bobot Nilai dari 3 Domain Tingkat Kematangan : Domain Kebijakan Internal, Domain Tata Kelola, Domain Layanan.	4,2-5,0 = memuaskan 3,5-<4,2 = sangat baik 2,6-<3,5 = baik 1,8-<2,6 = cukup <1,8 = kurang	3,5
5	Indeks Profesionalitas ASN	Indek profesionalitas aparatur merupakan fungsi kesesuaian antara kompetensi pejabat, kinerja pejabat, kompensasi dan kedisiplinan	$IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$ Keterangan : IP= Indeks Profesionalisme -IP 1= Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi -IP2= Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi -IP3=Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja -IP4= Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin	68,76
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil penilaian survey indeks kepuasan masyarakat	=nilai rata-rata dari hasil survey kepuasan masyarakat di perangkat daerah	88,06
7	Indeks Pendidikan	Gambaran secara umum untuk mengetahui perkembangan pendidikan	$= \left(\frac{I RLS - I HLS (min)}{2} \right)$ I RLS = Indeks rata-rata lama sekolah I HLS(min)= Indeks harapan lama sekolah minimal	69,83

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
8	Indeks kesehatan	Sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat.	$I \text{ Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	79,8
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks yang digunakan untuk mengukur kesetaraan pembangunan perempuan, dengan cara membandingkan IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	IPG = Nilai IPM perempuan/nilai IPM laki-laki Ket: Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.	89,45
10	Kabupaten Layak Pemuda	Kabupaten/Kota Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kabupaten/Kota yang memiliki sistem layanan kepemudaan berbasis kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui integrasi komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin kemajuan dan kemandirian pemuda	Hasil penelitian dan penilaian Kementerian Pemuda dan Olahraga	Madya
11	Status Kabupaten Layak Anak	Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komi	Hasil penilaian dari Kementerian PPPA	745 Madya

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
		tmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak		
12	Indeks Ketertiban dan Ketentraman	Indeks komposit dari persentase jumlah penegakan perda dan persentase penanganan unjuk rasa dalam satu tahun	= %jumlah penegakan perda + %penanganan unjuk rasa	98%
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Untuk mengukur kerukunan umat beragama disuatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama	Jumlah aspek kerukunan kehidupan beragama/ jumlah total aspek kehidupan beragama) x100%	93%
14	Persentase Warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya (Benda atau tak berbenda) yang merupakan jati diri suatu masyarakat, yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang	Adapun cara pengukuran Persentase warisan budaya dilestarikan adalah $\frac{\text{jumlah warisan budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ter data}} \times 100\%$	76
15	Indeks Budaya Literasi Daerah	Parameter yang digunakan untuk mengukur tingkatan budaya membaca dan keilmuan serta keberadaan dan kondisi perpustakaan	= (UPLM/AM)x100% UPLM = Unsur pembangunan literasi masyarakat yang terdiri dari Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, tingkat kunjungan ke perpustakaan, perpustakaan berSNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dan jumlah anggota perpustakaan. AM= Aspek masyarakat	31
16	Persentase Konektivitas Antar	Hubungan antar ruas jalan dengan ruas		94,06

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
	Wilayah (%)	jalan lainnya,yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya dengan tingkat kemantapan jan sebagai salah satu indikatornya	$\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik} + \text{Jumlah Jembatan kondisi baik}}{\text{Total Jumlah Jalan} + \text{Jumlah Jembatan}} \times 100\%$	
17	Indeks Infrastruktur dasar	Komponen penilaian kinerja suatu kota/wilayah berdasarkan presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas mendasar seperti sanitasi, air minum dan listrik. Semakin tinggi indeks yang dicapai berarti tingkat pembangunan kota/wilayah tersebut semakin baik	Persentase rumah tangga bersanitasi, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak, rasio elektrifikasi	97,5
18	Indeks Sumber Daya Air	Penilaian kinerja sistem irigasi suatu wilayah yang meliputi prasaranan fisik, prasarana penunjang, personil, dokumentasi, dan kelembagaan P3A. Semakin tinggi indeks yang dicapai maka dapat dikatakan kinerja semkin baik	Persentase indeks prasarana fisik, indeks prasarana penunjang, indeks dokumentasi, indeks produktivitas tanam, indeks P3A dan indeks organisasi personalia	60
19	IKLH	parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah.	$\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$	70,99
20	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW adalah penilaian kesesuaian realisasi penataan ruang terhadap recana peruntukan yang ditetapkan dalam	$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$	98

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
		RTRW. Semakin tinggi persentase yang dicapai maka tingkat ketaatan dinilai semakin baik.		
21	Indeks Penurunan Dampak resiko Bencana	Angka yang menunjukkan bahwa semakin tinggi bencana yang tertangani maka semakin tinggi juga persentase dampak penurunan resiko bencana	Bencana yang tertangani x Jumlah Bencana tiap tahun	53,57
22	PDRB sektor pertanian	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terdiri dari : Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, dan perikanan	$\frac{\text{PDRB ADHK lapangan Usaha Pertanian tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan usaha pertanian tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha Pertanian tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 6.301,9 milyar
23	PDRB sektor Industri	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha industri pengolahan dilihat dari perubahan lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB ADHK	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sekarang dikurang PDRB ADHK lapangan Usaha Industri pengolahan tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha industri pengolahan tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 1773,16 milyar
24	PDRB sektor perdagangan	Gambaran perkembangan perekonomian khusus lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\text{PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tahun sekarang dikurang PDRB ADHK Lapangan Usaha perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}}{\text{PDRB ADHK lapangan usaha perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tahun sebelumnya}} \times 100$	Rp 1060,3 milyar
25	Persentase peningkatan investasi	Gambaran realisasi investasi baik PMDN maupun PMA sampai dengan tahun ini berdasarkan LKPM sesuai dengan UU	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Investasi tahun sekarang dikurang Jumlah Realisasi Investasi Baseline}}{\text{Jumlah Realisasi Investasi Baseline}} \times 100$	14

No.	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi	2024
		25 tahun 2007		
26	Angka kemiskinan	Gambaran persentase penduduk yang berada dibawah Garis kemiskinan	$(Pa) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ <p> $a = 0,1,2$ z =garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk </p>	11,9
27	Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran adalah banyaknya jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan.	Tingkat Pengangguran Terbuka = (Jumlah pengangguran/Angkatan Kerja) x 100%	1,87-2,87%.
28	Indeks Ketahanan Pangan	Capaian ketahanan Pangan dan Gizi Kab/Kota/provinsi dan peringkat (rangking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain	Hail hitungan foo security and Vurnerability (FSVA) yaitu analisis ketahanan dan kerentanan Pangan	78,44
29	Persentase peningkatan Desa Maju	Dalam pengukuran status desa oleh Kemendes, terdapat lima klasifikasi status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Lima status itu adalah (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri.	Jumlah desa maju/Total desa dalam Kabupaten Musi Rawas x 100	45,69

Tabel 6.2**Target Indikator Makro Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi			
	a. Range		4,5%-5,5%	4,8 %-5,8 %
	b. Moderat	4,06	5,5 %	5,55 %
2	Ekonomi Kabupaten Musi Rawas			
	* PDRB (ADHB menurut LU/ Milyar Rupiah)		21.262,02	21.262,02
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,78	68,1	68,8
4	Kemiskinan	13,34	13,05	11, 9 -12, 32
,5	Tingkat Pengangguran	1,92	2,75	1,92

Tabel 6.3

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
I	Urusan Wajib	
1	Terkait Pelayanan Dasar	
	Pendidikan	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/ TK (%)	69,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI (%)	114,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs (%)	104,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI (%)	98,50
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	98,00
	Persentase Sekolah SD dan SMP terakreditasi A (%)	35,00
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP-SD/MI/Sederajat	21,50
	Nilai Rata-rata Asesmen Kompetensi CAKAP-SMP/MTs/Sederajat	26,50
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kesetaraan (%)	100,00
	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	100,00
	Kesehatan	
	Angka harapan hidup	69,50
	Angka kematian Ibu	88,05
	Angka Kematian Bayi	3,01
	Prevalensi Stunting	6%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	kesehatan bayi baru lahir	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendaptkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita hipertensi yang mnedapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%
	Rs. dr. Sobirin	
	Indeks Kesehatan (%)	74.1
	Persentase Standar Pelayanan Minimal yang terpenuhi	86%
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	PU Bina Marga	
	Persentase Pembangunan Jalan	19,70
	Persentase Peningkatan Jalan	18,28
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	22,90
	Persentase Pembangunan Jembatan	15,00
	Persentase Peningkatan Jembatan	16,67
	Persentase Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	15,79
	PU Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan	
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum yang Layak (%)	99

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)	99
	Rasio Elektrifikasi (%)	95
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (%)	70
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (%)	100
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	100
	Indeks Luas Kawasan Permukiman dan Persawahan Yang Terlindungi (%)	65
	Persentase ketaatan terhadap RTRW (%)	97
	Persentase gedung negara beserta sarana penunjang yang berfungsi baik (%)	94
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	98
	Cakupan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	25.3%
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	40%
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	70
	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab / kota (SPM)	100%
	Persentase Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab / kota (SPM)	100%
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebaran	
	Tingkat penyelesaian pelanggaran ketentraman dan ketertiban	91
	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	91
	Persentase pendampingan Pelayanan pemadam dan Penyelamatan Kebakaran	90
	cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten	90

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Dinas Sosial	
	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi	92
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	94,5
	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial	92
	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100
	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100
	Urusan Wajib	
2	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	72,66
	Angka Angkatan Kerja (Orang)	217280
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,15
	Cakupan Tenaga Kerja Terlatih (%)	288
	Cakupan Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	75
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	
	Angka partisipasi angkatan kerja perempuan	79,12
	Persentase partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah	10,16
	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0,000428
	Rasio Korban Kekerasan Terhadap Anak	0,000497
	Pangan	
	Dinas Ketahanan Pangan	
	Skor PPH Ketersediaan Pangan	92,57 %

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Skor PPH Konsumsi Pangan	93,06 %
	Pertanahan	
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Persentase luas lahan bersertifikat	80
	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah negara	100
	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	100
	lingkungan hidup	
	Dinas Lingkungan Hidup	
	Indeks Kualitas Air	63.86
	Indeks Kualitas Udara	90.58
	Indek Tutupan Hutan dan Lahan	1.63
	Persentase Sampah yang dikelola (%)	44.75
	Persentase Limbah B3 yang dikelola (%)	34.00
	Persentase penurunan Emisi GRK (%)	68
	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	66.83%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93%
	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	15%
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Permerintah Desa	
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa	77%
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Desa	77%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	54
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) (%)	18,97
	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR) (%)	77,64
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	53,3
	Perhubungan	
	Dinas Perhubungan	
	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Perhubungan	89
	Persentase Penurunan Kejadian Kecelakaan	37
	Komunikasi dan informatika	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase penuntasan blank spot area (%)	87
	Persentase pengembangan dan pemanfaatan aplikasi (%)	85
	Persentase layanan penyebarluasan informasi pembangunan daerah (%)	85
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	
	Dinas Koperasi dan Usahakecil Menengah	
	Persentase Koperasi Aktif (%)	72
	Persentase Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil (%)	0,29
	Penanaman Nodal	
	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	
	Realisasi Nilai Investasi	9,4 T

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Kepemudaan dan Olah Raga	
	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
	Persentase Prestasi Pemuda	78%
	Persentase Prestasi Olahraga	83%
	Persentase Prestasi Keparamukaan	73%
	Statistik	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Jumlah Ketersediaan data/informasi/statistik daerah	5
	Persandian	
	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	
	Persentase pengelolaan persandian dan keamanan informasi di daerah (%)	55
	Kebudayaan	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Pelestarian budaya Musi Rawas	45,5
	Perpustakaan	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	48,00
	Jumlah Koleksi naskah kuno yang terlestarikan	1,00
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang terlestarikan	14,00
	Arsip	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	Rata- rata nilai Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI)	72,00
II	Urusan Pilihan	
	Kelautan dan Perikanan	

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Dinas Perikanan	
	Persentase peningkatan produksi perikanan per tahun	0,5%
	Persentase luas lahan dilakukan intensifikasi	0,005%
	Persentase luas lahan dilakukan ekstensifikasi	0,0005%
	Pariwisata	
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Meningkatnya Kunjungan Wisata ke Musi Rawas	67,2
	Pertanian	
	Dinas Pertanian dan Peternakan	
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	3
	Persentase Capaian Peningkatan Produksi Peternakan (%)	3
	Dinas Perkebunan	
	Meningkatnya Produksi Perkebunan (%)	
	Persentase peningkatan produksi karet	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kelapa	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kopi	1
	Persentase Peningkatan Produksi Kakao	1
	Perdagangan	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perdagangan (Rp x M)	1.021,40
	Persentase Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan (%)	5
	Tingkat Inflasi (%)	1,5

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Perindustrian	
	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	
	PDRB Sektor Perindustrian (Rp x M)	1.727,73
	Prosentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	4
	Transmigrasi	
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
	Cakupan Tingkat Kesejahteraan Eks Transmigrasi (Juta/orang/bulan)	4,29
III	Urusan Penunjang	
	Perencanaan Pembangunan	
	Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP	25
	Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP	17
	Nilai Capaian Kinerja Pada Komponen SAKIP	14
	Keuangan	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	81,51
	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	Persentase Peningkatan PAD (Pajak Daerah) terhadap Kontribusi Pendapatan Daerah (%)	100
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
	Persentase Pengisian Jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan	50
	Indeks Profesionalitas Aparatur	65,84
	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian	88,05

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Penelitian dan Pengembangan	
	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Pemerintahan dan Sosbud	85%
	Persentase Meningkatnya Inovasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan	80%
	Persentase Meningkatnya Reward Hasil Riset dan Inovasi	90%
	Pengawasan	
	Inspektorat	
	Level maturitas penyelenggaraan SPIP	3
	Persentase rekomendasi pengawasan yang tuntas ditindaklanjuti	94,37
	Persentase PD yang memperoleh nilai Evaluasi SAKIP minimal kategori BB	62
	Persentase PD yang meningkatkan implementasi aspek pengungkit 8 area perubahan pada pelaksanaan reformasi birokrasi	34
	Persentase Capaian Hasil Evaluasi Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Renaksi PPKT) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	95,47
	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	97,71
	Level kapabilitas APIP	3
	Sekretariat Dewan	
	Persentase Propemperda yang di sahkan	85
	Indeks Kepuasan layanan Anggota DPRD	85
	Pemerintahan Umum	
	Sekretariat Daerah	
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	60
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	60

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Tingkat Konflik Sara	89
	Tingkat Konflik Politik Sesial budaya pertahanan dan keamanan	92
	Presentase angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak politik	78
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	Indeks Penurunan dampak resiko bencana	51,72
	Persentase Penanggulangan bencana (%)	52,32
	Kecamatan	
	Kecamatan Tugumulyo	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan Sumber Harta	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan Jayaloka	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%
	Kecamatan Megang Sakti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	90,00%
	Kecamatan STL Ulu Terawas	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	93%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92%
	Kecamatan Muara Beliti	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	90,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	95%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92,00%
	Kecamatan Selangit	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	85%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	94%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	89%
	Kecamatan Sukakarya	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	90%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	95%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	85%
	Kecamatan Muara Lakitan	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	78,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	88,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	83,00%
	Kecamatan Muara Kelingi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	72,00%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	85,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	85%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	85,00%
	Kecamatan BTS Ulu	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%
	Kecamatan Purwodadi	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	84,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100,00%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	92,00%
	Kecamatan Tuah Negeri	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	85,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	75,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	80%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	75,00%
	Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian 2024
1	2	5
	Persentase Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam pembangunan	80,00%
	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	87,00%
	Persentase Desa dan Kelurahan Yang Bebas Konflik	100%
	Persentase Desa yang Tertib Administrasi	82,00%

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Salah satu upaya tersebut adalah dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dengan perbaikan layanan kepada masyarakat partisipasi masyarakat akan meningkat dalam pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 merupakan tahun ke empat RPJMD 2021-2026. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD 2024 dilaksanakan melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dalam menyusun rencana pembangunan daerah atau Musrenbang secara berjenjang yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Kabupaten.

Untuk penyusunan dokumen RKPD 2024 baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan wajib dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Dalam penyusunannya, RKPD 2024 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan

masyarakat;

2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan;
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya;
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD, oleh karena itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Musi Rawas;
5. Dalam upaya sinkronisasi / sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap PD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran. Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik, lancar, transparan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya diharapkan tujuan utama pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud.

Demikian RKPD Tahun 2024 ini disusun, sebagai pedoman untuk pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024

Musi Rawas, 01 Juli 2023

